

## ANALISIS PENGARUH INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA KOTAMOBAGU

Windy H. Monoarfa<sup>1</sup>, Een. N Walewangko<sup>2</sup>, Daisy Engka<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: [windymonoarfa061@student.unsrat.ac.id](mailto:windymonoarfa061@student.unsrat.ac.id), [eenwalewangko@unsrat.ac.id](mailto:eenwalewangko@unsrat.ac.id), [daysiengka@unsrat.ac.id](mailto:daysiengka@unsrat.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh infrastruktur pelayanan dasar terhadap kemiskinan di Kota Kotamobagu. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data belanja modal infrastruktur air minum, air limbah dan infrastruktur jalan pada APBD Kota Kotamobagu periode tahun 2008 – 2021 serta data kemiskinan periode 2008 – 2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data time series. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas yang terdiri atas Belanja Modal Infrastruktur air minum (  $X_1$  ), Belanja Modal Infrastruktur Air Limbah (  $X_2$  ), dan Belanja Modal Infrastruktur Jalan (  $X_3$  ) terhadap variabel terikat yaitu Tingkat Kemiskinan Kotamobagu dalam satuan persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur air minum berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Kotamobagu. Infrastruktur air limbah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Kotamobagu. Infrastruktur jalan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Kotamobagu. Secara bersama – sama infrastruktur air minum, air limbah dan infrastruktur jalan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Kotamobagu.

**Kata Kunci :** Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kemiskinan

### ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of basic service infrastructure on poverty in Kotamobagu City. This study uses secondary data in the form of capital expenditure data on drinking water infrastructure, wastewater and road infrastructure in the Kotamobagu City Budget for the 2008-2021 period as well as poverty data for the 2008-2021 period obtained from the Central Statistics Agency of North Sulawesi Province. The analysis method used in this study is time series data regression. The variables used in this study are free variables consisting of Capital Expenditure on Drinking Water Infrastructure (X1), Capital Expenditure on Wastewater Infrastructure (X2), and Capital Expenditure on Road Infrastructure (X3) against the bound variable, namely the Kotamobagu Poverty Rate in percentage units. The results showed that drinking water infrastructure has a negative but insignificant effect on poverty in Kotamobagu City. Wastewater infrastructure has a negative and significant effect on poverty in Kotamobagu City. Road infrastructure has a positive and insignificant effect on poverty in Kotamobagu City. Together, drinking water infrastructure, wastewater and road infrastructure do not affect poverty in Kotamobagu City.*

**Keywords :** Basic Service Infrastructure, Poverty

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sering didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan ril per kapita dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan struktur sosial dan perubahan sikap serta perilaku masyarakat, perbaikan sistem kelembagaan (ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya). Pembangunan ekonomi merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk atau masyarakat. Dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan merangsang proses produksi

barang maupun jasa dalam kegiatan masyarakat (Arta, 2013). Terdapat hubungan dua arah yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, terutama di daerah perdesaan yang banyak terdapat kantong-kantong kemiskinan. Sebaliknya kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ( Jonaidi ,2012).

Kemiskinan merupakan kensenjangan sosial yang kompleks di seluruh negara dengan melibatkan faktor-faktor yang saling berkaitan, antara lain: pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan (Todaro dan Smith, 2008;18). Menurut Sudarsana dalam Annisa Tri Hastuti (2006) , Kemiskinan itu sendiri mencakup beberapa faktor, yaitu (1) Kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal, (2) Gangguan dan tingginya resiko kesehatan, (3) Resiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya, (4) Kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tidak dapat hidup dengan layak, dan (5) Kekurangan dalam kehidupan sosial yang dapat ditunjukan oleh keterselisihan sosial, keterselisihan dalam proses politik serta kualitas pendidikan yang rendah.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi (Walewangko Een, 2015). Sasaran pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam pelaksanakan pembangunan. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Efektifitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi pembangunan (Nadia Ika Purnama, 2017). Upaya untuk mencapai sasaran tersebut diarahkan pada empat fokus kebijakan yang sampai saat ini masih dijalankan oleh pemerintah. Empat kebijakan tersebut diarahkan pada kebijakan pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan yaitu ; (1) Perluasan akses masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar (2) Perlindungan sosial, (3) Penanganan masalah gizi kurang dan rawan pangan, serta (4) Perluasan kesempatan berusaha (Sudarsana, 2009).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan infrastruktur Air Minum dan Air Limbah merupakan salah satu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum yang wajib disiapkan oleh pemerintah serta berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Berbagai program dan kebijakan pemerintah di bidang infrastruktur untuk mengentaskan kemiskinan telah menekan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya. Salah satu arah kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu menurunkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan meningkatkan

konektifitas antar wilayah. Untuk bidang Air Minum dan Air limbah program – program tersebut antara lain; Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat ( Pamsimas ), Sistem Pemyediaan Air Minum ( SPAM ) Perdesaaan Padat Karya, Sanitasi Berbasis Masyarakat ( Sanimas ), Sanitasi Perdesaaan Padat Karya, Program Kota Tanpa Kumuh ( Kotaku ). Semua program tersebut juga untuk mendukung Gerakan 100 0 100 oleh pemerintah, 100% sanitasi layak, 0% Kawasan kumuh dan 100% Air Minum Layak. Untuk mendukung semua program tersebut, pemerintah menyaipkan anggaran infrastruktur baik yang didanai oleh APBD ataupun yang di danani oleh APBN.

Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena menunjang pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan pelayanan distribusi barang dan jasa. Arah kebijakan penyelenggaran jalan yaitu pemeliharaaan/preservasi jalan atau peningkatan kualitas kemantapan jalan yang dilaksanakan melalui pemenuhan kelengkapan jalan serta pemeliharaan rutin jalan; pembangunan jalan dan jembatan yaitu peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan suatu wilayah.

Di kota kotamobagu, pembangunan infrastruktur Air Minum dan Air Limbah (sanitasi) dilaksanakan dengan sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Belanja pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dianggarkan setiap tahun sejak terbentuknya Kota Kotamobagu. Anggaran infrasrtuktur Air Minum dan Air Limbah setiap tahun mengalami perubahan, baik perubahan kenaikan atau perubahan penurunan jumlah anggaran. Dari data yang diperoleh, dalam periode 14 tahun terakhir 2008 – 2021 anggaran infrastruktur air minum terbesar ada pada tahun 2017 sebesar Rp. 6.295.317.650,- terendah di tahun 2020 sebesar Rp. 688.350.000,- . Anggaran Infrastruktur Air Limbah terbesar pada tahun 2018 Rp. 9.085.892.000,- dan terendah pada tahun 2008 sebesar Rp. 260.700.000,-.

Infrastruktur jalan juga menjadi program/kegiatan yang dianggarkan setiap tahun . Sebagai daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow, sejak tahun 2008 pembangunan di Kota Kotamobagu di bidang infrastruktur jalan berkembang pesat. Pembukaan akses penghubung masyarakat sampai pada desa/kelurahan dilaksanakan dengan anggaran yang cukup besar yang berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pembangunan tersebut membuka akses pertanian dan perkebunan masyarakat begitupun perluasan wilayah pemukiman baru. Panjang jalan kotamobagu saat setelah pemekaran berdasarkan SK Jalan tahun 2011 sepanjang 284,176 km dengan kemantapan jalan 36,43 % dan tahun 2022 menjadi 368,15 km dengan kemantapan jalan 87,95%. Anggaran infrastruktur jalan mengalami perubahan setiap tahun. Terbesar pada tahun 2016 sebesar Rp. 85.060.732.614 dan terendah pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 7.203.064.478.

**Tabel 1.**  
**Data Anggaran Infrastruktur Jalan, Air Minum dan Air Limbah**  
**Periode 2008 – 2021**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Belanja Modal Air Minum</b>	<b>Anggaran Belanja Modal Air Limbah</b>	<b>Anggaran Belanja Modal Jalan</b>
2008	-	260.700.000	7.203.064.478
2009	2.966.700.000	990.000.000	48.772.687.722
2010	825.000.000	1.100.000.000	58.196.803.812
2011	823.130.000	936.760.000	42.426.227.091
2012	826.260.000	826.480.000	20.953.227.845
2013	2.831.639.000	1.038.300.000	50.177.646.065
2014	2.493.227.000	1.603.382.000	48.255.788.949
2015	4.905.463.454	2.004.299.000	68.282.788.191
2016	4.032.375.860	3.696.152.667	85.060.732.614
2017	6.295.317.650	4.403.202.500	46.101.743.270
2018	3.852.174.000	9.085.892.000	37.796.387.000
2019	3.602.913.239	7.820.122.097	21.212.715.113
2020	688.350.000	7.271.030.241	10.850.015.954
2021	5.427.516.935	2.391.294.951	18.967.082.673

*Sumber : APBD Kota Kotamobagu ( data diolah )*

Data menunjukkan bahwa, jumlah penduduk periode 2008- 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah penduduk kotamobagu sebesar 112.394 jiwa terus meningkat menjadi 124.473 jiwa tahun 2021. Begitupun jumlah penduduk miskin tahun 2008 sebanyak 9.000 jiwa atau 7,60% dari total jumlah penduduk , terus mengalami perubahan hingga di tahun 2021 sebanyak 7.590 Jiwa atau 5,71 % dari total jumlah penduduk. Persentasi jumlah penduduk miskin teritigi dalam periode 2008 – 2021 terjadi pada tahun 2008 sebesar 7,60% dan terendah pada tahun 2020 sebesar 5,42 %.

**Tabel 2.**  
**Data Kemiskinan Kota Kotamobagu Tahun 2008 – 2021**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	P0	P1	P2
2008	9000	7.60	1.15	0.31
2009	8600	7.16	1.38	0.37
2010	8100	7.57	0.91	0.32
2011	7200	6.64	1.15	0.32
2012	6600	5.85	0.81	0.16
2013	6900	5.98	0.40	0.05
2014	6760	5.75	0.44	0.05
2015	6950	5.85	0.58	0.10
2016	7240	6.01	0.63	0.12
2017	7280	5.90	0.67	0.17
2018	7490	5.96	0.57	0.09
2019	7310	5.71	0.68	0.13
2020	7060	5.42	0.84	0.16
2021	7560	5.74	0.84	0.16

*Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2022*

Peran pemerintah untuk menyediakan fasilitas ataupun akses masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Meskipun masalah kemiskinan akan selalu muncul karena sifat dasar kemiskinan adalah relatif, namun ketika suatu negara mengalami peningkatan taraf hidup, maka standar hidup akan berubah. Agenda mengatasi kemiskinan bagi suatu negara berkaitan dengan banyak faktor yang berhubungan dengan apa yang diakibatkan oleh kemiskinan itu sendiri, karena dampak dari kemiskinan itu akan berhubungan dengan kondisi fundamental yang menjadi syarat berlangsungnya pembangunan suatu negara yang berkelanjutan ( Resti Meliana Sari, Ikhmaliska Aisha Maqdi, M. Yogie Syahbandar, 2017 ).

Untuk itu, penelitian ini akan melihat seberapa besar pengaruh pembangunan Infrastruktur pelayanan Dasar Air Minum dan Air Limbah serta Infrastruktur Jalan terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Kotamobagu.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh anggaran infrastruktur pelayanan dasar air minum terhadap kemiskinan di Kota Kotamobagu ?
2. Bagaimana pengaruh anggaran infrastruktur pelayanan air limbah terhadap kemiskinan di Kota Kotamobagu ?

3. Bagaimana pengaruh anggaran infrastruktur jalan terhadap kemiskinan di Kota Kotamobagu?
4. Bagaimana pengaruh anggaran infrastruktur pelayanan dasar air minum dan air limbah serta infrastruktur jalan terhadap kemiskinan di Kota Kotamobagu?

### **Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Pengaruh Anggaran Infrastruktur Pelayanan Dasar Air Minum terhadap Kemiskinan di Kota Kotamobagu
2. Mengetahui Pengaruh Anggaran Infrastruktur Pelayanan Dasar Air Limbah terhadap Kemiskinan di Kota Kotamobagu
3. Mengetahui Pengaruh Anggaran Infrastruktur Jalan terhadap Kemiskinan di Kota Kotamobagu.
4. Mengetahui Pengaruh Infrastruktur Pelayanan Dasar Air Minum dan Air limbah serta Infrastruktur jalan terhadap Kemiskinan di Kota Kotamobagu

### **Manfaat Penelitian**

1. Dapat memberikan masukan Penting kepada Pemerintah, utamanya tentang pengaruh penganggaran Infrastruktur pelayan dasar untuk penyelesaian masalah kemiskinan di Kota Kotamobagu.
2. Dapat menjadi sumber Informasi dan pengetahuan untuk penelitian – penelitian selanjutnya.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Teori Perencanaan Pembangunan**

Menurut Todaro (1986) Perencanaan pembangunan adalah usaha secara sadar yang dilakukan oleh suatu organisasi ( misalnya pemerintah ) guna mempengaruhi, mengarahkan serta mengendalikan perubahan variable – variable pembangunan dari suatu negara atau wilayah selama kurun waktu sesuai dengan serangkaian tujuan – tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **Teori Kemiskinan**

Pengertian kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam lima kelompok yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara (Sumodiningrat, 1999:4). Kemiskinan Absolut, terjadi jika pendapatan penduduk tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup minimum antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Kemiskinan Relatif, terjadi jika pendapatan penduduk di atas garis kemiskinan, namun relatif rendah bila dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya.

### **Teori Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah adalah keseluruhan pengeluaran yang dilakukan yaitu pengeluaran yang meliputi konsumsi dan investasi. Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran (perbelanjaan) pemerintah ke atas barang-barang modal, barang konsumsi dan ke atas jasa-jasa (Sukirno, 2010).

### **Teori Pertumbuhan Ekonomi ( Distribusi Pendapatan )**

Menurut Kuznets “pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya”. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan-kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

### **Teori Infrastruktur**

Hirschman ( 1958 ) mendefinisikan infrastruktur sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Tanpa infrastruktur, kegiatan produksi pada berbagai sektor kegiatan ekonomi ( industry ) tidak dapat berfungsi. Sedangkan menurut Ian Jacobs, et al, 1999, infrastruktur dibagi menjadi infrastruktur dasar dan pelengkap.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian Resti Melianan Sari, Ikhmaliska Aisha Maqdi, M. Yogie Syahbandar ( 2017) berjudul Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kemiskinan Kota Tangerang bertujuan untuk melihat 1. Kondisi investasi (belanja) pemerintah Kota Tangerang dalam bidang Infrastruktur,2. Kondisi pendapatan masyarakat dan kemiskinan, 3. Keterkaitan antara investasi pemerintah dalam bidang infrastruktur dengan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan Data Sekunder berupa pengeluaran infrasrtuktur dan jumlah penduduk miskin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisa data yang tersaji dalam bentuk angka-angka adapun analisis kuantitatif yang digunakan adalah metode analisis regresi dan metode analisis korelasi. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Nilai investasi (belanja) pemerintah Kota Tangerang dalam bidang Infrastruktur setiap tahunnya mengalami perubahan, 2. Persentase dan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan di Kota Tangerang dari tahun 2010 sampai dengan 2014 yang terus menurun, 3. Kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil, 4. Penyebaran pendapatan sesama penduduk miskin semakin tidak timpang,5. Hubungan di antara investasi infrastruktur dengan kemiskinan cukup erat yaitu memiliki nilai korelasi 0.517,6. Investasi Infrastruktur memiliki pengaruh sebesar 26,7% terhadap perubahan tingkat kemiskinan masyarakat Kota Tangerang, 7. Hubungan

korelasi yang terjadi berupa variable merupakan korelasi negative, yaitu apabila biaya untuk pembangunan infrastruktur ditingkatkan (+), maka jumlah masyarakat miskin akan berkurang (-). Begitupun sebaliknya.

Penelitian Mardiana, Theresia Militina, Anis Rachma Utary (2017 ) berjudul Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur terhadap tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada tahun 2006-2015. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Jalur ( Path Analisis ). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam mempengaruhi tingkat pengangguran, Pengeluaran anggaran bidang pendidikan berpengaruh langsung dan tidak signifikan dengan nilai pengaruh  $-0,570$  dan signifikansi  $0,216 > 0,050$ . Pengeluaran anggaran bidang kesehatan berpengaruh langsung dan signifikan dengan nilai pengaruh  $-0,800$  dan signifikansi  $0,047 < 0,050$ . Pengeluaran anggaran bidang infrastruktur berpengaruh langsung dan tidak signifikan dengan nilai pengaruh  $-0,013$  dan signifikansi  $0,970 > 0,050$ . Dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan, Pengeluaran anggaran bidang pendidikan berpengaruh langsung dan tidak signifikan dengan nilai pengaruh  $0,239$  dan signifikansi  $0,623 > 0,050$ . Pengeluaran anggaran bidang kesehatan berpengaruh langsung dan signifikan dengan nilai pengaruh  $-0,888$ , dan signifikansi  $0,033 < 0,050$ . Pengeluaran anggaran bidang infrastruktur berpengaruh langsung dan tidak signifikan dengan nilai pengaruh  $-0,075$ , dan signifikansi  $0,826 > 0,050$ . Pengangguran Terbuka berpengaruh langsung dan tidak signifikan dengan nilai  $0,248$  dan signifikansi  $0,555 > 0,050$ .

Penelitian Heru Syah Putra dan Nanang Rianto berjudul Pengaruh Akses Air Bersih Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. Pengujian Data Rumahtangga bertujuan untuk menguji pengaruh ketersediaan akses air bersih terhadap tingkat pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) ke 5 yang dikumpulkan oleh tim RAND. IFLS merupakan survei kondisi ekonomi masyarakat di Indonesia. Hingga tahun 2014/2015, yaitu gelombang ke-5, IFLS telah melakukan penambahan jumlah dengan alasan kelengkapan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh akses air bersih terhadap tingkat pendapatan rumah tangga dan kemiskinan di Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa RT yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas air bersih memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah sebesar 17,17 persen dibandingkan RT yang memiliki akses air bersih. Kemungkinan menjadi RT miskin juga lebih tinggi besar 1,29 persen pada RT yang tidak memiliki akses air bersih. Oleh sebab itu penulis menyarankan peningkatan akses air bersih melalui pembangunan sarana dan prasarana air bersih khususnya di pedesaan lebih diprioritaskan.

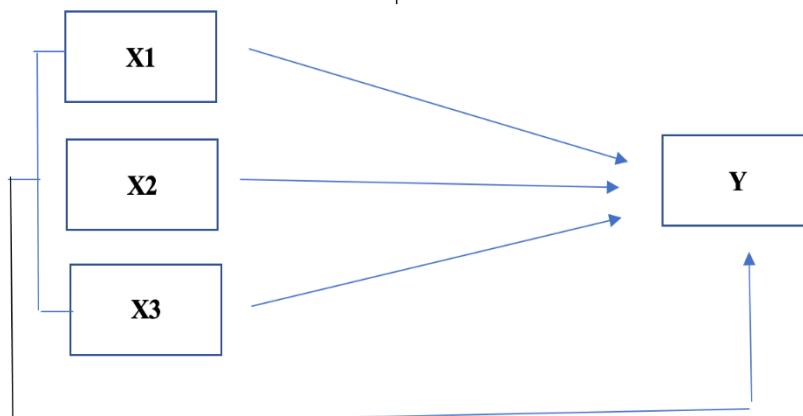
Penelitian Ide Juang Humantito ( 2009 ) berjudul Analisis Keterkaitan Ketersediaan Infrastruktur Terhadap Kemiskinan Di Indonesia ( Model Regresi Data Panel Tahun 2001 – 2007 ). Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat keterkaitan ketersediaan infrastruktur terhadap kemiskinan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data persentase penduduk miskin , data cakupan puskesmas keliling, data cakupan jalan, jumlah smk, jaringan distribusi listrik, jumlah sd, dan kapasitas produksi efektif perusahaan air bersih, dengan metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen ketersediaan infrastruktur berpengaruh signifikan dan negatif terhadap variabel persentase penduduk miskin. Disarankan kepada Pemerintah agar dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk mengurangi prosentase penduduk miskin, dapat menyusun prioritas berdasarkan nilai koefisien variabel independen yang membentuk model, berturut – turut yaitu cakupan jumlah puskesmas keliling, cakupan panjang jalan, jumlah SMK, jaringan distribusi listrik, jumlah SD dan kapasitas produksi efektif perusahaan air bersih.

Penelitian Ida Ayu Surya Krisna, Jayanti, I Ketut Sutrisna ( 2020 ) berjudul Pengaruh tingkat pendidikan, infrastruktur, dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Bali bertujuan untuk ;1) menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, infrastruktur dan dana desa berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2) Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, infrastruktur dan dana desa berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan di BPS Provinsi Bali dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan data panel time series dari tahun 2017-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Tingkat pendidikan, Belanja Modal dan Dana Desa berpengaruh simultan dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. 2) Tingkat pendidikan, Infrastruktur dan Dana Desa berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Penelitian Sidik Budiono dan John Tampil Purba ( 2022 ) berjudul Reducing poverty strategy through educational participation, clean water, and sanitation in Indonesia yang bertujuan Untuk menganalisis sejauh mana peningkatan partisipasi Pendidikan, akses air bersih dan akses sanitasi dalam menurunkan kesenjangan kemiskinan. Data yang dianalisis meliputi 501 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia pada tahun 2018 dengan Metodologi yang digunakan adalah pendekatan ekonometrika dengan model persamaan regresi berganda dengan ketentuan robustness. Hasil analisis penelitian ini membuktikan bahwa peran pendidikan dan akses air bersih secara signifikan mengurangi kemiskinan. Partisipasi individu yang lebih tinggi dalam mengambil pendidikan dengan kualitas yang baik akan meningkatkan kondisi individu dari kemiskinan, baik standar hidup secara keseluruhan maupun kesetaraan secara struktural. Semakin meningkatnya akses air bersih untuk kegiatan kegiatan domestik akan mengurangi indeks kesenjangan kemiskinan dan secara otomatis meningkatkan standar hidup

secara signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa prioritas kebijakan pendidikan, ketersediaan air bersih dan distribusi yang memadai, serta sarana sanitasi adalah diperlukan untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan.

### Kerangka Pikir



**Gambar 1**

*Sumber Kajian diolah Penulis*

### Hipotesis Penelitian

1. Diduga terdapat pengaruh anggaran infrastruktur pelayanan dasar air minum terhadap kemiskinan di Kota Kotamobagu
2. Diduga terdapat pengaruh anggaran infrastruktur pelayanan dasar air limbah terhadap kemiskinan di Kota Kotamobagu
3. Diduga terdapat pengaruh anggaran infrastruktur jalan terhadap kemiskinan di Kota Kotamobagu
4. Diduga terdapat pengaruh anggaran infrastruktur pelayanan dasar air minum dan air limbah serta infrastruktur jalan terhadap kemiskinan di Kota Kotamobagu

## 2. METODE PENELITIAN

### Data Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data Anggaran Belanja Modal Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kotamobagu dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Kotamobagu untuk Kegiatan Air Minum, Air Limbah dan Infrastruktur Jalan Tahun 2008- 2021 ( Data 14 Tahun terakhir ) serta data jumlah penduduk miskin Kotamobagu yang diambil dari Badan Pusat Statistik ( BPS ) Provinsi Sulawesi Utara.

## Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dengan mendatangi instansi terkait dan melakukan pengumpulan data sekunder di instansi tersebut. Melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan literatur/teori bahkan beberapa studi empiris sebelumnya yang terkait dengan infrastruktur dan kemiskinan.

## Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

1. Kemiskinan ( Y ) Adalah tingkat kemiskinan di Kota Kotamobagu setiap tahunnya diukur dalam persen.
2. Anggaran Infrastruktur air Minum ( X1 )adalah anggaran belanja modal dalam APBD Kota Kotamobagu untuk pembangunan infrastruktur Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu yang diukur dalam rupiah.
3. Anggaran Infrastruktur air limbah ( X2 ) adalah anggaran belanja modal dalam APBD Kota Kotamobagu untuk pembangunan infrastruktur air limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu yang diukur dalam rupiah.
4. Anggaran Infrastruktur Jalan ( X3 ) adalah anggaran belanja modal dalam APBD Kota Kotamobagu untuk pembangunan infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu yang diukur dalam rupiah.

## Metode Analisis

Alat analisa yang dipakai untuk mengetahui ada tidaknya paradoks pertumbuhan ekonomi menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah salah satu teknik statistika yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen yang bersifat linier terhadap satu variabel dependen. Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) yaitu mengestimasi garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Gujarati, 2012).

Persamaan matematis untuk model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kemiskinan

X1 = Anggaran Infrastruktur Air Minum

X2 = Anggaran Infrastruktur Air Limbah

$X_3$  = Anggaran Infrastruktur Jalan

$e$  = Error term

$\beta_0$  = Intersep

$\beta_1 - \beta_4$  = koefisien regresi

## Pengujian Hasil Persamaan Regresi

### Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

### Uji signifikan simultan (Uji statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:  $H_0: b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$  Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ), tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:  $H_a: b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$  Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variable dependen (Pyndick, 1998)

### Uji signifikansi individual (Uji statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi-variabel terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $b_i$ ) sama dengan nol, atau:  $H_0: b_i = 0$  Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen. Hipotesis alternatif parameter suatu variabel tidak sama dengan nol.  $H_a: b_i \neq 0$  Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2013:244).

## Pengujian Model dengan Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi faktor gangguan (residual). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan

analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik adalah dengan grafik histogram dan melihat normal probability plot yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Sedangkan uji statistik dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual.

### **Uji Multikolinearitas**

Terjadinya multikolinieritas yang rawan pada model regresi bisa dideteksi keberadaannya bila  $R^2$  dari auxilary regression melebihi  $R^2$  regresi keseluruhan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas model yang diteliti. Selain itu jika nilai varian inflation faktor (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinieritas.

Jika suatu persamaan mengalami kondisi ketidakbebasan secara linier (dimana terdapat suatu baris/kolom yang merupakan kombinasi linier baris/kolom yang lain) maka sistem persamaan tersebut tidak akan memiliki solusi. Hal ini terjadi jika variabel bebas yang ada pada model mengalami multikolinieritas sempurna. Sedangkan jika multikolinieritas adalah tidak sempurna, maka kesulitan yang terjadi adalah kesulitan dalam inferensi karena standar error yang bersifat Variabel (Gujarati, 2012).

### **Uji Heteroskedasitas**

Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedasitas digunakan metode grafik scatter plot, uji White, dimana apabila nilai probabilitas  $n(p$  value) observasi  $R^2$  lebih besar dibandingkan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan  $\alpha = 5\%$ ), maka residual digolongkan homoskedasitas. Asumsi penting (asumsi Gauss Markov) dalam penggunaan Ordinary Least Square (OLS) adalah varians residual yang konstan. Varians dari residual tidak berubah dengan berubahnya satu atau lebih variabel bebas. Jika asumsi ini terpenuhi, maka residual disebut homokedastis. Jika tidak, disebut heterokedastis (Gujarati, 2012).

### **Uji Autokorelasi**

Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data time series walaupun dapat juga terjadi pada data cross section. Dalam data time series observasi diurutkan menurut urutan waktu secara kronologis. Maka dari itu, besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan, khususnya kalau interval antara dua observasi sangat pendek. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM test) dimana apabila probabilitas  $f$  hitung  $> \alpha (5\%)$ , maka bebas dari autokorelasi.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Model Persamaan

Adapun Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah *Ordinary Least Square (OLS)*. Model persamaan dalam penelitian ini adalah model semi log ( model Lin-Log), dimana transformasi hanya dilakukan terhadap variable bebas saja atau  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  sementara variable Y tetap dalam bentuk linier. Dengan demikian persamaan model ini dituliskan sebagai berikut

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}X_1 + \beta_2 \text{Log}X_2 + \beta_3 \text{Log}X_3 + e$$

**Tabel 3**

**Hasil Uji**

Dependent Variable: Y  
 Method: Least Squares  
 Date: 10/29/22 Time: 22:15  
 Sample: 2008 2021  
 Included observations: 14

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.77193	6.746659	2.337739	0.0415
LOG(X1)	-0.047185	0.222216	-0.212337	0.8361
LOG(X2)	-0.479558	0.165091	-2.904812	0.0157
LOG(X3)	0.071760	0.234796	0.305627	0.7662
R-squared	0.482180	Mean dependent var	6.224286	
Adjusted R-squared	0.326834	S.D. dependent var	0.717021	
S.E. of regression	0.588292	Akaike info criterion	2.011769	
Sum squared resid	3.460871	Schwarz criterion	2.194356	
Log likelihood	-10.08238	Hannan-Quinn criter.	1.994867	
F-statistic	3.103913	Durbin-Watson stat	0.704602	
Prob(F-statistic)	0.075841			

*Sumber: Hasil Olahan Eviews 12*

Persamaan regresi yang terbentuk dari hasil pengolahan data menggunakan EVViews 12 adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}X_1 + \beta_2 \text{Log}X_2 + \beta_3 \text{Log}X_3 + e$$

$$Y = 15,77193 - 0,047185 \text{Log}(X_1) - 0,479558 \text{Log}(X_2) + 0,071760 \text{Log}(X_3)$$

#### Koefisien Determinasi

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien determinasi ( Adj. R<sup>2</sup> ) sebesar 0.326834 atau 32,6834% . Hal ini menunjukkan bahwa variable – variable independent dalam hal ini Infrastruktur Air Minum ( X<sub>1</sub> ), Air Limbah ( X<sub>2</sub> ) dan Infrastruktur Jalan ( X<sub>3</sub> ) secara bersama – sama memiliki pengaruh 32,6834% terhadap kemiskinan di Kota Kotamobagu. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### Uji Statistic F

Dari hasil pengolahan menggunakan eviews 12 dapat dilihat Prob (F-statistik) 0,075841. Pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$ , Prob (F-statistik) 0,075841  $> \alpha = 0.05$ , Ha:  $b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$  Yang artinya semua variable bebas ( $X_1, X_2, X_3$ ) secara bersama – sama atau simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

### Uji Statistik t

Nilai probabilitas  $X_1$  0,8361  $> 0,05$ , berarti  $H_0$  diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Infrastruktur Air Minum (  $X_1$  ) tidak berpengaruh secara signifikan dan berhubungan negatif terhadap kemiskinan di Kota Kotamobagu.

Nilai probabilitas  $X_2$  0,0157  $< 0,05$ , berarti  $H_0$  ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Infrastruktur Air Minum (  $X_2$  ) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan negatif terhadap kemiskinan di Kota Kotamobagu.

Nilai probabilitas  $X_3$  0,7662  $> 0,05$ , berarti  $H_0$  diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Infrastruktur Jalan (  $X_3$  ) tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kemiskinan di Kota Kotamobagu.

### Pengujian Model dengan Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

**Gambar 2**

**Hasil Uji Normalitas**



Sumber : Hasil Olahan Eviews 12

Berdasarkan tabel uji normalitas di atas, nilai probabilitas Jargue-Bera (0,777418)  $> \alpha$  (0,05) maka  $H_0$  diterima. Karena  $H_0$  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variance Inflation Factors  
 Date: 10/29/22 Time: 22:27  
 Sample: 2008 2021  
 Included observations: 14

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	45.51741	1841.281	NA
LOG(X1)	0.049380	933.0943	1.119725
LOG(X2)	0.027255	506.4111	1.077773
LOG(X3)	0.055129	1309.758	1.063256

*Sumber : Hasil olah data Eviews 12*

Dari hasil uji multikolinearitas pada model ini, inflation faktor (VIF) pada  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$   $< 10$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastitas

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: White  
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.404037	Prob. F(9,4)	0.8809
Obs*R-squared	6.666640	Prob. Chi-Square(9)	0.6718
Scaled explained SS	1.966786	Prob. Chi-Square(9)	0.9920

*Sumber : Hasil olah data Eviews 12*

Dari hasil uji Heteroskedastisitas dengan uji white menggunakan Eviews 12 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas observasi R2 sebesar 0,6718 jika dibandingkan dengan tingkat resiko kesalahan yang diambil ( digunakan  $\alpha = 5\%$ ),  $0,6718 > 0,05$  artinya residual digolongkan homoskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Pada hasil uji model regresi ini terjadi  $d < dL$  atau  $0,704602 < 0,7667$  sehingga model regresi ini dinyatakan terdapat autokorelasi .

## Pembahasan

1. Secara parsial, anggaran belanja modal air minum dan kemiskinan berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Nilai koefisien regresi anggaran belanja modal air minum sebesar -0,047185.
2. Secara parsial, anggaran belanja modal air limbah dan kemiskinan berpengaruh negative dan signifikan. Nilai koefisien regresi anggaran belanja modal air limbah sebesar -0,479558 artinya setiap kenaikan 1 satuan anggaran infrastruktur air limbah, maka akan mengurangi persentase kemiskinan sebesar 47,9558%.
3. Secara parsial, anggaran belanja modal infrastruktur jalan dan kemiskinan berpengaruh positif dan tidak signifikan. Nilai koefisien regresi anggaran belanja modal jalan sebesar 0,071760.
4. Secara simultan, dapat dilihat nilai Prob (F-statistik) 0,075841. Pada level signifikansi  $\alpha = 0,05$ , Prob (F-statistik)  $0,075841 > \alpha = 0,05$  yang berarti anggaran belanja modal infrastruktur air minum, air limbah dan jalan secara bersama – sama tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Kotamobagu. Namun pada level signifikansi  $\alpha = 0,10$ , prob (F-statistik)  $0,075841 < \alpha = 0,10$  yang artinya anggaran belanja modal infrastruktur air minum, air limbah dan infrastruktur jalan secara bersama – sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Kotamobagu.

## 3. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran belanja modal infrastruktur air minum berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Kotamobagu, artinya jika anggaran belanja modal infrastruktur air minum meningkat, dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Kotamobagu.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran belanja modal infrastruktur sanitasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kota kotamobagu, artinya jika anggaran belanja modal sanitasi meningkat, dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Kotamobagu.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran belanja modal jalan berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Kotamobagu, artinya jika anggaran belanja modal jalan meningkat, tingkat kemiskinan akan meningkat sehingga disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara anggaran belanja modal infrastruktur jalan dengan kemiskinan di Kota Kotamobagu.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran belanja modal air minum, air limbah dan jalan secara bersama – sama tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Kotamobagu.

**Saran**

1. Pemerintah Kota Kotamobagu agar dapat lebih meningkatkan pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin.
2. Pemerintah juga lebih memperhatikan infrastruktur yang dibangun, benar – benar langsung bisa dimanfaatkan khususnya untuk infrastruktur air minum yang terbanguan.
3. Penulis berharap penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga diketahui dapat diketahui perkembangan – perkembangan di tahun – tahun mendatang.
- 4.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Yoga Krissawindaru Arta, 2013, Pengaruh Penanaman Modal Asing (Pma), Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn), Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
- Arius Jonaidi, 2012, Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia
- Todaro, M. P. (2008). Pembangunan Ekonomi (Jilid 1) (Edisi 9). Edisi Kesembilan Terjemahan Oleh Haris Munandar Dan Puji AL. Jakarta: Erlangga
- Annisa Tri Hastuti,2016, Analisis Kemiskinan dan Ketersediaan Infrastruktur di Pedesaan Kawasan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang Email: [annisa.trii@yahoo.com](mailto:annisa.trii@yahoo.com)
- Walewangko E.N, 2015, Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Upaya Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Efisiensi, Vol.15 No.4
- N.I Purnama, 2017, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara, Jurnal Ekonomikawan 17(1).
- Sudarsana, 2009, Program Raskin Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia.Jurnal Sosiologi Dilema, Vol.21, No.2 Tahun 2009.
- Resti dkk,2017, Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kemiskinan Kota Tangerang, ISBN : 978-602-73463-1-4 737 <http://pasca.unand.ac.id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota>.
- Todaro, Michael. P, 1986, Perencanaan Pembangunan: Model dan Metode, Jakarta: Intermedia.
- Semodiningrat, Gunawan. 1999. Kemiskinan : Teori, Fakta dan Kebijakan. Jakarta; impac
- Sukirno S, 2010, Ekonomi Pembangunan, LPEF-UI Bima Grafika, Jakarta
- Gujarati Damodar N dan Dawn C Porter, 2012, Dasar – Dasar Ekonometrika. Salemba Empat, Jakarta.
- Pyndick, Robert S and Daniel L, Rubinfield. 1998. Economics Models and Economic Forcast. New York: Mc Graw-Hill International
- Kuncoro M, 2000, Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta

**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN KOTA KOTAMOBAGU**

***Eko Gunawan Asnawi<sup>1</sup>, Daisy S.M. Engka<sup>2</sup>, Een. N Walewangko<sup>3</sup>***

*Program Studi Magister Ilmu Ekonomi*

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

*Universitas Sam Ratulangi Manado*

*Email: [ekoasnawi061@student.unsrat.ac.id](mailto:ekoasnawi061@student.unsrat.ac.id)*

**ABSTRAK**

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah harus ditopang oleh indikator makro ekonomi yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harus sejalan dengan kemampuan daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, termasuk juga di dalamnya ketimpangan pendapatan. Atau dengan kata lain salah satu kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi inklusif yang dicapai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pertumbuhan ekonomi Inklusif terhadap dengan kemiskinan, pengangguran dan Gini ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu.

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya. Data – data tersebut adalah Data Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Tingkat pengangguran Terbuka dan Gini Rasio, PDRB ADHK di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu tahun 2015 – tahun 2021 yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, dengan alamat resmi <https://sulut.bps.go.id>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu pada tahun 2015-2021 bersifat belum inklusif dalam menurunkan kemiskinan, pengangguran dan gini ratio, ini di tandai masih adanya pertumbuhan yang bersifat non inklusif terhadap kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

**Kata Kunci :** *Pertumbuhan ekonomi inklusif, Kemiskinan, Pengangguran, Gini ratio*

**ABSTRACT**

*Economic growth as one of the indicators of the success of regional development must be supported by macroeconomic indicators that show the level of public welfare. This means that high economic growth must be in line with the ability of regions to reduce unemployment and poverty, including income inequality. Or in other words, one of the economic development performance of a region is shown by the inclusive economic growth achieved.*

*This study aims to determine whether there is inclusive economic growth towards poverty, unemployment and Gini ratio in Bolaang Mongondow Regency and Kotamobagu City.*

*The data used for this study are secondary data. Secondary data is a type of data obtained and excavated through the results of second-party processing from the results of field research. These data are Data on Economic Growth, Poverty, Open Unemployment Rate and Gini Ratio, ADHK GRDP in Bolaang Mongondow Regency and Kotamobagu City in 2015 – 2021 obtained from the official website of the Central Statistics Agency (BPS) North Sulawesi, with an official address <https://sulut.bps.go.id>*

*The results showed that economic growth in Bolaang Mongondow Regency and Kotamobagu City in 2015-2021 was not inclusive in reducing poverty, unemployment and gini ratio, this is indicated by the non-inclusive growth of poverty, unemployment and inequality.*

**Keywords :** *Inclusive economic growth, Poverty, Unemployment, Gini ratio*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah harus ditopang oleh indikator makro ekonomi yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harus sejalan dengan kemampuan daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, termasuk juga di dalamnya ketimpangan pendapatan. Atau dengan kata lain salah satu kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi inklusif yang dicapai.

Menurut Kuncoro (2000) pemerintah akan melakukan sebuah kebijakan pembangunan daerah dengan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah guna mempersempit kesenjangan regional. Pada awalnya, perubahan konsep dan kewenangan daerah dilakukan berdasarkan pemerintahan pusat, namun selanjutnya akan diarahkan agar setiap daerah dapat mandiri dalam mengelola kawasannya dan membuat kebijakan-kebijakan pembangunan daerahnya sendiri. Hal tersebut akan menciptakan pola pembangunan yang berbeda yang disebabkan oleh adanya letak geografis, karakteristik, sumber daya alam, sarana dan prasarana pembangunan, serta sumber daya manusia yang ada. Kebijakan pembangunan yang akan dilakukan harus sesuai dengan karakteristik potensi daerah tersebut, maka dari itu dalam pembangunan daerah membutuhkan pengenalan potensi dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya perbedaan latar belakang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran serta mengurangi ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah apabila pertumbuhan tersebut mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dalam hal ini konsep pertumbuhan inklusif berkaitan erat dengan konsep pertumbuhan yang *pro poor*. Dengan kata lain, berdasarkan hasil yang dicapainya, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang mampu menurunkan kelompok yang “tidak diuntungkan” dalam perekonomian. Mengacu pada dua fokus tersebut, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak mendiskriminasikan dan mampu menjamin pemerataan akses pertumbuhan sekaligus sebagai pertumbuhan yang mampu menurunkan kelompok yang tidak memperoleh keuntungan dari pertumbuhan (mengurangi disparitas antar kelompok) (Amalina, S. dkk, 2013).

Menurut Prasetyantoko, dkk (2012), pembangunan ekonomi inklusif adalah Pembangunan untuk semua orang, tidak peduli latar belakang dan perbedaan-perbedaannya. Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memastikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan masyarakat, khususnya yang miskin. Pertumbuhan didefinisikan sebagai inklusif jika meningkatkan fungsi kesempatan sosial, yang tergantung pada dua faktor yaitu: (i) peluang rata-rata yang tersedia bagi masyarakat, dan (ii) bagaimana peluang dibagi kepada masyarakat.

Beberapa alasan mengapa pertumbuhan harus inklusif yaitu:

1. Pertimbangan kesetaraan dan keadilan, pertumbuhan seharusnya terdistribusi dan inklusif di seluruh lapisan masyarakat dan daerah.
2. Pertumbuhan dengan ketimpangan yang persisten dapat membahayakan kondisi sosial, seperti orang miskin dan pengangguran lebih rentan masuk dalam aktivitas kriminal, perempuan lebih rentan ke prostitusi, dan tenaga kerja anak yang tidak diharapkan.
3. Ketimpangan dalam hasil dan akses yang berkelanjutan dapat mengganggu stabilitas politik dan struktur sosial sehingga mengurangi potensi pertumbuhan yang berkelanjutan.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu ?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi bersifat Inklusif terhadap pengangguran di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif dengan ketimpangan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu ?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pertumbuhan ekonomi Inklusif terhadap kemiskinan di Kabupaten Bokang Mongondow dan Kota Kotamobagu.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya pertumbuhan inklusif terhadap pengangguran di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu.
3. Untuk mengetahui ada tidaknya pertumbuhan inklusif terhadap ketimpangan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu.

### **Manfaat Penelitian**

1. Bagi pemerintah, diharapkan dalam penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran dan masukkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu terkait dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.

2. Bagi Masyarakat, diharapkan dalam penelitian ini, dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kualitas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu.
3. Bagi peneliti, Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai variabel apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten Bolaang Mongondow dan kota Kotamobagu.

## Tinjauan Pustaka

### Teori Perencanaan Pembangunan

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi, (Todaro,2003)

### Teori Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Menurut Ali dan Zhuang (2007) yang menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memastikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan masyarakat, khususnya yang miskin.

Pertumbuhan ekonomi inklusif dapat dikatakan sebagai pendekatan baru dalam teori- teori pertumbuhan (Huang & Quibria, 2013). Hal tersebut sesuai dengan definisi UNDP bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga manfaat pertumbuhan tersebut dinikmati oleh semua pihak. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang mampu mengurangi ketimpangan antara sektor pertanian dan non-pertanian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif bukan hanya mengejar tingginya angka pertumbuhan melainkan juga kesetaraan yang diukur dari penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi inklusif erat kaitannya dengan pertumbuhan *pro-poor* dimana keduanya bermaksud menurunkan angka kemiskinan. Namun demikian, pertumbuhan inklusif memiliki dimensi yang berbeda dalam hal kesetaraan pendapatan (Ranieri & Ramos, 2013). *Pro-poor* lebih berfokus pada orang yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan pertumbuhan inklusif berfokus pada penyetaraan di semua lapisan masyarakat, baik miskin, menengah, dan kaya. Hal tersebut disebabkan pertumbuhan yang hanya berpihak pada kaum miskin akan berisiko

menurunkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengutamakan kesetaraan antar tingkat masyarakat guna memperluas peluang ekonomi baru (McKinley, 2010).

### **Teori Kemiskinan**

Kotze (dalam Hikmat, 2004:6) menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kendatipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya. Pengisolasian ini menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi semakin miskin.

Selanjutnya Supriatna (1997:90) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

### **Teori Pengangguran**

Menurut Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja.

## Teori Gini Ratio

Rasio Gini atau koefisien gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.

## Penelitian Terdahulu

Penelitian Wulan Retno Hapsari berjudul Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, bertujuan untuk menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi inklusif telah terjadi di kabupaten dan kota di wilayah propinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dengan cakupan 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah Penentuan Bobot Variabel, Normalisasi Data Awal, Penghitungan Indeks Pertumbuhan. Hasil IGI Kabupaten/Kota di propinsi Jawa Tengah terdapat enam Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori sangat memuaskan, dua puluh lima Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori memuaskan dan terdapat empat Kabupaten dalam kategori kurang memuaskan.

Penelitian Oleh Dyah Hapsari Amalina dengan judul Pertumbuhan Inklusif : Fenomena Pertumbuhan Inklusif Di Kawasan Indonesia Bagian Barat Dan Indonesia Bagian Timur, Tujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan Ekonomi di Indonesia telah Inklusif? data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data provinsi-provinsi di Indonesia selama 10 tahun yaitu tahun 2002 hingga 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang seluruhnya dikumpulkan oleh BPS. Metode kuantitatif merupakan metode yang dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian 1. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2008-2012 belum inklusif dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Provinsi DIY dan Papua Barat adalah provinsi yang pertumbuhannya inklusif untuk semua indikator pada tahun 2008. Provinsi NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan adalah provinsi yang pertumbuhannya inklusif untuk semua indikator pada tahun 2010. Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah adalah provinsi yang pertumbuhannya inklusif untuk semua indikator pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2009 dan 2012 tidak satupun provinsi yang memiliki pertumbuhan

yang inklusif dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 2. Pertumbuhan yang inklusif dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja bukan fenomena yang konsisten di Indonesia. 3. Fenomena pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lebih banyak terjadi di wilayah Indonesia Bagian Barat (IBB). Meskipun demikian, persentase jumlah provinsi di IBB memiliki kecenderungan semakin menurun terutama sejak tahun 2010.

Penelitian oleh Cahyaning Wahyu Singosari, 2017 dengan judul Analisis Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Pertumbuhan Inklusif di Jawa Timur. Tujuan penelitian Untuk mengetahui peran pemerintah terhadap sektor-sektor ekonomi dalam tabel input-output Jawa Timur yang akan mewujudkan pertumbuhan inklusif di Jawa Timur. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder Tabel Input-Output Provinsi Jawa Timur tahun 2006, 2010, dan 2015 yang diperoleh dari BPS Jawa Timur. Metode analisis menggunakan Pengganda Pemerintah (Government Multiplier Effect), Analisis Pengganda Tenaga Kerja (Employment Multiplier Effect), Linkage. Berdasarkan hasil penelitian, sektor inklusif Jawa Timur dari tahun 2006 hingga tahun 2015 merupakan sektor yang dapat mendorong terwujudnya pertumbuhan inklusif di Jawa Timur. Sektor inklusif tahun 2006 hingga tahun 2015 berjumlah satu sektor dengan empat komoditas, sektor inklusif tahun 2006 berjumlah satu sektor dengan empat komoditas antara lain Barang Dari Plastik, Jasa Reparasi, Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor, dan Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial. Komoditas sektor inklusif tahun 2010 antara lain Pakan Ternak, Logam Dasar, Barang Dari Logam Lainnya, dan Mesin Dan Perlengkapan Ytdl. Sedangkan komoditas sektor inklusif tahun 2015 antara lain Industri Kimia Dasar, Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional, Industri Karet Dan Barang Dari Karet, dan Industri Barang Dari Plastik.

Penelitian Oleh Hettyca Astuningdyas 1, Haerudin2, Budi Sugito3 Dengan Judul Penguatan Pertumbuhan Inklusif Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan strategi penguatan pertumbuhan inklusif di masa adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yang difokuskan pada data tahun 2019,2020 dan prediksi tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan lokus penelitian di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketiga strategi tersebut sudah

tepat dalam menjawab akar permasalahan di Provinsi Jawa Tengah sehingga diharapkan Provinsi Jawa Tengah akan semakin tangguh dan mampu mewujudkan visi Provinsi Jawa Tengah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” serta berkontribusi optimal terhadap peningkatan ketahanan nasional bangsa.

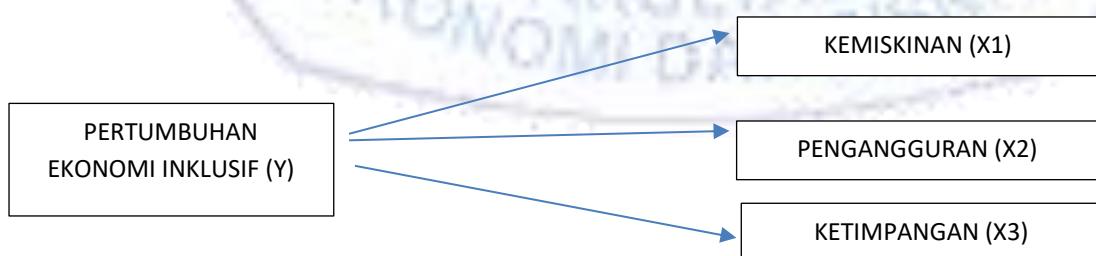
Penelitian Oleh M. Mujahid Shaleh1, 2021 dengan judul Indeks Pembangunan/Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat indeks pembangunan/pertumbuhan ekonomi Inklusif provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2013-2020 dikaitkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta komponennya di Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu yang sama. Penelitian ini menggunakan data sekunder, Teknik analisis mernggunakan analisis kuantitatif dengan mengacu pada indicator pembangunan/pertumbuhan inklusif, Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan harga konstan tahun 2010 termasuk tambang mengalami kontraksi pada tahun 2017, 2018 dan 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,95 persen. Indeks Pembangunan inklusif provinsi Nusa Tenggara Barat pada priode 2013-2020 berada pada katagori “memuaskan” dengan rata-rata sebesar 5,36. Indeks Pertumbuhan Inklusif (Subpilar 1) berada dalam katagori memuaskan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama tahun 2013-2020 rata-rata sebesar 66,17 berada dalam katagori “Sedang” ( $60 \leq IPM < 70$ ). Usia harapan hidup penduduk tahun 2013 -2020 rata-rata sebesar 65,58 tahun. Harapan Lama Sekolah (HLS) rata-rata sebesar 13,20 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk adalah 6,90 tahun dan Pengeluaran perkapita penduduk rata-rata sebesar Rp 9.738.000,-.

Penelitian oleh Yuniar Sri Hartati dengan judul Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Terdapat dua metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis model Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR) dan analisis regresi linier berganda dengan data time series. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada satu dekade terakhir pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia belum konsisten tercapai setiap tahun. Hasil analisis regresi data time series menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki

pengaruh yang berbanding terbalik terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

Penelitian oleh Silvi Dewi Purwanti<sup>1</sup>), Farida Rahmawati<sup>2\*</sup>) dengan judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, dimana data yang diperoleh bersumber dari Publikasi Online dari World Bank, Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian Keuangan. Metode yang digunakan adalah Analisis deskriptif yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis kondisi pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Analisis data menggunakan excel, Pengukuran pertumbuhan ekonomi inklusif dengan konsep PEGR meliputi tiga dimensi pengukuran. Dan Metode analisis yang digunakan didalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan jenis penelitian yang menggunakan deret waktu dan dengan lokasi penelitian di satu tempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada satu dekade terakhir pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia belum konsisten tercapai setiap tahun. Hasil analisis regresi data time series menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh yang berbanding terbalik terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

### Kerangka Pikir



**Gambar 1**

*Sumber Kajian diolah Penulis*

## 2. METODE PENELITIAN

### Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya. Data – data tersebut adalah Data Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Tingkat pengangguran Terbuka dan Gini Rasio, PDRB ADHK di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, dengan alamat resmi <https://sulut.bps.go.id>

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Sumber data penelitian adalah data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yaitu diperoleh dan dicatat dari pihak lain.

### Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

1. Pertumbuhan ekonomi (Y) adalah menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa yang ditandai dengan PDRB ADHK Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu, diukur dalam persen.
2. Kemiskinan (X<sub>1</sub>) adalah tingkat kemiskinan (P<sub>0</sub>) yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu diukur dalam persen.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X<sub>2</sub>) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu, dengan satuan persen.
4. Indeks Gini atau Rasio Gini (X<sub>3</sub>) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan di Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu, diukur dalam satuan index.

### Metode Analisis

Untuk mengukur pertumbuhan inklusif menggunakan Inklusif Growth Index (IGI).

1. Pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan adalah

$$IG_p = (G_p/G_p) \hat{G}_g$$

Dimana :

IG<sub>p</sub> : koefisien pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan

G<sub>p</sub> : elastisitas kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata

G<sub>pg</sub> : elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi

$\hat{G}_g$  : pertumbuhan ekonomi

I<sub>Gp</sub> menyatakan inklusifitas pertumbuhan dalam menurunkan kemiskinan, sehingga pertumbuhan dinyatakan inklusif apabila nilai I<sub>Gp</sub> >  $\hat{G}_g$ .

2. Pertumbuhan inklusif dalam menurunkan pengangguran adalah

$$I_{Gp} = (G_{pg}/G_p) \hat{G}_g$$

Dimana :

I<sub>Gp</sub> : koefisien pertumbuhan inklusif dalam menurunkan pengangguran

G<sub>p</sub> : elastisitas pengangguran terhadap pendapatan rata-rata

G<sub>pg</sub> : elastisitas pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi

$\hat{G}_g$  : pertumbuhan ekonomi

I<sub>Gp</sub> menyatakan inklusifitas pertumbuhan dalam menurunkan pengangguran, sehingga pertumbuhan dinyatakan inklusif apabila nilai I<sub>Gp</sub> >  $\hat{G}_g$ .

3. Pertumbuhan inklusif dalam menurunkan ketimpangan adalah

$$I_{Gp} = (G_{pg}/G_p)G_g$$

Dimana :

I<sub>Gp</sub> : koefisien pertumbuhan inklusif dalam menurunkan ketimpangan

G<sub>p</sub> : elastisitas ketimpangan terhadap pendapatan rata-rata

G<sub>pg</sub> : elastisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi

$\hat{G}_g$  : pertumbuhan ekonomi

I<sub>Gp</sub> menyatakan inklusifitas pertumbuhan dalam menurunkan ketimpangan, sehingga pertumbuhan dinyatakan inklusif apabila nilai I<sub>Gp</sub> >  $\hat{G}_g$ .

4. Jika I<sub>Gp</sub> <  $\hat{G}_g$  berarti pertumbuhan ekonomi tidak bersifat inklusif.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Perhitungan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow

No	TAHUN	IGp	Gg	Ket
1	2016	10,89	6,56	inklusif
2	2017	1,76	6,67	Non inklusif
3	2018	11,77	7,49	inklusif
4	2019	5,47	7,89	Non inklusif
5	2020	-711,11	0,98	Non inklusif
6	2021	77,58	3,87	inklusif
<b>Rata - rata</b>		<b>-100,61</b>	<b>5,58</b>	<b>Non inklusif</b>

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, pada Tahun 2016, 2018 dan 2021 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow sudah Inklusif, dimana pada tahun – tahun tersebut terdapat beberapa program pemerintah pusat yang menopang program percepatan penanggulangan kemiskinan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin sampai 40%. Saat ini bantuan dari pemerintah pusat untuk bantuan iuran sesuai SK Menteri Sosial Nomor 170 Tahun 2015 yaitu Program PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan PKH (Program Keluarga Harapan). Program berbasis keluarga yang diberikan kepada keluarga pra sejahtera untuk PBI dan keluarga sangat miskin untuk PKH. tapi pada tahun 2017, 2019 dan 2020 masih belum inklusif. Jadi kemiskinan tetap menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

#### Hasil Perhitungan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Kemiskinan Kota Kotamobagu

No	TAHUN	IGp	Gg	Ket
1	2016	1,77	6,63	Non inklusif
2	2017	2,52	6,79	Non inklusif
3	2018	-2,08	6,66	Non inklusif
4	2019	-9,17	6,13	Non inklusif
5	2020	-2941,93	0,20	Non inklusif
6	2021	99,22	4,20	Inklusif
<b>Rata – rata</b>		<b>-474,95</b>	<b>5,10</b>	<b>Non inklusif</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada beberapa periode penelitian, nilai koefisien pertumbuhan inklusif di kotamobagu tidak pernah konsisten mencapai pertumbuhan yang inklusif,

pada tahun 2016-2020 kondisi pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan masih belum inklusif, berbeda dengan tahun 2021 kondisi pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu sejalan dengan teori.

Namun dalam 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu belum bersifat inklusif atau peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mendorong penurunan kemiskinan secara signifikan. Masih pentingnya perencanaan pembangunan daerah Kota Kotamobagu kearah pertumbuhan ekonomi inklusif atau dengan kata lain pertumbuhan Ekonomi ke arah *Pro-Poor*. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kota Kotamobagu khususnya dalam mengurangi kemiskinan.

#### **Hasil Perhitungan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Pengangguran di Bolaang Mongondow**

No	TAHUN	IGp	Gg	Ket
1	2016	10,77	6,56	Inklusif
2	2017	1,73	6,67	Non inklusif
3	2018	13,13	7,49	Inklusif
4	2019	6,92	7,89	Non inklusif
5	2020	-3428,12	0,98	Non inklusif
6	2021	71,69	3,87	inklusif
<b>Rata - rata</b>		<b>-553,98</b>	<b>5,58</b>	<b>Non inklusif</b>

Sebagaimana yang terjadi, sepanjang periode pengamatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu menjalankan perannya untuk menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Bolaang Mongondow. Tapi pada tahun 2016, tahun 2018 dan tahun 2021 sudah mencapai pertumbuhan yang inklusif.

Namun dalam 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow belum bersifat inklusif atau peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mendorong penurunan pengangguran secara signifikan. Masih pentingnya perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow kearah pertumbuhan ekonomi inklusif atau dengan kata lain pertumbuhan Ekonomi ke arah *Pro-Unemployment*. Dalam konteks perencanaan terintegrasi masuk dalam Perencanaan Pembangunan Dimensi Pembangunan Manusia, menopang sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

### Hasil Perhitungan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Pengangguran di Kota Kotamobagu

No	TAHUN	IGp	Gg	Ket
1	2016	1,77	6,63	Non inklusif
2	2017	2,52	6,79	Non inklusif
3	2018	-2,08	6,66	Non inklusif
4	2019	-9,17	6,13	Non inklusif
5	2020	-2941,93	0,20	Non inklusif
6	2021	99,22	4,20	Inklusif
<b>Rata - rata</b>		<b>-474,95</b>	<b>5,10</b>	<b>Non inklusif</b>

Sepanjang periode pengamatan, Kota Kotamobagu yang pertumbuhannya inklusif dalam menurunkan pengangguran hanya terjadi di tahun 2021. Dengan kondisi demikian pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu dapat dikatakan belum inklusif dalam menurunkan pengangguran. Peran pemerintah daerah di masa yang akan datang masih tetap *pro-unemployment* sebagai prioritas pembangunan daerah baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah. Terutama Kota Kotamobagu yang menjadi barometer pembangunan manusia di Kawasan Bolaang Mongondow Raya (BMR). Pertumbuhan inklusif masih menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Kotamobagu.

### Hasil Perhitungan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan *Gini Ratio* di Bolaang Mongondow

No	TAHUN	IGp	Gg	Ket
1	2016	10,89	6,56	Inklusif
2	2017	1,76	6,67	Non inklusif
3	2018	11,77	7,49	Inklusif
4	2019	5,47	7,89	Non inklusif
5	2020	-711,11	0,98	Non inklusif
6	2021	77,58	3,87	inklusif
<b>Rata - rata</b>		<b>-100,61</b>	<b>5,58</b>	<b>Non inklusif</b>

Selang enam tahun terakhir di Kabupaten Bolaang Mongondow masih terdapat pertumbuhan yang tidak bersifat inklusif terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat. Tapi pada tahun 2016,

tahun 2018 dan tahun 2021 nilai indeks pertumbuhan inklusif sudah menuju kearah *pro-inequality*.

Namun secara rata-rata dalam 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow belum bersifat inklusif atau peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mendorong penurunan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat secara signifikan. Masih pentingnya perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow kearah pertumbuhan ekonomi inklusif atau dengan kata lain konteks perencanaan terintegrasi masuk dalam Perencanaan Pembangunan Dimensi Pembangunan Manusia, menopang sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

**Hasil Perhitungan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Tingkat ketimpangan  
di Kota Kotamobagu**

No	TAHUN	IGp	Gg	Ket
1	2016	1,77	6,63	Non inklusif
2	2017	0,00	6,79	Non inklusif
3	2018	-2,08	6,66	Non inklusif
4	2019	-9,17	6,13	Non inklusif
5	2020	-2941,93	0,2	Non inklusif
6	2021	99,22	4,2	Inklusif
<b>Rata - rata</b>		<b>-475,37</b>	<b>5,10</b>	<b>Non inklusif</b>

Sepanjang periode pengamatan, Kota Kotamobagu yang pertumbuhannya inklusif dalam menurunkan angka ketimpangan pendapatan/rasio gini hanya terjadi di tahun 2021. Dengan kondisi demikian pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu dapat dikatakan belum inklusif dalam menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Peran pemerintah daerah di masa yang akan datang masih tetap harus *pro-inequality* sebagai prioritas pembangunan daerah baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah. Terutama Kota Kotamobagu yang menjadi barometer pembangunan manusia di Kawasan BMR. Pertumbuhan inklusif masih menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Kotamobagu.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

1. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu pada tahun 2015-2021 belum bersifat inklusif dalam menurunkan kemiskinan, ini di tandai masih adanya pertumbuhan yang bersifat non Inklusif terhadap kemiskinan.
2. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu pada tahun 2015-2021 belum bersifat inklusif dalam menurunkan pengangguran, ini di tandai masih adanya pertumbuhan yang bersifat non Inklusif terhadap pengangguran.
3. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu pada tahun 2015-2021 belum bersifat inklusif dalam menurunkan ketimpangan, ini di tandai masih adanya pertumbuhan yang bersifat non Inklusif terhadap ketimpangan.
4. Pertumbuhan Ekonomi inklusif masih menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu menopang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing

##### Saran

Dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu cenderung berjalan dengan tidak Inklusif, maka hendaklah pemerintah daerah agar lebih fokus terhadap pemerataan hasil - hasil pembangunan dan distribusi manfaat dari pertumbuhan tersebut, tidak dengan sekedar mengejar pencapaian pertumbuhan setinggi-tingginya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat program-program pembangunan yang langsung ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah pertumbuhan yaitu kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I. And J. Zhuang. 2007. Inklusif Growth toward a Prosperous Asia: Policy Implications. ERD Working Paper Series, No. 97.
- Ali, Ifzal dan Hyun Hwa Son. 2007. Measuring Inclusive Growth. Asian Development Review Vol. 24, No. 1, pp. 11–31. Manila: ADB.

Azis, Iwan. J. 1994. Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.

Adisasmita Rahardjo, 2013, Teori-teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Arsyad Lincoln, 1999, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE, Yogyakarta.

Amalina S, Hutagaol MP, Asmara A, 2013, Pertumbuhan Inklusif : Fenomena Pertumbuhan Inklusif di Kawasan Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol. 2 Nomor 2. Hlm 85-112.

Prasetyantoko, A., Budiantoro, S., & Bahagijo, S. 2012. Pembangunan inklusif: prospek dan tantangan Indonesia. Jakarta: LP3ES : Prakarsa.

McKinley, Terry. 2010. Inklusif Growth Criteria and Indicators: an Inklusif Growth Index for Diagnosis of Country Progress. ADB Sustainable Development Working Paper Series, No. 14. Manila: Asian Development Bank

Todaro, Michael P. 2011, Pembangunan Ekonomi. Jakarta. Erlangga.

**PENENTU AUDIT DELAY PADA SUB SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DI BEI  
PERIODE 2019-2021**

***H. D. Yudixon H. Sinurat<sup>1)</sup>; Mila Susanti<sup>2)</sup>***

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Advent Indonesia

Email: [1932111@unai.edu](mailto:1932111@unai.edu)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mencari dampak rotasi auditor dan kualitas auditor terhadap audit delay. Perusahaan yang diteliti merupakan sektor perdagangan besar yang terdaftar di BEI periode 2019 hingga 2021. Penelitian memanfaatkan data kuantitatif yang didapat dari laporan rutin aktivitas sepanjang tahun yang dapat diakses melalui situs perusahaan. Analisis data statistik menggunakan analisis deskriptif yang membahas tentang nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Analisis data statistik membahas analisis koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji signifikansi t dan F, serta regresi. Hasil olahan data analisis menunjukkan bahwa rotasi auditor tidak berimbas pada audit delay secara parsial. Kualitas auditor berimbas pada audit delay secara parsial. Hasil signifikansi pada rotasi auditor dan kualitas auditor secara simultan berimbas pada audit delay.*

**Kata kunci:** rotasi auditor, kualitas auditor, audit delay

**ABSTRACT**

*The purpose of this study determined and test the impact of auditor rotation and auditor quality on audit delay. The research was conducted on a large trading sector listed on the IDX for the period 2019 to 2021. The research used quantitative data obtained from official reports on activity throughout the year that can be accessed through the company's website. Statistical data analysis uses descriptive analysis that discusses the minimum, maximum, average and standard deviation values. Statistical data analysis discusses the analysis of correlation coefficients, coefficients of determination, t and F significance tests, and regression. The results showed that auditor rotation did not have an impact on partial audit delay. The quality of auditors affects the partial audit delay. The results of significance in auditor rotation and auditor quality simultaneously have a significant impact on audit delay.*

**Keywords:** auditor rotation, auditor quality, audit delay

**1. PENDAHULUAN**

Laporan keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan beberapa pihak untuk menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Bagi investor, laporan keuangan digunakan untuk mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham perusahaan. Bagi kreditur, informasi dari laporan keuangan membantu mengambil keputusan untuk pengucuran dana bagi perusahaan. Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan berguna untuk melihat perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun, sehingga mampu membentuk strategi bisnis yang lebih baik. Pagi pengelola perusahaan, laporan keuangan menjadi bentuk pertanggung-jawaban kinerjanya sepanjang tahun yang dikelolanya. Tidak luput juga bagi konsumen, laporan keuangan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas produk yang digunakannya (Ibnu, 2020).

Laporan keuangan menjadi instrumen penting dalam memperoleh informasi terbaru tentang kondisi perusahaan. Namun sayangnya, sebelum dipublikasikan setiap laporan keuangan

harus diperiksa terlebih dahulu oleh auditor yang independen. Hasil pemeriksaan ini digunakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan sudah dihasilkan dari pencatatan yang benar-benar cermat dan sesuai dengan peraturan pembukuan yang berlaku. Auditor independen dalam melakukan proses pemeriksaan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Auditor independen membutuhkan waktu beberapa saat untuk melakukan pemeriksaan sehingga akhirnya dapat memberikan opininya. Opini audit ini menjadi hasil penilaian auditor atas laporan keuangan yang dibuat klien. Waktu pemeriksaan inilah yang menyebabkan adanya *delay* dalam menyampaikan laporan keuangan ke publik (BLH, 2019).

*Audit delay* kadang terjadi karena auditor independen terlalu banyak menerima klien. Namun, tidak sedikit kasus yang terjadi *audit delay* juga bersumber dari klien yang kurang kooperatif. Proses *restatement* yang terlalu lambat dari klien berdasarkan rekomendasi auditor atas temuan salah saji yang material. Proses *restatement* dimana harus menyertakan bukti-bukti yang kadang membutuhkan tambahan waktu bagi klien untuk menyerahkan kembali ke auditor (BLH, 2019).

*Audit delay* mengakibatkan informasi keuangan menjadi terlambat diterima oleh pengguna. Informasi keuangan yang awalnya diharapkan memiliki *value* yang tinggi untuk pengambilan keputusan menjadi tidak relevan lagi. Laporan keuangan tidak dapat tersaji dengan cepat pada saat dibutuhkan karena harus melalui proses tertentu yang membutuhkan waktu. Yang akhirnya, informasi penting tentang keuangan menjadi tidak memiliki makna lagi untuk dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang tepat (Pratiwi, 2020).

Kebutuhan penting dari informasi keuangan ini menyebabkan BEI memberikan sanksi kepada 91 emiten yang belum memberikan laporan keuangan tahun 2021. Seyogyanya, laporan keuangan audit yang diterima pada akhir bulan ketiga. Telah diberikan perpanjangan batas waktu penyampaian hingga tanggal 9 Mei 2022, dan temuan menyatakan 668 emiten yang telah menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu. Sisanya sebanyak 91 emiten belum menyampaikan secara tepat waktu, sehingga BEI telah melayangkan peringatan tertulis (Purwanti, 2022).

Rotasi auditor menjadi salah satu hal yang menyebabkan adanya *audit delay*. Terjadinya perubahan auditor dari tahun berjalan dengan tahun sebelumnya menjadi salah satu syarat agar auditor memiliki sifat yang independen. Namun, perubahan auditor yang baru ini memiliki dampak buruk dengan dibutuhkannya proses pemahaman yang lebih lama pada laporan keuangan klien bila dibandingkan dengan auditor lama. Proses pemahaman ini berefek pada proses pemeriksaan yang memerlukan waktu yang lebih panjang (Ruchana & Khikmah, 2020). Hasil penelitian sebelumnya yang memaparkan hasil yang sama juga memaparkan bahwa pergantian auditor menyebabkan auditor baru masih asing dengan karakteristik laporan keuangan kliennya dan memerlukan waktu untuk mempelajari terlebih dahulu, sehingga *audit delay* semakin panjang (Ratnaningsih & Dwirandra, 2016).

Kualitas auditor menjadi faktor yang menentukan kecepatan dalam menyampaikan laporan keuangan audit. Auditor yang memiliki kualitas dapat diukur dari seberapa banyak kasus yang sudah ditangani. Makin banyak penanganan kasus akan membuat auditor lebih mahir dalam proses audit sehingga meminimalisasi kesalahan proses audit. Auditor yang lebih mahir membuat *audit delay* semakin pendek. Pada umumnya, auditor yang diyakini memiliki pengalaman kasus yang lebih kompleks adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang beraliansi dengan *Big Four* (Chotamah & Ngumar, 2018). Hasil yang sama juga diungkapkan oleh Apriliani & Martini (2018) bahwa KAP yang terafiliasi dengan *Big Four* harus siap memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan sehingga mampu menawarkan kualitas dan standar yang dapat diandalkan hasilnya. Banyaknya jumlah tim auditor yang tergabung dalam KAP membuat proses audit lebih cepat selesai. KAP mampu mengelola proses laporan keuangan audit perusahaan lebih tepat guna dan tepat waktu, sehingga mampu menyelesaikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Penelitian ini lebih dalam ingin membahas pada sektor perdagangan besar yang terdaftar di BEI. Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan sektor ini bertumbuh 4,65% di tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya. Sektor perdagangan besar kendaraan bermotor dan reparasinya senilai Rp407,88 Triliun, sedangkan yang bukan mobil dan sepeda motor sebesar Rp1,79 kuadriliun. Pertumbuhan PDB nasional yang hanya 3,69% akhirnya terlampaui dengan pertumbuhan sektor ini. Di tahun sebelumnya sektor ini mengalami kontraksi sebesar 14,11%, namun di tahun 2021 justru memberikan kontribusi sebesar 12,97% terhadap PDB nasional yang merupakan kontributor terbesar ketiga setelah sektor industri pengolahan (19,25%) dan sektor pertanian (13,28%) (Kusnadar, 2022).

Oleh sebab itu, tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji dampak rotasi auditor dan kualitas auditor pada *audit delay* sektor perdagangan besar yang tercatat di BEI 2019 hingga 2021.

## KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

### Teori Signal

Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pihak manajemen menjadi suatu tanda bagi pengguna tentang kondisi perusahaan. Laporan keuangan yang memiliki kinerja yang baik menandakan perusahaan memiliki kualitas yang baik. Informasi keuangan yang disampaikan akan direspon sebagai tanda *good news* atau *bad news* dan berpengaruh pada harga saham sebagai bentuk respon dari investor. Munculnya tendensi bahwa informasi keuangan yang disampaikan lebih lama dari waktu yang ditentukan merupakan laporan keuangan yang muncul dari perusahaan yang mengalami masalah dalam keuangannya (Santoso, 2011).

### Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Seseorang patuh kepada peraturan atau hukum dikarenakan adanya nilai yang diyakini dan sesuai dengan nilai yang ada di dalam dirinya. Seseorang memiliki komitmen untuk patuh kepada hukum karena memang itu adalah keharusan dan menjadi kewajiban moralnya (*normative commitment through morality*). Seseorang dapat patuh kepada hukum atau peraturan karena penyusun peraturan memiliki kuasa agar setiap orang mematuhiinya (*normative commitment through legitimacy*).

Kepatuhan penyerahan laporan keuangan auditan diatur dalam UU no. 8 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan OJK RI No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik pasal 4 yang menyatakan bahwa laporan tahunan wajib diserahkan kepada OJK dan dipublikasikan kepada masyarakat jangan sampai memasuki bulan ke empat setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Peraturan ini menandakan bahwa semua emiten diminta patuh dalam menyampaikan laporan keuangan auditan, sejalan dengan *normative commitment through legitimacy*.

### Teori Agensi

Teori agensi dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan munculnya kebutuhan tentang adanya pihak luar yang bersifat independen yaitu auditor untuk menilai ketepatan dan keakuratan laporan rutin yang dibuat manajemen perusahaan (*agen*). Pemilik perusahaan (*principal*) meminta auditor untuk melakukan pemeriksaan atas pengendalian sumber daya yang dimilikinya yang telah dipercayakan ke manajemen perusahaan (*agen*). Peran auditor mendorong manajemen perusahaan untuk membuat laporan keuangan lebih berhati-hati, teliti, tepat dan akurat. Keterlibatan auditor independen diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan auditan lebih cepat dan lebih berkualitas.

### Audit Delay

*Audit delay* adalah waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian proses audit dari akhir tahun fiskal keuangan perusahaan (Ratnaningsih & Dwirandra, 2016). Menurut Verawati & Wirakusuma (2016) *audit delay* adalah jumlah hari yang dibutuhkan auditor untuk memeriksa pembukuan, sejak tutup buku hingga penerbitan laporan keuangan auditan.

*Audit delay* merupakan masalah yang signifikan karena dapat mempengaruhi nilai laporan keuangan. Penundaan audit yang berkepanjangan berdampak negatif pada nilai laporan keuangan juga memberikan pandangan ketidak-pastian untuk para pengguna laporan keuangan (Made et al., 2015) Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dan mengumumkan ke pasar diharapkan dapat bertindak sebagai sinyal dan memberikan informasi yang mempengaruhi nilai laporan keuangan.

## Rotasi Audit

Rotasi audit merupakan pergantian pemeriksa laporan keuangan yaitu akuntan publik kepada akuntan publik lain agar terjaga independensi sebuah laporan. Menurut Tambunan (2014), perputaran auditor sebagai perubahan auditor antara tahun ini dan tahun sebelumnya. Perubahan auditor terjadi ketika hubungan klien dan auditor berakhir (Ratnaningsih & Dwirandra, 2016).

Perubahan dilakukan kepada auditor agar memperoleh pendapat yang sesuai dengan kemauan manajemen untuk menjadi bahan pertimbangan dalam RUPS. Pergantian auditor membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan proses pengauditannya untuk memahami karakteristik dari sebuah perusahaan dan juga untuk mengetahui sistem yang ada dalam perusahaan klien tersebut (Praptika & Rasmini, 2016).

## Kualitas Auditor

Kualitas audit adalah kecakapan auditor mendapati dan menyajikan kekeliruan sistem akuntansi klien. Seorang auditor yang berkualitas harus memenuhi syarat standar profesi akuntan publik (SPAP). Kualitas auditor yang independen meningkatkan reputasi serta mendapatkan kepercayaan dari perusahaan klien (Permatasari & Astuti, 2019).

Auditor yang berkualitas dapat memperpendek jangka waktu audit laporan keuangan. Beberapa standar ketentuan auditor yang berkualitas adalah memiliki keahlian dalam mengaudit dan berpengalaman sebagai auditor. Kedua memiliki sikap independen tidak memihak kepada siapapun. Ketiga bekerja seperti akuntan yang professional, cermat dan seksama.

## Pengaruh Rotasi Auditor Terhadap *Audit Delay*

Ketika auditor berganti, auditor baru memiliki pengetahuan yang masih kurang spesifik tentang bisnis klien dibandingkan auditor sebelumnya. Auditor baru dituntut menyelami proses dan karakter bisnis kliennya dan perlu menggali keterangan dari auditor terdahulu. Proses ini mengakibatkan auditor baru menggunakan jangka waktu lebih lama dalam proses audit (Praptika & Rasmini, 2016).

H1: Rotasi audit berpengaruh terhadap *audit delay*.

## Kualitas Auditor dan *Audit Delay*

Kualitas auditor adalah cara dimana seorang auditor memberikan kemampuannya memeriksa laporan keuangan. Jika terjadi sebuah pelanggaran atau masalah pada laporan klien maka akan direkomendasikan di dalam laporan pengauditan.

Untuk mendapatkan hasil pengauditan yang lebih cepat dan efisien lebih diprioritaskan menggunakan KAP yang terafiliasi dengan *Big Four*. Mereka memiliki tenaga yang lebih banyak dan kompeten dalam proses audit. Hal ini mendukung angapan bahwa perusahaan yang

diaudit oleh KAP yang terafiliasi *Big Four* cenderung menyelesaikan audit lebih cepat daripada non KAP *Big Four* (Chotamah & Ngumar, 2018).

H2: Kualitas auditor berpengaruh terhadap *audit delay*

### **Pengaruh rotasi audit dan kualitas auditor terhadap *audit delay***

Hubungan antara rotasi audit dan kualitas auditor terhadap *audit delay* berpengaruh dalam menyelesaikan laporan keuangan. Jika terjadi rotasi audit di perusahaan dapat memungkinkan *audit delay* yang panjang dan auditor memerlukan waktu untuk menyesuaikan dirinya untuk memahami bisnis kliennya. Kualitas auditor yang baik memberikan laporan yang baik juga dan mencegah adanya *audit delay*, jika kualitas auditor buruk akan membuat *audit delay* lebih panjang (Apriliani & Martini, 2018; Permatasari & Astuti, 2019).

H3: Rotasi audit dan kualitas auditor berpengaruh terhadap *audit delay*

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Data kuantitatif merupakan data angka yang dianalisis melalui hubungan sebab akibat dari variabel bebas dengan variabel terikat (Sugiyono, 2015).

Riset ini menggunakan populasi yang diambil data laporan resmi subsektor perdagangan besar yang tercatat di BEI tahun 2019-2021 yang berjumlah 49 perusahaan. Teknik penetapan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut: 1) Perusahaan subsektor perdagangan besar berturut-turut tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. 2) Menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit. 3) Memiliki kelengkapan data terkait variabel yang dibutuhkan dalam penelitian. 4) Mengalami laba selama periode penelitian. Dari kriteria tersebut terpilih 34 perusahaan yang memenuhi kriteria, sehingga data sampel berjumlah 102 data.

Dalam penelitian ini rotasi audit menggunakan variable *dummy* dengan perumusan, perusahaan mengganti auditor maka mendapatkan nilai 1 dan jika perusahaan tidak mengganti auditornya mendapat nilai 0. Studi ini mengukur kualitas auditor dengan mengkategorikan audit yang dilakukan oleh KAP terafiliasi *Big Four* dan bukan KAP *Big Four*. Dalam penelitian ini, kualitas auditor menggunakan variabel *dummy*. Mendapat nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four*, sebaliknya mendapat nilai 0. Pengukuran *audit delay* menggunakan skala rasio.

Analisis data statistik menggunakan analisis deskriptif yang membahas tentang nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Analisis data statistik membahas analisis koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji signifikansi t dan F, serta regresi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Auditor baru membutuhkan waktu untuk memahami karakteristik bisnis kliennya yang baru, sehingga pergantian auditor akan memperlambat *audit delay*. Kualitas auditor yang terafiliasi dengan *Big Four* lebih memiliki kompetensi yang tinggi dalam melakukan proses audit, sehingga membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk melakukan proses audit. Berikut ini, penulis akan membahas satu persatu temuan data yang telah diperoleh dengan menggunakan aplikasi statistik.

#### Statistik Deskriptif

Tabel 1 menggambarkan kondisi subsektor perdagangan besar yang tercatat di BEI berdasarkan rotasi auditor, kualitas auditor dan *audit delay*. Hasil pengumpulan data mengindikasikan bahwa sebanyak 18 perusahaan melakukan rotasi auditor sebanyak satu kali sepanjang pengamatan. Terdapat 15 perusahaan yang melakukan rotasi auditor sebanyak dua kali dan sebuah perusahaan melakukan rotasi auditor sebanyak tiga kali sepanjang pengamatan. Rata-rata 50% atau 51 perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan besar melakukan rotasi audit, dengan standar deviasi yang cukup besar variasinya yaitu 0,5025.

Kualitas auditor diproyeksikan dengan perusahaan yang memanfaatkan KAP dan terafiliasi dengan *Big Four*. Hasil pengamatan ditemukan bahwa dari 34 perusahaan yang diteliti, terdapat 10 perusahaan yang menggunakan KAP yang terafiliasi dengan *Big Four*, sedangkan sisanya sebanyak 24 perusahaan menggunakan KAP yang tidak terafiliasi dengan *Big Four*. Oleh sebab itu didapatkan 30 data statistik perusahaan (rata-rata 0,2941) yang menggunakan KAP yang terafiliasi dengan *Big Four* dan sisanya 72 data statistik tidak terafiliasi dengan *Big Four*. Simpangan baku kualitas auditor terlihat cukup besar simpangannya yaitu sebesar 0,4579.

**Table 1. Hasil Statistik Deskriptif**

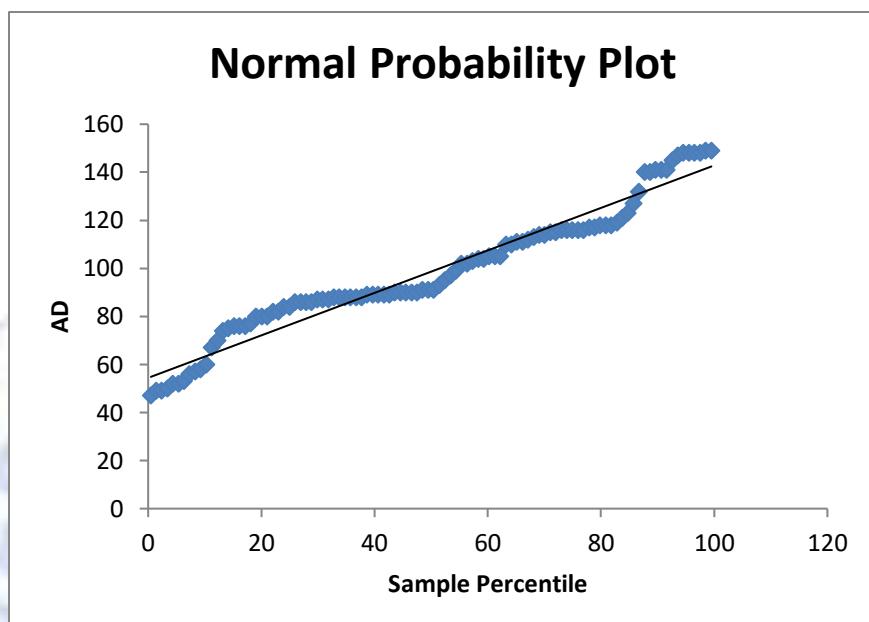
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Rotasi Auditor	102	0	1	0,5	0,502469151
Kualitas Auditor	102	0	1	0,294118	0,457895212
<i>Audit Delay</i>	102	47	149	98,63725	26,30957707
Valid N (listwise)	102				

Sumber: Diolah oleh penulis, 2022.

Hasil olahan data statistik di tabel 1 menunjukkan penerbitan laporan keuangan auditan paling cepat selama 47 hari, sedangkan terlama adalah 149 hari. Rata-rata penerbitan laporan keuangan auditan sektor perdagangan besar yang terdaftar di BEI adalah 98,64 atau 99 hari, dengan variasi simpangan sekitar 26,31 hari.

### Uji Normalitas Data

Normalitas data digunakan untuk mengetahui kelayakan data untuk dilakukan proses regresi. Data yang baik adalah yang bersifat normal atau mendekati normal. Normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan grafik P-Plot yang dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



**Gambar 1.** Normalitas P-Plot

Sebaran titik data di gambar menunjukkan berada di sekitar garis diagonal. Gambar sebaran titik tidak ada yang memiliki jarak yang terlalu jauh dengan garis diagonal. Dengan demikian, data penelitian dinyatakan normal.

### Koefisien Korelasi dan Determinasi

Tabel 2 menunjukkan angka koefisien korelasi R sebesar 0,247903 yang dapat diinterpretasikan bahwa rotasi auditor dan kualitas auditor memiliki hubungan yang lemah dengan *audit delay*. Koefisien korelasi sebesar 0,247903 berada di interval 2,00 – 3,99 yang memiliki hubungan yang rendah. Korelasi dengan nilai positif memberikan arti bahwa adanya hubungan searah atau kenaikan variabel rotasi auditor dan kualitas auditor akan mengakibatkan kenaikan nilai *audit delay*.

**Tabel 2. Koefisien Korelasi dan Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of the Estimated
1	0,247903	0,061456	0,042495179	25,74449348

a. Predictor: (constant), Rotasi Auditor, Kualitas Auditor

b. Dependent Variable: *Audit Delay*

Angka koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,061456 menunjukkan bahwa variabel rotasi auditor dan kualitas auditor mempengaruhi audit delay sebesar 6,15% sedangkan sisanya sebesar 93,85% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Penambahan satu variabel lain akan memperpanjang waktu audit delay sebesar 0,04249 atau 4% (adjusted r square).

### Uji t

Uji t menjadi satu alat yang digunakan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial. Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari rotasi auditor adalah sebesar  $0,29061 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha1 ditolak atau rotasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Nilai t hitung menunjukkan nilai positif, sehingga memiliki hubungan yang searah. Bila terjadi rotasi auditor maka akan mengakibatkan makin lama masa untuk mepublikasikan laporan keuangan auditan. Hasil riset ini tidak sejalan dengan penelitian Praptika & Rasmini (2016) yang membuatkan bahwa rotasi auditor berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

**Tabel 3. Regresi Linear**

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	Constant	99,57503	4,061916	24,5143	0,00000
	Rotasi Auditor	5,436787	5,117157	1,032462	0,29061
	Kualitas Auditor	-12,431	5,615288	-2,21377	0,02914

a. Dependent Variable: *Audit Delay*

Nilai signifikansi dari variabel kualitas auditor adalah  $0,02914 < 0,05$  sehingga hasil ini menerima Ha2 yaitu kualitas auditor berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Nilai t hitung menunjukkan nilai negatif memiliki makna bahwa kualitas auditor memiliki hubungan yang bertolak belakang dengan *audit delay*. Bila perusahaan menggunakan KAP yang berkualitas (terafiliasi dengan *Big Four*) akan mempercepat proses penerbitan laporan keuangan auditan, demikian juga berlaku sebaliknya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Apriliani & Martini (2018) dan Permatasari & Astuti (2019) yang menyatakan bahwa kualitas auditor berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Nilai *constant* sebesar 99,57503 mengartikan bila tidak terjadi rotasi auditor dan tidak menggunakan KAP yang tidak berafiliasi dengan *Big Four*, maka waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan laporan keuangan auditan adalah sekitar 100 hari.

### Uji F

Uji signifikansi secara simultan terlihat dari nilai signifikansi F sebesar  $0,04330242 < 0,05$  jadi diambil ringkasan bahwa  $H_a$  diterima, yaitu rotasi auditor dan kualitas auditor berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

**Table 4. Uji Signifikansi Simultan**

	Df	Sum of Square	Mean Square	F	Significance F
Regression	2	4296,463	2148,231	3,241249	0,04330242
Residual	99	65615,12	662,7789		
Total	101	69911,58			

Sumber : Diolah oleh SPSS, 2022.

### Analisis Pengaruh Rotasi Auditor dan Kualitas Auditor Terhadap Audit Delay

Berdasarkan hasil olahan data statistik dapat diambil kesimpulan bahwa sektor perdagangan besar yang tercatat di BEI pada waktu observasi yaitu tahun 2019-2021 melakukan rotasi audit sesuai peraturan yang ditetapkan sebagai perusahaan emiten. Sebagian besar perusahaan sektor perdagangan besar tidak memanfaatkan KAP yang beraliansi dengan *Big Four*. Pada umumnya masa yang dibutuhkan oleh auditor untuk memeriksa laporan keuangan adalah sekitar 99 hari. Dengan demikian, waktu ini melebihi waktu yang ditetapkan dalam Peraturan OJK RI No. 14/POJK.04/2022 yaitu pada akhir bulan ketiga laporan keuangan tahunan perusahaan.

Terlihat dari data menampilkan bahwa perusahaan perdagangan besar jumlahnya banyak melakukan rotasi auditor. Hanya ada satu perusahaan yang melakukan rotasi audit sekali sepanjang penelitian, sedangkan hampir seluruh perusahaan melakukan rotasi auditor sebanyak lebih dari sekali. Hal inilah menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan laporan keuangan tahunan semakin lama, sehingga melebihi waktu yang ditetapkan, karena auditor baru harus melakukan proses pengenalan karakteristik perusahaan terlebih dahulu.

Sektor perdagangan besar yang terdaftar di BEI periode 2019-2021 memberikan kesimpulan bahwa penggunaan KAP yang terafiliasi dengan *Big Four* membantu perusahaan dalam menerbitkan laporan keuangan audit lebih cepat. Terlihat dari rata-rata waktu yang digunakan untuk menerbitkan laporan keuangan audit membutuhkan waktu selama 99 hari, hal ini dikarenakan hanya 10 dari 24 perusahaan yang menggunakan KAP yang berafiliasi dengan *Big Four*.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Hasil kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian di sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021 adalah sebagai berikut:

1. Rotasi auditor berpengaruh tidak signifikan terhadap *audit delay* secara parsial
2. Kualitas auditor berpengaruh signifikan pada *audit delay* secara parsial
3. Rotasi auditor dan kualitas auditor berpengaruh signifikan pada *audit delay* secara simultan.

##### Saran

Untuk penelitian berikutnya yang memiliki judul yang sama, disarankan untuk memgunakan sektor yang berbeda yang masuk dalam daftar BEI untuk objek penelitian, dan sebaiknya menggunakan atau menambahkan variabel dan metode lain untuk mengukur *audit delay*, serta memperpanjang periode penelitian untuk menunjukkan bahwa hipotesis ini lebih akurat dan memiliki cakupan yang luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, Anastasia & Martini. 2018. Pengaruh Kualitas Auditor, Opini Audit, Pergantian Auditor dan Profitabilitas Terhadap *Audit Delay*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur. Akuntansi Responsibilitas Audit dan Tax, (S.1), Vol.1, No.1, Februari 2018. ISSN. 2252-6226. <https://jom.fe.budiluhur.ac.id/index.php/jma/article/view/170>
- BLH, 2019. Audit Delay dan Dampaknya Bagi Pengguna Laporan Keuangan. Artikel 9 September 2019. <https://accounting.binus.ac.id/2019/09/09/audit-delay-dan-dampaknya-bagi-pengguna-laporan-keuangan/>
- Chotamah, Nurul & Ngumar, Sutjipto. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kualitas Auditor Terhadap Hasil *Audit Delay*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 7, No.1. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/vieew/42>
- Ibnu, 2020. Pengertian Laporan Keuangan, Contoh, dan Fungsinya Untuk Bisnis Anda. Artikel 19 Februari 2020. <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-laporan-keuangan-contoh-dan-fungsinya/>
- Jensen, M. C. & Meckling, W. H. 1976. *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics 3 (1976), p. 305-360. North-Holland Publishing Company. Jensen & Meckling (1976) | PDF | Stocks | Economics (scribd.com)
- Kusnandar, V. B. 2022. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Tumbuh 4,65% pada 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/17/sektor-perdagangan-besar-dan-eceran-tumbuh-465-pada-2021>
- Praptika, P. Y. H. & Rasmini, N. K. 2016. Pengaruh Audit Tenure, Pergantian Auditor dan Financial Distress Pada Audit Delay Pada Perusahaan Consumer Goods. E-Jurnal Akuntansi, (S.1), Vol. 15, No. 3, p. 2052-2081, June 2016. ISSN 2302-8556. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/17786>
- Pratiwi, Lusiana. 2020. Keterlambatan Laporan Audit (Audit Delay): Sebuah Studi Literatur. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

[https://www.researchgate.net/publication/340755466\\_KETERLAMBATAN\\_LAPORAN\\_AUDIT\\_AUDIT\\_DELAY\\_SEBUAH\\_STUDI\\_LITERATUR](https://www.researchgate.net/publication/340755466_KETERLAMBATAN_LAPORAN_AUDIT_AUDIT_DELAY_SEBUAH_STUDI_LITERATUR)

Purwanti, Teti. 2022. BEI Beri Sanksi 91 Emiten Yang Belum Setor Lapkeu Tahun 2021. 13 Mei 2022. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220513084151-17-338687/bei-beri-sanksi-91-emiten-yang-belum-setor-lapkeu-tahun-2021>

Permatasari, I. & Astuti, C. D. 2019. Pengaruh Fee Audit, Rotasi Auditor, dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit. Jurnal Akuntansi Trisakti, Vol. 5, No. 1, Agustus 2019. DOI: <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4839> Corpus ID: 202364772

Ratnaningsih, N. M. D. & Dwirandra, A. A. N. B. 2016. Spesialisasi Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi Pengaruh Audit Tenure dan Pergantian Auditor Pada Audit Delay. E-Jurnal Akuntansi, (S.1), Vol.16, No. 1, p18-44, Juli 2016. ISSN 2302-8556. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/16074>

Ruchana, F. & Khikmah, S. N. 2020. Pengaruh Opini Audit, Pergantian Auditor, Profitabilitas dan Kompleksitas Laporan Keuangan Terhadap *Audit Delay*. Program Studi Akuntasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang. *The 3rd FEB Benefecium: Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, Magelang, 5 Agustus 2020. ISSN 2662-9404.

Santoso, F. K. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Perusahaan Sektor Keuangan. Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Vol. 1, No. 2.

Tambunan, P. U. 2014. Pengaruh Opini Audit, Pergantian Auditor, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Report Lag (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang.

Verawati, N. M. & Wirakusuma, M. G. 2016. Pengaruh Pergantian Auditor, Reputasi KAP, Opini Audit, dan Komite Audit dalam *Audit Delay*. E-Jurnal Akuntansi, (S.1), Vol. 17, No. 2, p. 1083-1111. November 2016. ISSN 2302-8556. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/19947>

Yantri, K. D. P., Merawati, L. K., dan Munidewi, I. A. B. 2020. Pengaruh Audit Tenure, Ukuran KAP, Pergantian Auditor, dan Opini Audit Terhadap Audit Delay. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma), Vol. 2, No. 1. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/762>

UU No. 8 1995 tentang Pasar Modal

Peraturan OJK RI No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik

**KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
**(Studi Pada Wajib Pajak di Desa Ambia, Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten**  
**Kepulauan Talaud)**

***Edward McFadden Fillipo Laluas<sup>1</sup>, Marthinus Ismail<sup>2</sup>***

*Program Studi Akuntansi,*

*Universitas Advent Indonesia, Bandung*

*Email: [1732137@unai.edu](mailto:1732137@unai.edu), [marthin\\_smile@unai.edu](mailto:marthin_smile@unai.edu)*

**ABSTRAK**

Penelitian bertujuan mengetahui adanya pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak (WP) terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Ambia, Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud. WP PBB yang berdomisili di Desa Ambia sebanyak 50 sampel WP. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan SPSS versi 25 sebagai alat analisis. persamaan regresi dengan nilai R Square didapat sebesar 87,5 %. Hasil uji-t diperoleh bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP dengan t hitung 2,080 dan signifikansi  $0,043 < 0,050$ . Pengetahuan perpajakan memiliki efek positif terhadap kepatuhan WP dengan t hitung sebesar 11,386 dan signifikan  $0,000 < 0,050$ . Hasil uji F = 164,473 dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan mempunyai efek positif terhadap kepatuhan WP di Desa Ambia.

**Kata kunci:** kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan.

**ABSTRACT**

*Purpose of this study was to determine the effect of tax knowledge and taxpayer awareness on the compliance of Land and Building Tax taxpayers in Ambia, South Essang District, Talaud Islands Regency. taxpayer awareness on the compliance Land and Building Tax domiciled in Ambia Village as many as 50 sample taxpayer awareness. The research instrument used a questionnaire and SPSS version 25 as an analytical tool. This obtained a linear regression equation with a value of R Square (R2) of 87.5%. The results of the partial t-test showed that tax knowledge had a positive and significant effect on taxpayer compliance with a t-count of 2.080 and a significance = 0.043 <0.050. Knowledge of taxation has a positive effect on taxpayer compliance with t count = 11.386 and significant 0.000 < 0.050. The results of the F test are 164.473 with significant value = 0.000 <0.05 which states that tax knowledge and taxpayer awareness simultaneously have a positive effect on taxpayer compliance in Ambia Village.*

**Keywords:** taxpayer awareness, taxpayer compliance, tax knowledge.

**1. PENDAHULUAN**

Sebagai warga masyarakat yang baik seharusnya kita mengerti akan peran pentingnya pajak dalam kehidupan berbangsa, pajak merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan kas negara. Pada zaman modern, sebagian dari kita telah menetapkan pajak menjadi sarana dalam menyokong pembangunan negara Indonesia. Pajak memiliki fungsi budgetair yang menjadi sumber penghasilan negara yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Mumu, Sondakh dan Suwetja, 2020)

Penerimaan pajak ialah pemasukan dana yang didapatkan dari wajib pajak pribadi atau badan yang dapat membantu kemajuan dan stabilitas suatu pemerintahan. Pajak menjadi penghasilan negara dan berasal dari rakyat yang adalah sumber terpenting dalam memberikan penghasilan pada negara. Pada dasar pengambilannya, di Indonesia terdiri menjadi 2 bagian, ialah pajak daerah dan pusat. Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan yang paling

berpotensi jadi pasokan negara. PBB memiliki pengaruh cukup besar karena hasil yang diberikan bagi pengembangan wilayah tersebut, (Gusar dan Nurazlina, 2019).

PBB merupakan pajak yang dibebankan pada seseorang maupun badan usaha yang mempunyai, menguasai dan mendapatkan manfaat bangunan. Sesuai wewenang, pajak kepada PBB ialah nilai jual suatu objek pajak. PBB ialah pajak yang dipungut di kelurahan/desa, seperti di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud yang merupakan lokasi penelitian, diperoleh data realisasi anggaran PBB dari 3 tahun ke belakang adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Realisasi dan target penerimaan PBB Desa Ambia

Tahun	REALISASI (RP)	TARGET PBB (RP)	RATA-TATA
2020	4.454.760	5.478.340	81 %
2021	4.571.194	5.497.800	83 %
2022	4.950.480	5.463.293	90 %

Sumber: Data PBB Desa Ambia

Tabel diatas menunjukkan hasil dari realisasi penerimaan PBB pada Desa Ambia yang belum optimal sepenuhnya. Ini seharusnya jadi perhatian pemerintah di kabupaten tersebut dikarenakan penerimaan PBB mempunyai pengaruh pada pendapatan asli daerah tersebut. Pemerintah Desa Ambia perlu lebih tegas dalam memaksimalkan penerimaan PBB. Sebab itu perlu adanya penelitian tentang faktor apa saja yang bisa berpengaruh bagi kepatuhan dari wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran individu dalam mendorong seseorang untuk melakukan kewajiban perpajakan sesuai aturan perundang-undanga. dalam penelitian ini dipilih 2 variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan ialah pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak dikarenakan dua variabel tersebut seringkali mendapat hasil penelitian berbeda.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan ialah suatu proses dari wajib pajak yang perlu memahami serta mengetahui peraturan juga tata cara perpajakan dengan melaksanakan kegiatan perpajakan seperti cara membayar pajak, cara melaporkan SPT dan sebagainya. Apabila seorang wajib pajak sudah paham mengenai perpajakan, maka dapat terjadi adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak Wijayanti (2015).

Hasil observasi Salmah (2018) dan juga Setyowati (2017), menerangkan kalau pengetahuan pajak mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan dalam membayar PBB. Pengetahuan dan kepatuhan masyarakat saat membayar PBB sejalan pada penelitian dari Ariastuti (2019), menunjukkan kalau pengetahuan perpajakan berpengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak saat membayar PBB. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dibentuk hipotesa sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>:** Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (PBB).

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran dalam membayar pajak bermula dari diri wajib pajak itu sendiri, tanpa perlu diingatkan oleh orang lain ataupun dengan adanya tindak hukuman. Oleh sebab itu kesadaran wajib pajak dapat terpengaruh akan asas kesadaran dimana ini berasal dikarenakan punya aturan yang berlaku. Masyarakat bisa dikatakan punya rasa sadar saat wajib pajak memahami manfaat PBB terhadap negara dan bangsa, Ramadhanti (2020).

Hasil pada observasi Rahman (2018), mengungkapkan kalau kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar PBB. Penelitian ini didukung penelitian dari Nafiah (2018), menerangkan kesadaran dari wajib pajak dapat dilihat disiplin dan keikutsertaan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya secara sukarela. Sehingga penulis membentuk hipotesa berikut:

**H<sub>2</sub>:** Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Kepatuhan Wajib pajak**

Ketaatan wajib pajak saat melakukan syarat dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tarif dari PBB yang berlaku ialah 0,5%. Tarif yang berlaku pada wilayah di Indonesia terhadap objek dari pajak yang sejenis, Wardani dan Rumiyatun (2017). Orang yang taat memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan wajib pajak yang patuh Rahayu (2017).

Penelitian dari Budhiartama dan Jati (2016), wajib pajak yang punya tingkat pengetahuan tinggi bisa meningkatkan adanya kesadaran masyarakat bagi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>:** Pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan PBB

## 2. METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kuantitatif. Merupakan metode yang menggunakan data berupa angka yang dapat diukur dengan menggunakan statistic uji perhitungan yang berhubungan terhadap penelitian yang diteliti supaya bisa mendapatkan kesimpulan, Sugiono (2018).

Penelitian ini memakai data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari adanya kuesioner yang diberikan pada responden dengan membuat pertanyaan tertulis agar bisa diisi responden yang berupa skala angka yang menjadi indikator dari penilaian. Dan data sekunder berupa data total dari wajib pajak tahun 2022 lalu penerimaan PBB tahun 2019 hingga 2021. Populasi yang dipakai merupakan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Desa Ambia sebanyak 50 sampel wajib pajak.

Hasil dan pembahasan berfokus pada hasil Uji validitas, Uji reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Determinasi dan Regresi linier berganda yang memakai bantuan SPSS v. 25.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Responden dalam peneliti ialah wajib pajak yang bertempat tinggal di Desa Ambia, Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud. Data deskriptif demografi responden dapat dilihat pada tabel 2. berikut:

**Tabel 4.1.** Karakteristik Demografi Responden

Demografi	Keterangan	Jumlah	Presentase
Pendidikan	SMA/Sederajat	37	74 %
	Diploma	3	6 %
	S1	10	20 %
Jenis Kelamin	Laki-laki	30	60 %
	Perempuan	20	40 %

Tabel 4.1, responden mempunyai berbagai jenis pendidikan, dari SMA/sederajat sebanyak 74% (37 wajib pajak), pendidikan diploma 6% (3 wajib pajak), dan sarjana sejumlah 20% (10 wajib pajak). Responden yang sudah isi kuesioner terbagi dalam jumlah yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 60% (30 wajib pajak) dan perempuan sebanyak 40% (20 wajib pajak).

### Uji Validitas dan Reliabilitas

Kesimpulan tabel 4.2 adalah variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak punya nilai Cronbach's alpha > 0,6 jadi setiap pernyataan pada kuesioner tersebut dikatakan reliabel.

**Tabel 4.2.** Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Coronbach's alpha	Standar	Kesimpulan
1	Pengetahuan Perpajakan	0,837	0,6	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak	0,832	0,6	Reliabel
3	Kepatuhan Wajib pajak	0,853	0,6	Reliabel

Sumber: *Data Diolah*

Parameter validitas data menggunakan alpha ( $\alpha$ ) 5%, derajat bebas ( $N$ ) = 50, perolehan hasil tabel  $r = 0,279$ , pernyataan dinyatakan valid bila nilai  $r$  hitung >  $r$  tabel. Hasil olah data pada tabel 4 di bawah, pada ketiga variabel diperoleh kesimpulan bahwa pernyataan yang terdapat pada pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak maupun kepatuhan wajib pajak dikatakan valid karena nilai  $r$  hitung >  $r$  tabel.

**Tabel 4.3** Hasil Uji Validitas

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
X1_1	0,489	0,279	Valid
X1_2	0,740	0,279	Valid
X1_3	0,910	0,279	Valid
X1_4	0,848	0,279	Valid
X1_5	0,880	0,279	Valid
X2_1	0,789	0,279	Valid
X2_2	0,769	0,279	Valid
X2_3	0,638	0,279	Valid
X2_4	0,811	0,279	Valid
X2_5	0,723	0,279	Valid
X2_6	0,773	0,279	Valid
Y_1	0,728	0,279	Valid
Y_2	0,853	0,279	Valid
Y_3	0,812	0,279	Valid
Y_4	0,790	0,279	Valid
Y_5	0,624	0,279	Valid
Y_6	0,603	0,279	Valid
Y_7	0,699	0,279	Valid

Sumber: *Data Diolah*

## Statistik Deskriptif

**Tabel 4.4** Statistik Deskriptif

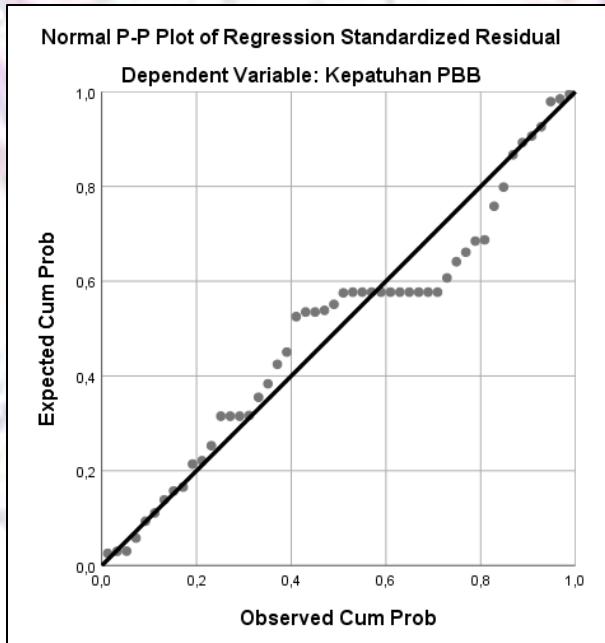
	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan pajak	50	13	25	21,58	3,289
Kesadaran wajib pajak	50	15	30	25,36	4,039
Kepatuhan PBB	50	19	35	30,16	4,127
Valid N (listwise)	50				

Sumber : *Data Diolah*

Dari statistik diatas dapat kita lihat kalau pada penelitian terdapat total 50 sampel data dari wajib pajak pada Desa Ambia dan sudah memenuhi kriteria dalam penelitian, Variabel dependen yang dipakai pada penelitian ini adalah Kepatuhan wajib Pajak yang menggunakan data primer berjenis kuesioner sebagai dasar sampel yang didapat. dapat kita lihat bahwa rata rata terkecil didapat dari variabel pengetahuan pajak yang mengartikan bahwa pengetahuan mengenai pajak terhadap wajib pajak di desa Ambia dapat dikatakan kurang dibanding kesadaran dan kepatuhan pajaknya.

## Uji Normalitas

**Tabel 4.5.** Uji Normalitas



Dari tabel diatas, bisa kita lihat kalau penyebaran terjadi pada sekitar sumbu garis diagonal, dan kita dapat simpulkan bahwa grafik punya pola distribusi normal dan bahwa model regresi ini memenuhi Normalitas atau terdistribusi secara normal.

### Uji Multikolinieritas

**Tabel 4.6. Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan pajak	0,508	1,968
Kesadaran wajib pajak	0,508	1,968

a. Dependent Variable: Kepatuhan PBB

Hasil uji multikolinieritas didapat nilai tolerance dari variabel pengetahuan pajak dan kesadaran membayar PBB sebesar  $0,508 > 0,10$ . VIF pada variabel pengetahuan pajak dan variable kesadaran membayar PBB sebesar  $1,968 < 10$ . Dari hasil ini bisa disimpulkan kalau gejala multikolinieritas tidak ditemukan dimodel regresi ini dan disimpulkan bahwa data yang diolah terilang normal.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4.7. Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	4,079	0,892			4,572	0,000
Pengetahuan pajak	-0,038	0,054	-0,127		-0,696	0,490
Kesadaran wajib pajak	-0,086	0,044	-0,358		-1,965	0,055

a. Dependent Variable: ABRESID

Jikalau nilai dari residual lebih besar daripada 0,05 maka tidak akan terjadi masalah dalam uji heteroskedastisitas. Bisa dilihat bahwa nilai dari pengetahuan perpajakan = 0,490, kesadaran wajib pajak = 0,55 Maka tidak ada masalah heteroskedastisitas pada penelitian ini.

### Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 4.8. Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted	Std. Error of
			R Square	the Estimate
	,935 <sup>a</sup>	0,875	0,870	1,490

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan PBB

Nilai dari adjusted R square pada table 4.8 = 0,570 (87,5%). Hasil ini mengartikan variabel independen yaitu pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak punya berpengaruh terhadap variabel dependen = 87%. Dan sisanya 12,5% ( $1 - 0,875$ ) dikarenakan faktor yang lain dalam penelitian.

## Regresi linier berganda

### Uji t

**Tabel 4.9. Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	4,741	1,499			3,164	0,003
Pengetahuan pajak	0,189	0,091	0,150		2,080	0,043
Kesadaran wajib pajak	0,842	0,074	0,824		11,386	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan PBB

Uji t dikatakan normal jika signifikansi  $< 0,05$ . Lalu dilihat dari tabel diatas nilai signifikansi pengetahuan pajak = 0,043  $< 0,05$  yang berarti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib PBB, nilai signifikansi dari Kesadaran wajib pajak = 0,000  $< 0,05$  yang berarti berpengaruh signifikan bagi kepatuhan PBB.

### Uji F

**Tabel 4.10. Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean	F	Sig.
			Square		
Regression	730,4	2	365,18	164,473	,000 <sup>b</sup>
Residual	104,4	47	2,22		
Total	834,7	49			

Sumber : *Data Diolah*

Diperoleh nilai  $F = 164,47$  lalu nilai dari  $F_{tabel}$  dengan,  $A=5\%$  dan  $df=(k-1) = (2-1) = 1$  dan  $df2=(n-k) = (50-1) = 49$ , didapat  $F$  tabel yaitu 4,04. Sehingga  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $164,47 > 4,04$ ), nilai probabilitas = 0,020  $< 0,05$  artinya pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak punya pengaruh terhadap kepatuhan masyarakat membayar PBB Desa Ambia, Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud.

## Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data yang didapat dari para wajib pajak yang berdomisili di Desa Ambia menunjukkan faktor yang menyebabkan wajib pajak menjadi wajib pajak yang patuh adalah pengetahuan tentang pajak. Pengetahuan pajak khususnya PBB harus dilakukan melalui sosialisasi secara berkelanjutan oleh aparat desa, mengingat peraturan perundangan perpajakan selalu mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu. Aparat Desa Ambia juga dapat bekerja sama dengan Ketua RW atau Ketua RT setempat untuk berulang-ulang

mengingatkan kepada wajib pajak agar membayar PBB tidak melebihi batas waktu di tempat pembayaran yang telah ditentukan.

“Pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB” Salmah (2018) dan Setyowati (2017). Pengetahuan mengenai pajak terhadap kepatuhan dari masyarakat pada saat membayar PBB sejalan dengan penelitian Ariastuti (2019), menunjukkan kalau pengetahuan pajak dapat mempunyai berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak saat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

### **Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Wajib pajak yang berdomisili di Desa Ambia menunjukkan kalau kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak saat membayar PBB. Makin tinggi tingkat kesadaran dari wajib pajak Desa Ambia akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sehingga penerimaan PBB di Desa Ambia akan meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam menyikapi respon wajib pajak di Desa Ambia, aparat desa dapat mendatangkan tim penyuluhan dari direktorat jendral pajak secara berkesinambungan untuk selalu mengingatkan fungsi pajak dan manfaat membayar pajak bagi masyarakat.

Hasil pada observasi ini sependapat dengan observasi Rahman (2018) mengungkapkan kalau kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan saat membayar PBB. Pada penelitian ini menunjang temuan Nafiah dan Warno (2018), menerangkan kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kedisiplinan serta keikutsertaan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam bernegara.

### **Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan PBB**

Para wajib pajak di Desa Ambia setuju kalau pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan mempengaruhi mereka menjadi patuh terhadap membayar pajak. Tingkat pengetahuan tentang perpajakan yang tinggi melalui sosialisasi seluruh aparat desa bekerja sama dengan tim dari jajaran yang lebih rendah yaitu ketua RT dan RW membuat wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB akan makin menyadari pentingnya fungsi penerimaan PBB di daerah tersebut sehingga makin tinggi tingkat wajib pajak yang patuh.

Seseorang akan sanggup bersikap karena punya keinginan serta motivasi terhadap dirinya sendiri, dan wajib pajak yang punya pengetahuan tinggi berperilaku mematuhi peraturan perpajakan Ermawati (2018). Hasil riset ini sepemahaman dengan Budhihartama dan Jati (2016) apabila wajib pajak mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi maka dapat meningkatkan adanya kesadaran masyarakat pada kewajiban pajaknya tanpa paksaan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan ulasan yang sudah diuraikan di atas, maka dapat kesimpulan yang diambil sebagai berikut:

- a) Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PBB di Desa Ambia. hasil uji t parsial diperoleh  $t_{hitung}$  positif  $> t_{tabel} = 2,080 > 1,678$  dan signifikansi yang didapat  $= 0,043 < 0,05$ .
- b) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PBB di Desa Ambia. Hasil riset yang dapat lihat pada  $t_{tabel}$ , diperoleh  $t_{hitung}$  positif  $> t_{tabel} = 11,386 > 1,678$  dan signifikansi yang didapat  $= 0,000 < 0,05$ .
- c) Pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan punya pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PBB Desa Ambia. Melihat hasil dari uji  $F = 0,000 < 0,05$  dan berpengaruh positif  $= 164,473 > 4,04$ .

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ariastuti, F., Suharno, S., & Harimurti, F. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemberian Hadiah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasar Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 341–351. <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/jasti.v15i3.3697>
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Aneka Cipta.
- Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), 1510–1535. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/17762>
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *STIE Semarang*, 10(1). <https://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/89>
- Gusar, H. S., & Susilatri, N. dan. (2015). Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Kecamatan Bengkong). *Neliti*, 2(2), 1–15.
- Keuangan, K. (2022). *Kinerja Pajak Hingga Agustus 2022 Mencapai Rp 1.171,8 T, Tumbuh 58,1%*. 5 Oktober 2022. [www.Kemenkeu.Go.Id](http://www.Kemenkeu.Go.Id). [https://www.kemenkeu.go.id/informasi-58,1%\\_5\\_Oktober\\_2022](https://www.kemenkeu.go.id/informasi-58,1%_5_Oktober_2022)

publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Pajak-Hingga-Agustus-2022

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan, Edisi Terbaru*. Andi Offset.

Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/28121>

Nafiah, Z., & Sopi, S. (2020). Pengaruh Kepemilikan Internal, Kualitas Audit Dan Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Stie Semarang*, 12(1), 69–78. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v12i1.397>

Oktafiyanto, I., & Wardani, D. K. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 41–52. <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/43>

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Rekayasa Sains.

Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1), 1–20.

Ramadhanti, I., Suharno, S., & Widarno, B. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 9–21. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/4405>

Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151–186. <http://e-jurnal.unipma.ac.id/index.php/inventory/article/view/2443>

Setyowati, Y., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kalidengen Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Tahun 2014. *Jurnal Profita Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(8), 1–21. <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/9970>

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SULAWESI UTARA,  
TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA**

***Ersandy Rumansjah<sup>1</sup>, Tri Oldy Rotinsulu<sup>2</sup>, Agnes L.Ch. P. Lapian<sup>3</sup>***

*Program Studi Magister Ilmu Ekonomi*

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

*Universitas Sam Ratulangi, Manado*

*email: [\(1\)](mailto:sandyeky08@gmail.com), [\(2\)](mailto:oldyrotinsulu43257@gmail.com),  
[\(3\)](mailto:agneslapian@unsrat.ac.id)*

**ABSTRAK**

Analisis pengelolaan aset tetap/BMN (Barang Milik Negara) perlu dilakukan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan aset pada instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan kinerjanya, dan (2) Tingkat kepuasan pengguna aset tetap terhadap kinerja pengelolaan aset secara keseluruhan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif, dengan pegawai selaku pengguna aset tetap sebagai responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 30 responden, dan dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan *Importance Performance Analysis (IPA)* dan *Customer Satisfaction Index (CSI)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap pengelolaan aset tetap terdapat 3 atribut pengelolaan aset yang harus dilakukan perbaikan secara terus menerus oleh Tim Pengurus Aset yaitu atribut A3, A6, dan A15. Selanjutnya, terdapat 10 atribut berkinerja baik dan harus dipertahankan yaitu atribut A1, A2, A4, A5, A8, A9, A10, A11, A14, dan A16 (keterangan simbol sesuai Gambar 2). Adapun pengelolaan aset secara keseluruhan berdasarkan analisis CSI diperoleh hasil sebesar 85,18%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengguna aset sangat puas atas pengelolaan aset yang dilakukan oleh Tim Pengurus Aset, dengan kata lain bahwa hasil pengelolaan aset yaitu sangat memuaskan.

**Kata kunci:** Pengelolaan aset tetap, kepuasan pengguna aset, *Importance Performance Analysis (IPA)*, dan *Customer Satisfaction Index (CSI)*

**ABSTRACT**

*Analysis of fixed asset management/ BMN (Barang Milik Negara) needs to be done to measure the success of asset management in government agencies. The objective of this research were find out: (1) the Implementation of fixed asset management that needs to be improved and maintained in performance at the Regional Office of the Directorate General of State Assets in North, Central Sulawesi, Gorontalo and North Maluku, and (2) The level of satisfaction of fixed asset users on asset management performance as a whole at the Regional Offices of the Directorate General of State Assets for North, Central Sulawesi, Gorontalo, and North Maluku. This research employed a quantitative approach. The respondents of this research consisted of employees who are not affiliated with asset management. Data were analyzed using Importance Performance Analysis (IPA) and Customer Satisfaction Index (CSI). The results of the research showed that there are 3 attributes of asset management that must be continuously improved by the Asset Management Team, namely: attributes A3, A6, and A15. Furthermore, there are 10 attributes that perform well and must be maintained, namely: attributes A1, A2, A4, A5, A8, A9, A10, A11, A14, and A16 (symbol description based on Figure 2). While the overall asset management based on CSI analysis obtained results of 85.18%. This value indicates that asset users are very satisfied with the asset management carried out by the Asset Management Team, in other words that the results of asset management are very satisfactory.*

**Keywords:** *Fixed asset management, asset user satisfaction, Importance Performance Analysis (IPA), and Customer Satisfaction Index (CSI)*

**1. PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. Melalui APBN, pemerintah melaksanakan segala program-program kerjanya dalam

rangka mensejahterahkan rakyat dengan menyediakan lapangan kerja, menyediakan dan membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur, menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan dan pembangunan manusia serta membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah lewat Kementerian/Lembaga. Namun dalam pelaksanaannya APBN belum mampu memenuhi segala pengeluaran pemerintah untuk membiayai segala rencana dan program kerja tersebut mengingat APBN yang sifatnya terbatas.

Dengan segala keterbatasan APBN, pemerintah selalu berupaya untuk lebih efektif dan efisien dalam melakukan pengeluaran biaya dalam rangka belanja pemerintah dan juga meningkatkan penerimaan negara. Salah satu komponen belanja pemerintah dalam postur APBN yaitu belanja modal pada Kementerian/Lembaga. Dalam APBN, belanja modal Pemerintah memakan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, jika Pemerintah dapat melakukan pengelolaan aset yang optimal maka diharapkan dapat menekan biaya pengadaan dan biaya pemeliharaan. Disamping itu, dapat pula menghasilkan penerimaan untuk negara (Payangan, 2019).

Paradigma baru pengelolaan aset negara yang lebih dikenal dengan istilah Barang Milik Negara (BMN) ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dimana peraturan dimaksud merupakan peraturan turunan UU No. 1/2004. Peraturan pemerintah dimaksud telah memunculkan optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Pengelolaan aset negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/*stake holder*.

Pembentahan tata kelola aset negara ke arah yang tertib dan akuntabel menjadi hal yang substansial ditengah usaha pemerintah untuk meningkatkan citra pengelolaan keuangan negara yang baik melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*). Melalui pengelolaan aset yang baik diharapkan pengelolaan aset negara di setiap instansi pemerintah menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga aset-aset negara mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat (Pardiman & Nuha, 2009).

Optimalisasi pengelolaan aset (BMN) berupaya memaksimalkan ketersediaan dan penggunaan aset, serta meminimalkan biaya kepemilikan dengan cara melakukan kajian penggunaan dan pemanfaatan terbaik atas sebuah aset (Siregar, 2004). Lebih lanjut Siregar (2004) mengemukakan optimalisasi aset sebagai salah satu bentuk proses kerja manajemen aset yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi fisik, nilai/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki oleh aset. Peran pengelola aset menjadi penting untuk mewujudkan hal dimaksud, namun terkadang terkendala pada perilaku individu pengelola aset itu sendiri, sehingga dibutuhkan kontrol perilaku sebagai upaya mewujudkan pengelolaan aset yang baik dengan

mengedepankan 3T (Tertib Administrasi, Fisik, dan Legalitas) demi sebuah informasi aset yang akurat untuk mengetahui potensi dan perlakuan apa yang tepat untuk dikembangkan terhadap sebuah aset. Ketidakdisiplinan terhadap prosedur kerja, sebagaimana Siregar (2004:519) memberikan tahapan yang dimulai dari pendataan, kodefikasi atau labelling, pengelompokan, dan pembukuan atau administrasi, begantung pada sikap dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersebar di Satker Kuasa Pengguna Barang yang dianggap sebagai aktor pejuang aset (Gaffar, 2017).

Kompetensi dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah adalah salah satu penyebab menurunnya produktivitas kerja individu maupun organisasi. Oleh karena itu, kompetensi dan kualitas SDM yang mumpuni sangat diperlukan dalam melakukan pengelolaan BMN sebagaimana yang diamanatkan oleh PP Nomor 27 tahun 2014. Pengelolaan BMN tersebut meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemusnahan, pindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dengan adanya PP Nomor 27 tahun 2014 maka instansi pemerintah telah diberikan kewenangan yang untuk mengatur sumber dayanya dalam melakukan pengelolaan BMN dimaksud. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara merupakan salah satu instansi pemerintah di kota Manado yang memiliki sejumlah aset tetap dan digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Aset tersebut dikelola oleh tim pengurus aset yang bertugas melakukan pengelolaan aset secara optimal dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yaitu PP Nomor 27 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 tahun 2020 berikut peraturan turunannya.

Pengelolaan aset tersebut diharapkan sepenuhnya telah dilaksanakan dengan baik dan benar sehingga kualitas kinerja pengelolaanya dapat dilihat, dirasakan, dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap kinerja pengelolaan aset yang dilaksanakan oleh Tim Pengurus Aset pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dikaitkan dengan tingkat kepuasan pengguna aset yang ada dalam satuan kerja dimaksud untuk selanjutnya dijadikan dasar rekomendasi kebijakan dalam peningkatan kinerja pengelolaan aset dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan aset pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dengan judul “Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara”

## Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pengelolaan aset tetap (tanah, bangunan, rumah negara, peralatan dan mesin, dan kendaraan) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara?
2. Bagaimana tingkat kepuasan pengguna aset tetap (tanah, bangunan, rumah negara, peralatan dan mesin, dan kendaraan) terhadap kinerja pengelolaan aset tetap secara keseluruhan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara?

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan kinerjanya pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.
2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna aset tetap terhadap kinerja pengelolaan aset secara keseluruhan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.

## Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
  - b. Menjadi rujukan bagi penelitian khususnya bagi penelitian berkenaan dengan analisis pengelolaan aset.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara  
Dapat memberikan gambaran dan informasi yang berguna serta sebagai alat evaluasi dalam memperbaiki dan mempertahankan atribut pengelolaan aset.
  - b. Bagi Peneliti  
Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 2. METODE PENELITIAN

### Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari pegawai atau pengguna aset pada tempat penelitian. Pengguna aset dimaksud merupakan responden yang dalam kesehariannya merasakan langsung hasil pelaksanaan pengelolaan aset dari Tim Pengurus Aset (para pegawai yang bertugas untuk melakukan pengelolaan atas atribut pengelolaan aset). Sedangkan data sekunder diperoleh dari tempat penelitian, jurnal-jurnal penelitian, studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian.

### Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode *survey* dengan teknik kuesioner yaitu dengan cara mendistribusikan kuesioner secara langsung kepada responden yaitu para pegawai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert yang digunakan untuk mengukur hasil jawaban atau pendapat responden dengan empat pilihan jawaban yang memiliki tingkatan skor berbeda. Pengumpulan data selanjutnya menggunakan teknik studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan penatausahaan aset yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan di tempat penelitian.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai atau pengguna aset yang tidak terafiliasi dalam pengelolaan aset pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 38 orang pegawai. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti (Sugiyono, 2018). Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 30 orang pegawai/pengguna aset.

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dari variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Importance* (Kepentingan), variabel ini menggambarkan harapan pengguna aset berdasarkan tingkat kepentingan dari atribut pengelolaan aset yang dilaksanakan oleh Tim Pengurus Aset. Adapun atribut-atribut dan pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1. Variabel *Importance* (Kepentingan), Atribut, Simbol, dan Pengukuran**

<b>Variabel <i>Importance</i> (Kepentingan)</b>			
<b>No</b>	<b>Atribut</b>	<b>Simbol</b>	<b>Ukuran</b>
1	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pengadaan BMN dengan memperhatikan kebutuhan organisasi	A1	4 = Sangat Penting 3 = Penting 2 = Kurang Penting 1 = Tidak Penting
2	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pemeliharaan BMN dengan memperhatikan kebutuhan organisasi	A2	4 = Sangat Penting 3 = Penting 2 = Kurang Penting 1 = Tidak Penting
3	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran dilaksanakan dengan turut mempertimbangkan masukan para pegawai	A3	4 = Sangat Penting 3 = Penting 2 = Kurang Penting 1 = Tidak Penting
4	Pengadaan BMN berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel	A4	4 = Sangat Penting 3 = Penting 2 = Kurang Penting 1 = Tidak Penting
5	Pengadaan BMN dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi	A5	4 = Sangat Penting 3 = Penting 2 = Kurang Penting 1 = Tidak Penting
6	Penggunaan BMN dilaksanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi	A6	4 = Sangat Penting 3 = Penting 2 = Kurang Penting 1 = Tidak Penting
7	Pemanfaatan dalam bentuk sewa atas BMN yang tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi	A7	4 = Sangat Penting 3 = Penting 2 = Kurang Penting 1 = Tidak Penting
8	Pengamanan dilakukan dengan menjaga dan melindungi BMN yang meliputi pengamanan administrasi, fisik dan hukum	A8	4 = Sangat Penting 3 = Penting 2 = Kurang Penting 1 = Tidak Penting
9	Pemeliharaan BMN secara rutin, teratur, dan/atau sesuai kondisi yang ada	A9	4 = Sangat Penting 3 = Penting 2 = Kurang Penting 1 = Tidak Penting
10	Penilaian/revaluasi terhadap BMN untuk memperoleh nilai wajar dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat	A10	4 = Sangat Penting 3 = Penting 2 = Kurang Penting 1 = Tidak Penting
11	Penilaian terhadap BMN untuk memperoleh nilai wajar dalam rangka pemindah tangangan/ penjualan BMN sesuai ketentuan yang berlaku	A11	4 = Sangat Penting 3 = Penting 2 = Kurang Penting 1 = Tidak Penting
12	Pemindah tangangan terhadap BMN yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi	A12	4 = Sangat Penting 3 = Penting 2 = Kurang Penting 1 = Tidak Penting
13	Pemusnahan fisik BMN karena tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipindah tangankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	A13	4 = Sangat Penting 3 = Penting 2 = Kurang Penting 1 = Tidak Penting

14	Penghapusan (administratif) dari daftar barang terhadap BMN yang tidak lagi dalam penguasaan satuan kerja	A14	4 = Sangat Penting 3 = Penting 2 = Kurang Penting 1 = Tidak Penting
15	Penatausahaan BMN terdiri dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN	A15	4 = Sangat Penting 3 = Penting 2 = Kurang Penting 1 = Tidak Penting
16	Pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN yang berada di dalam penguasaannya	A16	4 = Sangat Penting 3 = Penting 2 = Kurang Penting 1 = Tidak Penting

*Sumber: data primer diolah (2021)*

## 2. *Performance (Kinerja)*

Variabel ini ditentukan oleh penilaian pengguna aset terhadap kualitas/kinerja atribut pengelolaan aset yang dilaksanakan oleh Tim Pengurus Aset. Adapun pengukuran variabel tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. Variabel *Performance (Kinerja)*, Atribut, Simbol, dan Pengukuran**

Variabel <i>Performance (Kinerja)</i>			
No	Atribut	Simbol	Ukuran
1	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pengadaan BMN dengan memperhatikan kebutuhan organisasi	A1	4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang Baik 1 = Tidak Baik
2	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pemeliharaan BMN dengan memperhatikan kebutuhan organisasi	A2	4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang Baik 1 = Tidak Baik
3	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran dilaksanakan dengan turut mempertimbangkan masukan para pegawai	A3	4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang Baik 1 = Tidak Baik
4	Pengadaan BMN berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel	A4	4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang Baik 1 = Tidak Baik
5	Pengadaan BMN dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi	A5	4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang Baik 1 = Tidak Baik
6	Penggunaan BMN dilaksanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi	A6	4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang Baik 1 = Tidak Baik
7	Pemanfaatan dalam bentuk sewa atas BMN yang tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi	A7	4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang Baik 1 = Tidak Baik

8	Pengamanan dilakukan dengan menjaga dan melindungi BMN yang meliputi pengamanan administrasi, fisik dan hukum	A8	4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang Baik 1 = Tidak Baik
9	Pemeliharaan BMN secara rutin, teratur, dan/atau sesuai kondisi yang ada	A9	4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang Baik 1 = Tidak Baik
10	Penilaian/revaluasi terhadap BMN untuk memperoleh nilai wajar dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat	A10	4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang Baik 1 = Tidak Baik
11	Penilaian terhadap BMN untuk memperoleh nilai wajar dalam rangka pemindahtanganan/ penjualan BMN sesuai ketentuan yang berlaku	A11	4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang Baik 1 = Tidak Baik
12	Pemindahtanganan terhadap BMN yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi	A12	4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang Baik 1 = Tidak Baik
13	Pemusnahan fisik BMN karena tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipindah tangankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	A13	4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang Baik 1 = Tidak Baik
14	Penghapusan (administratif) dari daftar barang terhadap BMN yang tidak lagi dalam penguasaan satuan kerja	A14	4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang Baik 1 = Tidak Baik
15	Penatausahaan BMN terdiri dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN	A15	4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang Baik 1 = Tidak Baik
16	Pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN yang berada di dalam penguasaannya	A16	4 = Sangat Baik 3 = Baik 2 = Kurang Baik 1 = Tidak Baik

Sumber: data primer diolah (2021)

## Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:13) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkret), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

## Uji Instrumen Penelitian

Keabsahan suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat ukur yang digunakan, untuk menguji keabsahan tersebut diperlukan dua macam pengujian yaitu uji validitas (*test of validity*) dan uji reliabilitas (*test of reliability*). Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan

atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat (Suharsimi Arikunto (2013: 211). Menurut Sugiyono (2010:188) dari hasil analisis dapat dilihat bahwa jika hasil koefisien validitas/ $r_{hitung}$  bernilai positif dan memenuhi syarat minimum sama dengan atau  $> 0,3$  maka instrumen tersebut dikatakan valid dan dapat digunakan untuk pengukuran dalam pengumpulan data penelitian, sebaliknya jika korelasi butir memiliki nilai  $r_{hitung} < r_{table}$  0,3, maka disimpulkan bahwa butir tersebut tidak valid (dinyatakan gugur). Kemudian uji reliabilitas diukur dengan melihat nilai standar *cronbach alpha*. Menurut Ghazali (2005: 46), suatu instrumen dikatakan reliabel apabila hasil perhitungan *Apha Cronbach* menunjukkan nilai lebih besar dari 0,70. Pengujian validitas dan reliabilitas di atas *Software SPSS* 27.

### **Importance Performance Analysis (IPA)**

Teknik *Importance Performance Analysis (IPA)* dikemukakan pertama kali oleh Martilla & James (1997) dalam artikel mereka yang dipublikasikan di *Jurnal of Marketing*. Martilla & James (1997) yang dikutip oleh Tjiptono dan Chandra (2016:222-223) memaparkan bahwa dalam teknik ini, responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan berbagai atribut relevan dan tingkat kinerja perusahaan (*perceived performance*) pada masing-masing atribut tersebut.” Kemudian nilai rata-rata tingkat kepentingan atribut dan kinerja perusahaan akan dianalisis di *Importance Performance Matrix*.

Pada metode IPA ini, tingkat kepentingan dan kinerja pengguna aset diukur menggunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur tingkat kepentingan atau harapan dan tingkat kepuasan pelanggan terhadap atribut-atribut yang ditanyakan. Skor Skala Likert ini terdiri dari empat kategori sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 3. Skala Likert Pengukuran Tingkat Kepentingan dan Kepuasan**

Kategori		Skor
Tingkat Kepentingan	Tingkat Kinerja	
Sangat Penting	Sangat Baik	4
Penting	Baik	3
Kurang Penting	Kurang Baik	2
Tidak Penting	Tidak Baik	1

Metode *Importance Performance Analysis (IPA)* dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut (Supranto, 2006):

1. Berdasarkan hasil penelitian tingkat kepentingan dan kinerja, maka akan dihasilkan suatu perhitungan mengenai tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan/harapan (*importance*) dan tingkat kinerja (*performance*), yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:
- 2.

$$Tki = \frac{Xi}{Yi} \times 100\%$$

..... (1)

dimana:

$Tki$  = Tingkat kesesuaian responden

$Xi$  = Skor penilaian kinerja

$Yi$  = Skor penilaian kepentingan

3. Pada penggunaan diagram kartesius, sumbu mendatar ( $X$ ) akan diisi oleh skor tingkat pelaksanaan kinerja/kepuasan (*performance*), sedangkan sumbu tegak ( $Y$ ) akan diisi oleh skor tingkat kepentingan/harapan (*importance*). Rumusan matematis untuk setiap faktor tersebut adalah sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n Xi}{n}$$

..... (2)

$$\bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^n Yi}{n}$$

..... (3)

dimana:

$\bar{X}$  = Skor rata-rata tingkat kinerja/kepuasan

$\bar{Y}$  = Skor rata-rata tingkat kepentingan/harapan

$n$  = Jumlah responden

4. Diagram kartesius digunakan dalam penjabaran atribut-atribut tingkat kesesuaian kepentingan/harapan (*importance*) dan kinerja/kepuasan (*performance*). Diagram kartesius merupakan suatu bagan yang dibagi menjadi empat bagian dan dibatasi oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik ( $\bar{X}$ ,  $\bar{Y}$ ). Kedua titik tersebut diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum_{i=1}^n \bar{X}_i}{k}$$

..... (4)

$$\bar{\bar{Y}} = \frac{\sum_{i=1}^n \bar{Y}_i}{k}$$

..... (5)

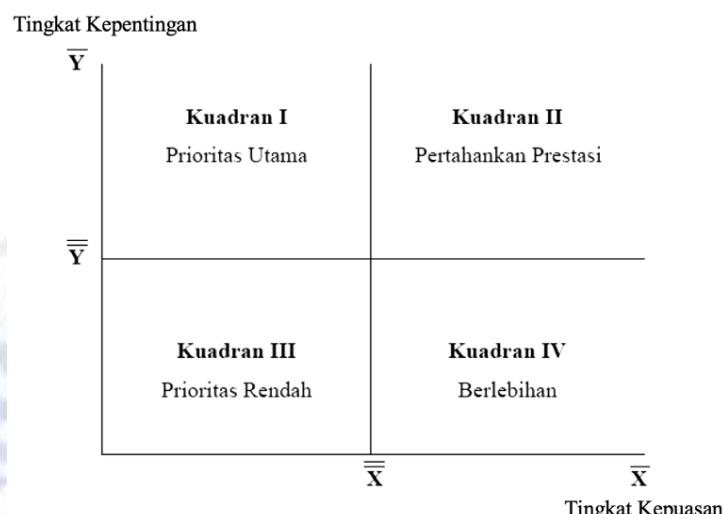
dimana:

$\bar{\bar{X}}$  = Skor rata-rata tingkat kinerja seluruh atribut

$\bar{\bar{Y}}$  = Skor rata-rata tingkat kepentingan/harapan seluruh atribut

$k$  = Banyaknya atribut diberikan perusahaan yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan

Kedua garis tersebut membagi diagram kartesius yang merupakan matriks IPA ke dalam empat kuadran, yaitu Kuadran I, Kuadran II, Kuadran III dan Kuadran IV. Berikut gambar diagram kartesius yang dikembangkan oleh Supranto (2006).



Gambar 1. Diagram Kartesius

Berdasarkan gambar Diagram Kartesius di atas, maka setiap kuadran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Kuadran I** merupakan Kuadran Prioritas Utama, menunjukkan atribut-atribut yang dianggap mempengaruhi kepuasan pengguna aset, namun belum melaksanakannya sesuai yang diharapkan pelanggan, sehingga pelanggan tidak puas. Kinerja atribut-atribut yang masuk ke dalam kuadran ini harus ditingkatkan oleh perusahaan dengan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
2. **Kuadran II** merupakan Kuadran Pertahankan Prestasi, menunjukkan atribut-atribut yang dianggap penting oleh pelanggan dan telah dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga sangat memuaskan pelanggan. Kinerja atribut-atribut yang terdapat dalam kuadran ini harus dipertahankan.
3. **Kuadran III** merupakan Kuadran Prioritas Rendah menunjukkan atribut-atribut yang dianggap kurang begitu penting pengaruhnya bagi pelanggan dan pelaksanaannya oleh perusahaan biasa-biasa saja. Peningkatan kinerja atribut dalam kuadran ini perlu dipertimbangkan lagi karena manfaat yang diperoleh sangat kecil.
4. **Kuadran IV** merupakan Kuadran Berlebihan menunjukkan atribut-atribut yang dianggap kurang penting bagi pelanggan namun pelaksanaannya dirasa berlebihan. Atribut-atribut dalam kuadran ini dapat dikurangi pelaksanaannya untuk menghemat biaya.

Berdasarkan uraian terkait analisis IPA di atas, jika kepuasan dan kepentingan pelanggan itu ditinjau dari perspektif pengelolaan aset, maka pelanggan dalam hal ini adalah pegawai yang

merupakan pengguna aset dan perusahaan adalah instansi pemerintah/satuan kerja yang menjadi tempat penelitian.

### ***Customer Satisfaction Index (CSI)***

*Costumer Satisfaction* adalah suatu bentuk perasaan senang atau kecewa yang didapatkan seorang pelanggan dari membandingkan kinerja sebuah produk atau jasa dengan harapannya (Kotler dan Keller: 2006). *Customer Satisfaction Index (CSI)* merupakan metode yang digunakan untuk menetukan tingkat kepuasan konsumen secara menyeluruh dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dari atribut-atribut kualitas pelayanan/jasa yang diukur. Menurut Arini T. Soemohadiwidjojo (2015), *Customer Satisfaction Index* adalah indeks kepuasan pelanggan diperoleh dari hasil survei dan dinyatakan dalam skala 1-5 (skala likert) yang berisikan informasi mengenai tingkat kepuasan pelanggan dalam memperoleh atau menggunakan suatu produk barang atau jasa. Pengukuran terhadap CSI diperlukan karena hasil dari pengukuran dapat digunakan sebagai acuan untuk menetukan sasaran-sasaran terhadap peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Menurut Aritonang (2005) terdapat empat langkah dalam perhitungan *Customer Satisfaction Index (CSI)*, yaitu:

1. Menentukan *Mean Important Score (MIS)* dan *Mean Satisfaction Score (MSS)*.

a. *Mean Important Score (MIS)* merupakan nilai rata-rata tingkat kepentingan/harapan tiap atribut yang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$MIS = \frac{\sum_{i=1}^n \bar{Y}_i}{n}$$

..... (6)

d

dimana:

$n$  = jumlah responden

$Y_i$  = Nilai kepentingan atribut ke-  $i$

b. *Mean Satisfaction Score (MSS)* merupakan nilai rata-rata tingkat kepuasan/kenyataan yang dirasakan pelanggan tiap atribut. MSS dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$MSS = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

..... (7)

dimana:

$n$  = jumlah responden

$X_i$  = Nilai kinerja atribut ke-  $i$

2. Membuat *Weight Factors (WF)*

Bobot ini merupakan persentase nilai MIS per atribut terhadap total MIS seluruh atribut. WF dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$WFi = \frac{MISi}{\sum_{i=1}^p MISi} \quad \dots\dots (8)$$

dimana:

$p$  = Jumlah atribut kepentingan

$i$  = Atribut ke-  $i$

### 3. Membuat *Weight Score* (WS)

Bobot ini merupakan perkalian antara *Weight Factor* (WF) dengan rata-rata tingkat kepuasan (*Mean Satisfaction Score* = MSS)

$$WSi = WFi \times MSSi \quad \dots\dots (9)$$

dimana:

$i$  = Atribut aspek kemampuan kelompok ke-  $i$

### 4. Menentukan *Customer Satisfaction Index* (CSI)

Nilai CSI diperoleh dari *Weight Score* dibagi skala maksimal yang digunakan (dalam penelitian ini skala maksimal 5) kemudian dikalikan 100 persen.

$$CSI = \frac{\sum_{i=1}^p WSi}{5} \times 100\% \quad \dots\dots (10)$$

Skala kepuasan konsumen yang dipakai dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima kriteria dari tidak puas sampai dengan sangat puas seperti dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4. Kriteria Nilai *Customer Satisfaction Index* (CSI)**

Nilai Indeks	Kriteria <i>Customer Satisfaction Index</i> (CSI)
0,81 – 1,00	Sangat Puas
0,66 – 0,80	Puas
0,51 – 0,65	Cukup Puas
0,35 – 0,50	Kurang Puas
0,00 – 0,34	Tidak Puas

*Sumber: PT. Sucofindo dalam Firwiyanto (2008)*

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan dalam kuesioner penelitian adalah valid. Hal ini ditandai Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui hubungan

antara skor item dan skor total memiliki probabilitas  $r$  hitung  $> r$  tabel 0,3 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan tersebut valid. Sementara hasil nilai *cronbach aplha* variabel penelitian bernilai di atas 0,7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen telah memenuhi persyaratan valid dan reliabel.

### Tingkat Kesesuaian

Tingkat kesesuaian atribut merupakan persentase perbandingan antara total skor kinerja (*performance*) atau kepuasan dengan total skor kepentingan (*importance*) atau harapan. Hasil perhitungan analisis kesesuaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Tingkat Kesesuaian Atribut Pengelolaan Aset

No	Atribut	Skor Kinerja	Skor Kepentingan/ Harapan	Tingkat Kesesuaian
1	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pengadaan BMN dengan memperhatikan kebutuhan organisasi (A1)	108	117	92%
2	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pemeliharaan BMN dengan memperhatikan kebutuhan organisasi (A2)	109	118	92%
3	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran dilaksanakan dengan turut mempertimbangkan masukan para pegawai (A3)	92	113	81%
4	Pengadaan BMN berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel (A4)	109	117	93%
5	Pengadaan BMN dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (A5)	108	118	92%
6	Penggunaan BMN dilaksanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi (A6)	95	117	81%
7	Pemanfaatan dalam bentuk sewa atas BMN yang tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi (A7)	50	64	78%
8	Pengamanan dilakukan dengan menjaga dan melindungi BMN yang meliputi pengamanan administrasi, fisik dan hukum (A8)	109	119	92%
9	Pemeliharaan BMN secara rutin, teratur, dan/atau sesuai kondisi yang ada (A9)	108	119	91%
10	Penilaian/revaluasi terhadap BMN untuk memperoleh nilai wajar dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat (A10)	110	112	98%
11	Penilaian terhadap BMN untuk memperoleh nilai wajar dalam rangka pemindahtanganan/ penjualan BMN sesuai ketentuan yang berlaku (A11)	113	115	98%

12	Pemindahtanganan terhadap BMN yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi (A12)	107	107	100%
13	Pemusnahan fisik BMN karena tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipindahtangankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (A13)	42	45	93%
14	Penghapusan (administratif) dari daftar barang terhadap BMN yang tidak lagi dalam penguasaan satuan kerja (A14)	107	116	92%
15	Penatausahaan BMN terdiri dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN (A15)	96	118	81%
16	Pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN yang berada di dalam penguasaannya (A16)	112	119	94%
Rata-rata		98	108	91%

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa rata-rata tingkat kesesuaian dari seluruh atribut pengelolaan aset yang dilakukan oleh Tim Pengelolaan Aset pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara adalah 91%. dengan memiliki rentang nilai yang berada pada kisaran antara 78% sampai dengan 100%. Atribut yang memiliki nilai sebesar 78% adalah atribut A7, Pemanfaatan dalam bentuk sewa atas BMN yang tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa atribut A7 dimaksud dirasa masih belum sesuai dengan harapan pengguna aset sehingga perlu adanya perbaikan dan perhatian dari Tim Pengurus Aset. Atribut yang memiliki nilai 100% adalah atribut A12, Pemindahtanganan terhadap BMN yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pada atribut ini menandakan nilai dari Pemindahtanganan terhadap BMN yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, sudah sangat sesuai dengan harapan pengguna aset, akan tetapi masih perlu diperhatikan dan dipertahankan kualitasnya.

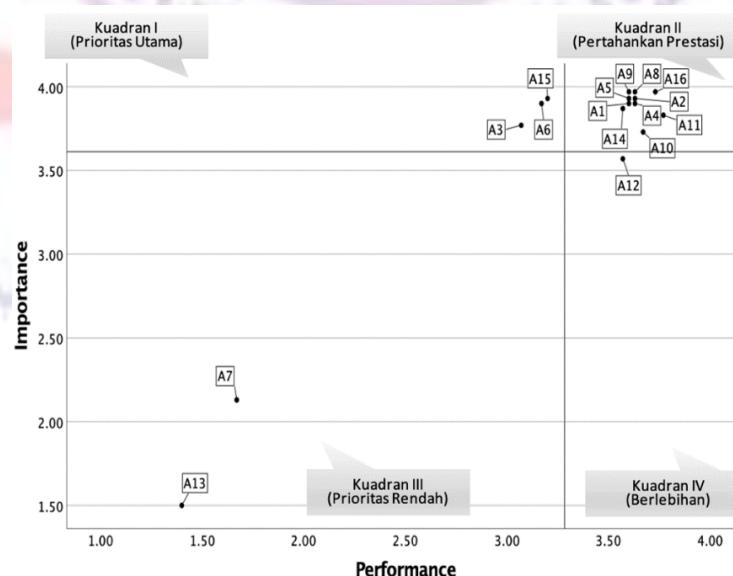
### ***Importance Performance Analysis (IPA)***

*Importance Performance Analysis (IPA)* digunakan dengan terlebih dahulu menghitung tingkat kepentingan dan kinerja lalu kemudian dirata-ratakan. Hasil perhitungan dapat dilihat sesuai tabel berikut.

**Tabel 6. Perhitungan Tingkat Kepentingan dan Kinerja Atribut Pengelolaan Aset**

No	Atribut	Kinerja (X)	Kepentingan (Y)
1	A1	3,60	3,90
2	A2	3,63	3,93
3	A3	3,07	3,77
4	A4	3,63	3,90
5	A5	3,60	3,93
6	A6	3,17	3,90
7	A7	1,67	2,13
8	A8	3,63	3,97
9	A9	3,60	3,97
10	A10	3,67	3,73
11	A11	3,77	3,83
12	A12	3,57	3,57
13	A13	1,40	1,50
14	A14	3,57	3,87
15	A15	3,20	3,93
16	A16	3,73	3,97
<b>Rata-rata</b>		<b>3,28</b>	<b>3,61</b>

Dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa rata rata tingkat kinerja adalah 3,28 dan rata rata tingkat kepentingan adalah 3,61. Nilai rata-rata tersebut akan digunakan dalam pembuatan Diagram Kartesius dimana akan membentuk dua garis yang akan menghasilkan empat kuadran terdiri dari kuadran I prioritas utama, kuadran II pertahankan prestasi, kuadran III prioritas rendah serta kuadran IV berlebihan. Empat kuadran tersebut dapat dilihat pada gambar Diagram Kartesius berikut ini.

**Gambar 2. Diagram Kartesius Atribut Pengelolaan Aset**

Keterangan simbol :

A1 = Perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pengadaan BMN dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

- A2 = Perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pemeliharaan BMN dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- A3 = Perencanaan kebutuhan dan penganggaran dilaksanakan dengan turut mempertimbangkan masukan para pegawai.
- A4 = Pengadaan BMN berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
- A5 = Pengadaan BMN dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- A6 = Penggunaan BMN dilaksanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- A7 = Pemanfaatan dalam bentuk sewa atas BMN yang tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- A8 = Pengamanan dilakukan dengan menjaga dan melindungi BMN yang meliputi pengamanan administrasi, fisik dan hukum.
- A9 = Pemeliharaan BMN secara rutin, teratur, dan/atau sesuai kondisi yang ada.
- A10 = Penilaian/revaluasi terhadap BMN untuk memperoleh nilai wajar dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat.
- A11 = Penilaian terhadap BMN untuk memperoleh nilai wajar dalam rangka pemindahtanganan/penjualan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.
- A12 = Pemindahtanganan terhadap BMN yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- A13 = Pemusnahan fisik BMN karena tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipindah tangankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- A14 = Penghapusan (administratif) dari daftar barang terhadap BMN yang tidak lagi dalam penguasaan satuan kerja.
- A15 = Penatausahaan BMN terdiri dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN.
- A16 = Pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN yang berada di dalam penguasaannya.

### ***Customer Satisfaction Index (CSI)***

*Customer Satisfaction Index (CSI)* atau Indeks Kepuasan Konsumen digunakan untuk menganalisis kepuasan pengguna aset responden terhadap atribut pengelolaan aset secara keseluruhan dengan melihat nilai rata-rata tingkat kepentingan/harapan dan pelaksanaan dari atribut-atribut tersebut. Hasil perhitungan CSI terhadap kinerja Tim Pengurus Aset dalam pengelolaan aset dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Table 7. Perhitungan *Customer Satisfaction Index***

No	Atribut	MIS	WF	MSS	WS
1	A1	4,00	0,07	3,63	0,25
2	A2	4,00	0,07	3,70	0,25
3	A3	3,89	0,07	3,33	0,22
4	A4	4,00	0,07	3,74	0,26
5	A5	4,00	0,07	3,70	0,25
6	A6	3,96	0,07	3,33	0,23
7	A7	2,22	0,04	1,44	0,05
8	A8	4,00	0,07	3,70	0,25
9	A9	4,00	0,07	3,67	0,25
10	A10	3,81	0,07	3,78	0,25
11	A11	3,96	0,07	3,89	0,26
12	A12	3,52	0,06	3,56	0,21
13	A13	1,11	0,02	1,04	0,02
14	A14	3,89	0,07	3,56	0,24
15	A15	4,00	0,07	3,37	0,23
16	A16	4,00	0,07	3,74	0,26
<b>Total</b>		<b>57,80</b>	<b>1,00</b>	<b>52,50</b>	<b>3,41</b>
<b>CSI (%)</b>		<b>85,18</b>			

Keterangan:

MIS = *Mean Importance Score*

MSS = *Mean Satisfaction Score*

WF = *Weighted Factors*

WS = *Weighted Score*

### Kinerja Pengelolaan Aset berdasarkan *Importance Performance Analysis (IPA)*

Diagram Kartesius pada gambar 2 di atas menunjukkan hasil statistik kepuasan pengguna aset terhadap atribut pengelolaan aset yang dilaksanakan oleh Tim Pengurus Aset pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Berdasarkan hasil yang ditampilkan oleh diagram tersebut, maka diketahui sebaran atribut-atribut pengelolaan aset yang dilaksanakan Tim Pengurus Aset yang terbagi dalam 4 kuadran yaitu Kuadran I (Prioritas Utama), Kuadran II (Pertahankan Prestasi), Kuadran III (Prioritas Rendah), dan Kuadran IV (Berlebihan). Adapun penjelasan masing-masing kuadran diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Kuadran I (Prioritas Utama)

Pada kuadran I menunjukkan atribut yang dianggap penting oleh pengguna aset, akan tetapi pelaksanaan/kinerjanya dianggap tidak memuaskan atau tidak sesuai keinginan pengguna aset. Oleh karena itu Tim Pengurus Aset harus berkonsentrasi dan memprioritaskan peningkatan kinerjanya pada atribut-atribut yang ada di kuadran ini agar sesuai dengan keinginan dan harapan pengguna aset. Pada kuadran ini terdapat 3 atribut pengelolaan aset yang harus diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan, yaitu:

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran dilaksanakan dengan turut mempertimbangkan masukan para pegawai (A3);
- b. Penggunaan BMN dilaksanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi (A6); dan
- c. Penatausahaan BMN terdiri dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN (A15).

## 2. Kuadran II (Pertahankan Prestasi)

Kuadran II menunjukkan keberadaan atribut pengelolaan aset yang juga dianggap penting oleh pengguna aset dan kinerjanya sudah dianggap baik atau memuaskan. Oleh itu, Tim Pengurus Aset harus mempertahankan kinerja atribut ini agar tetap menjadi baik dan terus memenuhi apa yang menjadi harapan pengguna aset. Pada kuadran ini terdapat 10 atribut pengelolaan aset yang harus dipertahankan kinerjanya, antara lain:

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pengadaan BMN dengan memperhatikan kebutuhan organisasi (A1);
- b. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pemeliharaan BMN dengan memperhatikan kebutuhan organisasi (A2);
- c. Pengadaan BMN berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel (A4);
- d. Pengadaan BMN dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (A5);
- e. Pengamanan dilakukan dengan menjaga dan melindungi BMN yang meliputi pengamanan administrasi, fisik dan hukum (A8);
- f. Pemeliharaan BMN secara rutin, teratur, dan/atau sesuai kondisi yang ada (A9);
- g. Penilaian/revaluasi terhadap BMN untuk memperoleh nilai wajar dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat (A10);
- h. Penilaian terhadap BMN untuk memperoleh nilai wajar dalam rangka pemindahtanganan/penjualan BMN sesuai ketentuan yang berlaku (A11);
- i. Penghapusan (administratif) dari daftar barang terhadap BMN yang tidak lagi dalam penguasaan satuan kerja (A14); dan
- j. Pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN yang berada di dalam penguasaannya (A16).

## 3. Kuadran III (Prioritas Rendah)

Atribut-atribut pengelolaan aset pada Kuadran III merupakan atribut yang masuk dalam kategori prioritas rendah di mana pengguna aset tidak mempunyai harapan terlalu tinggi sehingga tingkat kepentingannya tidak mendapat penilaian yang tinggi dan kinerjanya

terbilang rendah/biasa-biasa saja, sehingga Tim Pengurus Aset tidak harus memberikan fokus perbaikan pada atribut yang ada dalam kuadran ini. Berikut terdapat 2 atribut yang berada dalam kuadran ini, yaitu:

- a. Pemanfaatan dalam bentuk sewa atas BMN yang tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi (A7); dan
- b. Pemusnahan fisik BMN karena tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipindah tangankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (A13).

#### 4. Kuadran IV (Berlebihan)

Kuadran IV merupakan kuadran terakhir dimana terdapat atribut yang dirasa sudah melebihi dari apa yang diinginkan oleh pengguna aset, karena atribut ini dianggap telah berkinerja tinggi namun memiliki tingkat kepentingan/harapan yang rendah. Pada kuadran ini terdapat 1 atribut pengelolaan aset yaitu: atribut pemindah tangangan terhadap BMN yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi (A12).

#### Tingkat Kepuasan Berdasarkan Hasil Analisis *Customer Satisfaction Index (CSI)*

Penggunaan analisis *Customer Satisfaction Index (CSI)* terhadap pengelolaan aset dimaksudkan untuk mengetahui besarnya indeks kepuasan pengguna aset terhadap kinerja Tim Pengurus Aset pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kepuasan pengguna aset terhadap kinerja pengelolaan aset diperoleh hasil hasil CSI sebesar 85,18%. Nilai tersebut berada pada selang angka 0,81 – 1,00 yang memiliki arti bahwa secara keseluruhan pengguna aset sangat puas dengan Tim Pengurus Aset dalam melakukan pengelolaan aset, dengan kata lain bahwa pengelolaan aset tersebut telah dilaksanakan dengan hasil yang sangat memuaskan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis pengelolaan aset dengan menggunakan metode *Importance Performance Analysis (IPA)* terdapat dua kuadran yang perlu mendapat perhatian yaitu Kuadran I dan Kuadran II dimana pada Kuadran I (Prioritas Utama) terdapat tiga atribut yang harus dilakukan perbaikan secara terus menerus oleh Tim Pengurus Aset yaitu:
  - a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran dilaksanakan dengan turut mempertimbangkan masukan para pegawai;
  - b. Penggunaan BMN dilaksanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi; dan
  - c. Penatausahaan BMN terdiri dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN.

Selanjutnya pada Kuadran II (Pertahankan Prestasi) dimana terdapat sepuluh atribut yang sudah berkinerja baik dan harus dipertahankan yaitu:

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pengadaan BMN dengan memperhatikan kebutuhan organisasi (A1);
  - b. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk pemeliharaan BMN dengan memperhatikan kebutuhan organisasi (A2);
  - c. Pengadaan BMN berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel (A4);
  - d. Pengadaan BMN dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (A5);
  - e. Pengamanan dilakukan dengan menjaga dan melindungi BMN yang meliputi pengamanan administrasi, fisik dan hukum (A8);
  - f. Pemeliharaan BMN secara rutin, teratur, dan/atau sesuai kondisi yang ada (A9);
  - g. Penilaian/revaluasi terhadap BMN untuk memperoleh nilai wajar dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat (A10);
  - h. Penilaian terhadap BMN untuk memperoleh nilai wajar dalam rangka pemindahtanganan/penjualan BMN sesuai ketentuan yang berlaku (A11);
  - i. Penghapusan (administratif) dari daftar barang terhadap BMN yang tidak lagi dalam penguasaan satuan kerja (A14); dan
  - j. Pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN yang berada di dalam penguasaannya (A16).
2. Berdasarkan metode analisis *Customer Satisfaction Index* (CSI), diperoleh hasil CSI terhadap seluruh atribut pengelolaan aset sebesar 85,18%. Nilai tersebut menandakan bahwa pengguna aset sangat puas atas pengelolaan aset yang dilakukan oleh Tim Pengurus Aset, dengan kata lain bahwa pengelolaan aset telah dilaksanakan dengan hasil yang sangat memuaskan.

### Saran

Meskipun secara keseluruhan kinerja Tim Pengurus Aset sudah masuk dalam kategori sangat memuaskan, namun demikian masih terdapat beberapa atribut yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan perbaikan pengelolaan aset terhadap atribut sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran dilaksanakan dengan turut mempertimbangkan masukan para pegawai (A3);
2. Penggunaan BMN dilaksanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi (A6); dan
3. Penatausahaan BMN terdiri dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN (A15).

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Payangan, Kristian. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Gedung Keuangan Negara Manado Dengan Menggunakan Metode Importance Performance Analysis (IPA)*. Tesis. Manado: Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- [2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- [4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- [5] Pardiman & Nuha, Muh. Ulin. 2009. *Penataan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang Tertib dan Akuntabel sesuai Kaidah-Kaidah Good Governance*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2330/PENATAAN-PENGELOLAAN-BARANG-MILIK-NEGARA-BMN.html>, diakses 19 November 2021.
- [6] Gaffar, Ismail. (2017). *Moderasi Sistem Informasi Pada Pengaruh Inventarisasi Aset, Sumber Daya Manusia Terhadap Optimalisasi Aset (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Di Wilayah Kerja KPKNL Makassar)*. Tesis. Makassar: Program Magister Akuntasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Makassar.
- [7] Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta
- [8] Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipata.
- [9] Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfa Beta.
- [10] Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- [11] Martilla, J. A. James. 1997. *Importance-Performance Analysis*. Journal Of Marketing 41 Pp 13-17.
- [12] Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra. 2016. *Service, Quality & satisfaction*. Yogyakarta: Andi.
- [13] Kotler & Keller. 2006. *Manajemen Pemasaran, Edisi 12 jilid 1, Terjemahan (Molan Benyamin)*. Indonesia: PT. Indeks.
- [14] Soemohadiwidjojo, Arini T. 2015. *Panduan Praktis Menyusun Key Performance Indicator (KPI)*. Cetakan I. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- [15] Aritonang, Lerbin R. 2005. *Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

## ANALISI PROGRAM DANA KELURAHAN DI KOTA KOTAMOBAGU (Studi Kelurahan di Kecamatan Kotamobagu Barat)

**Tito Saputra<sup>1</sup>, Een N. Walewangko<sup>2</sup>, George M.V Kawung<sup>3</sup>**

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: [titosaputra96@gmail.com](mailto:titosaputra96@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis program Dana Kelurahan dan Alokasi Dana Kelurahan terhadap kemiskinan di Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu. Data yang digunakan data Sekunder yang diambil dari Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat dan BPS Kota Kotamobagu terhitung tahun 2017-2021 dengan fokus penelitian enam kelurahan dikecamatan kotamobagu barat. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Variabel bebas yang terdiri dari atas Dana Keurahan (X1), Alokasi Dana Kelurahan (X2) dan Kemiskinan (Y) Variabel terikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dana kelurahan dan alokasi dana kelurahan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kecamatan kotamobagu barat, secara parsial dana kelurahan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kecamatan Kotamobagu Barat. Sedangkan alokasi dana kelurahan berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Kotamobagu Barat.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Tingkat Kemiskinan.

### ABSTRACT

*This study aims to determine the Kelurahan Fund Program Analysis and Kelurahan Fund Allocation to poverty in Kotamobagu Barat District, Kotamobagu City. The data used are Secondary data taken from the Kotamobagu Barat District Office and BPS Kotamobagu, City for the year 2017-2021 with a research focus on six sub-districts in the West Kotamobagu sub-district. The analytical method used in this study is the classical assumption test and multiple linear regression analysis. The independent variables consist of Village Funds (X1), Village Fund Allocations (X2) and Poverty (Y). The dependent variable. The results of this study indicate that simultaneously village funds and urban village fund allocations have a significant effect on the poverty rate of West Kotamobagu District, partially village funds have a significant effect on poverty rates of West Kotamobagu District. Meanwhile, the allocation of village funds has no significant effect on the level of poverty in Kotamobagu Barat District.*

**Keywords:** Village Fund, Village Fund Allocation, Poverty Level.

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun adalah masalah kemiskinan, karena tanpa adanya perhatian yang serius maka masalah kemiskinan akan membuat proses pembangunan dan transformasi akan banyak mengalami hambatan dengan timbulnya penyakit sosial ekonomi di dalam masyarakat. Untuk itu masalah kemiskinan harus tetap perlu diperhatikan secara serius karena mengingat tujuan utama dari pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Kemiskinan merupakan kensenjangan sosial yang kompleks di seluruh negara dengan melibatkan faktor-faktor yang saling berkaitan, antara lain: pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan (Todaro and Smith, 2008;18). Menurut Sudarsana dalam Annisa Tri Hastuti (2006) , Kemiskinan itu sendiri

mencakup beberapa faktor, yaitu (1) Kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal, (2) Gangguan dan tingginya resiko kesehatan, (3) Resiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya, (4) Kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tidak dapat hidup dengan layak, dan (5) Kekurangan dalam kehidupan sosial yang dapat ditunjukkan oleh keterselisihan sosial, keterselisihan dalam proses politik serta kualitas pendidikan yang rendah.

Menanggapi permasalahan tersebut, maka strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatasi masalah tersebut yaitu melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi dan memberi perhatian besar terhadap pembangunan kelurahan. Pembangunan kelurahan merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat kelurahan. Dalam mewujudkan pembangunan kelurahan pemerintah kelurahan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia, sehingga Indonesia memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kelurahan yang bersangkutan.

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Keluarga Miskin**  
**Kecamatan Kotamobagu Barat Tahun 2017-2021**

No	Kelurahan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Gogagoman	1120	1110	1119	1124	1115
2.	Kotamobagu	670	660	675	672	668
3.	Mogolaing	565	545	575	571	568
4.	Molinow	450	440	449	441	438
5.	Mongkonai	230	230	235	233	232
6.	Mongkonai Barat	247	240	254	250	249
<b>Total</b>		<b>3.282</b>	<b>3.225</b>	<b>3.307</b>	<b>3.29</b>	<b>3.27</b>
				1	0	

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu,2021 (data diolah)*

Keberadaan Kelurahan secara yuridis formal diakui di dalam Undang- Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Berdasarkan ketentuan ini Kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Pemahaman Kelurahan di atas menempatkan Kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur sendiri warga atau kepentingannya. Berdasarkan Peraturan Walikota kota kotamobagu No 75 Tahun 2017 pasal 13 menyebutkan bahwa Keuangan Kelurahan bersumber dari :

- a. APBD yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerahnya.
- b. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, dan bantuan pihak ketiga.
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan APBD yang merupakan salah satu sumber keuangan Kelurahan. Kelurahan juga merupakan satuan kecil pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat karena berada di wilayah masyarakat itu tinggal. Oleh karena itu, Kelurahan mempunyai hak sendiri untuk mengelola dan mengatur berbagai Anggaran Keuangan Kelurahan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Wujud dari program otonomi pengelolaan anggaran terdapat dalam bentuk Pengawatan Manajemen Kelurahan. Masing-masing Kelurahan ini diberi wewenang/otonomi pengelolaan Anggaran sendiri, ini merupakan implementasi dari konsep Otonomi Daerah.

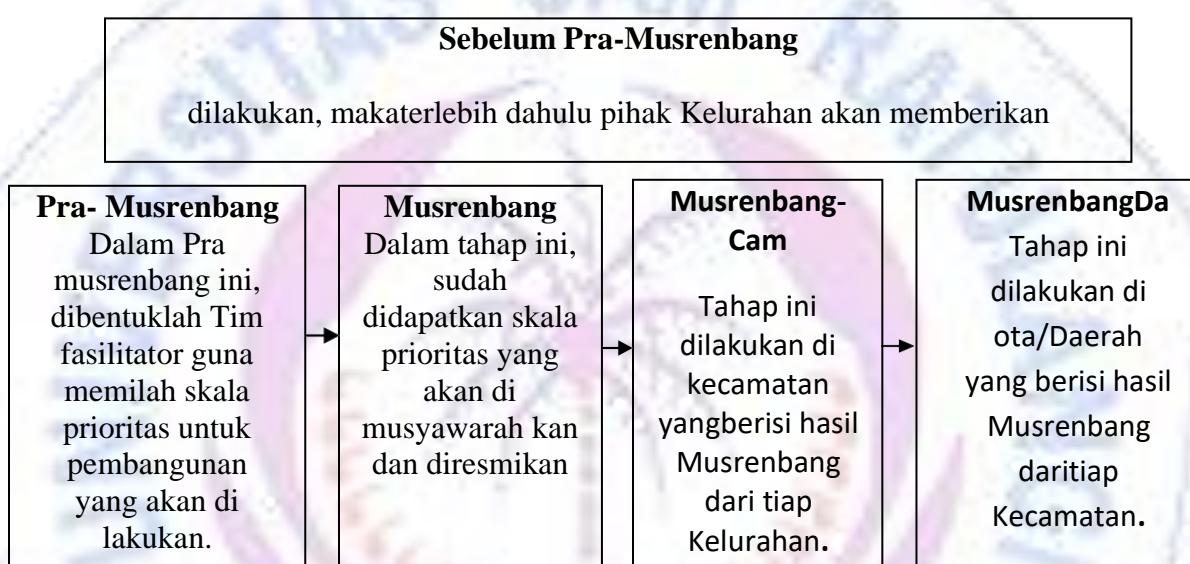
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu No. 75 Tahun 2017 mengenai Kelurahan yang bersumber dari APBD, Bantuan Pemerintah dan Bantuan yang tidak mengikat, maka Peneliti akan mengkhususkan penelitian ini hanya akan membahas mengenai dana Alokasi Kelurahan yang bersumber dari APBD Kota Kotamobagu atau yang disebut juga dengan Alokasi dana Kelurahan . Hal ini dikarenakan dana Alokasi ini sudah pasti ada dalam setiap tahunnya, yang mana Alokasi dana Kelurahan ini digunakan untuk kebutuhan Operasional Perangkat Kelurahan dan berbagai Program serta Kegiatan dari Kelurahan itu sendiri.

Proses otonomi pengelolaan Dana Kelurahan di mulai dari Rencana kerja yang dibuat oleh Kasi (Kepala Seksi) yang ada di Kelurahan dan isinya mencakup Musrenbang atau Musyawarah rencana pembangunan yang merupakan wadah bagi aspirasi dari lapisan elemen masyarakat seperti RT, RW, dan tokoh masyarakat serta mitra kerja yang berada dalam kawasan Kelurahan Rencana Kerja Kelurahan ini kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan. Dari tingkat kecamatan ini kemudian digunakan sebagai bahan untuk menyusun RKA-SKPD (Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Penyusunan RKA-SKPD ini dilakukan di BAPEDA (Badan Perencanaan Daerah) Kota Kotamobagu dan Dalam penyusunan RKA-SKPD ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Kelurahan tersebut. Setelah

disetujui dan ketok palu, maka disebut DPA atau Dana Pengguna Anggaran yang dapat di ambil di Badan Keuangan Daerah atau DPPKD Kota.

Rencana pembangunan Fisik dibuat berdasarkan permintaan dalam Musyawarah saat Musrenbangkel dengan warga yang kebanyakan menginginkan pembangunan fisik agar lebih ditingkatkan. Sehingga, pada akhirnya, Pembangunan fisik yang lebih diprioritaskan dari pada kegiatan non fisik yang sebenarnya jika berjalan baik akan memberikan manfaat yang besar bagi warga karena dapat membuat masyarakat mandiri dan mampu meningkatkan ekonomi keluarg

**Gambar 1.1**  
**Alur Tahapan Musrenbang**  
**(Musyawarah Rencana Pembangunan)**



(sumber : LPPKel 2021)

Oleh karena itu penelitian ini akan melihat seberapa pengaruh program dana kelurahan dan alokasi dana terhadap penaggulangan kemiskinan di kecamatan kotamobagu barat kota kotamobagu.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh dana kelurahan terhadap kemiskinan di Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu ?
2. Bagaimana pengaruh alokasi dana kelurahan terhadap kemiskinan di Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu ?
3. Bagaimana pengaruh dan kelurahan serta alokasi dana kelurahan terhadap kemiskinan di Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu?

### Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pengaruh Dana Kelurahan terhadap Kemiskinan di Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu.

2. Mengetahui Pengaruh Alokasi Dana Kelurahan terhadap Kemiskinan di Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu.

3. Mengetahui Pengaruh Dana Kelurahan dan Alokasi Dana Kelurahan di Kecamatan Kotamobagu Barat kota Kotamobagu.

### **Manfaat Penelitian**

1. Dapat memberikan masukan Penting kepada Pemerintah, utamanya tentang pengaruh dana kelurahan dan alokasi dana kelurahan untuk penyelesaian masalah kemiskinan di Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu.

2. Dapat menjadi sumber Informasi dan pengetahuan untuk penelitian – penelitian selanjutnya

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Teori Perencanaan Pembangunan**

Menurut Todaro (1986) Perencanaan pembangunan adalah usaha secara sadar yang dilakukan oleh suatu organisasi ( misalnya pemerintah ) guna mempengaruhi, mengarahkan serta mengendalikan perubahan variable – variable pembangunan dari suatu negara atau wilayah selama kurun waktu sesuai dengan serangkaian tujuan – tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **Pengertian Dana Kelurahan**

Alokasi dana kelurahan merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan otonomi dan desentralisasi di tingkat kelurahan, pelaksanaan kebijakan alokasi dan kelurahan yang sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk mengembangkan pemerintahan kelurahan yang mandiri dan mampu menjalankan fungsi desentralisasi. Dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 75 tahun 2017 tentang alokasi dana kelurahan merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Kotamobagu kepada Pemerintah Kelurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

#### **Pengertian Alokasi Dana Kelurahan**

Alokasi Dana Kelurahan (ADK) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD. Alokasi dana kelurahan merupakan dana yang cukup signifikan bagi kelurahan untuk menunjang program-program kelurahan. Dalam Peraturan disebutkan bahwa bagian dari dana pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk kelurahan secara proporsional yang merupakan alokasi dana kelurahan

Alokasi dana kelurahan pada hakikatnya merupakan wujud dari pemenuhan hak kelurahan untuk meyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan kelurahan itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena kelurahan mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian Yuliastri, Henny dkk (2020). yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Studi: Analisis Kebijakan Pengelolaan Dana Kelurahan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Bertujuan untuk melihat 1. mengkaji dan menganalisis kebijakan pengelolaan alokasi dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat di kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan Data Primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari responden dan Data Sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Adapun Metode Analisi yang digunakan Analisis statistic deskriptif kualitatif. . Hasil dari penelitian ini adalah diungkapkan bahwa dalam pengelolaan dana kelurahan kadang terjadi penyerapan anggaran yang kurang optimal yang disebabkan pada tahap pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan fisik, terbatasnya waktu sehingga menyebabkan anggaran tidak dapat diproses untuk dicairkan.

Penelitian Tobing, Artha Lbn. (2019). yang berjudul Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Kelurahan Ditinjau Dari Segi Implementasi Kebijakan di Kelurahan Tangkahan Martubung. Bertujuan untuk melihat, 1. implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan, 2. untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan alokasi dana kelurahan di Kelurahan Tangkahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan.. Penelitian ini menggunakan melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi. Adapun Metode Analisi yang digunakan Analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan dana kelurahan yang bersumber dari anggaran Kabupaten/kota cenderung belum optimal digunakan untuk mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan kelurahan.

Penelitian Prasetyo, Zahnudin Nurhidayatullah Dwi dkk (2014). yang berjudul Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Malawele Kabupaten Sorong. Bertujuan untuk melihat, implementasi Alokasi Dana Kelurahan yang dilihat dari indicator pengorganisasian, interperensi dan aplikasi, serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses implementasi alokasi dana Kelurahan di Kelurahan Malawele Kabupaten Sorong, dilihat dari hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan. Penelitian ini menggunakan

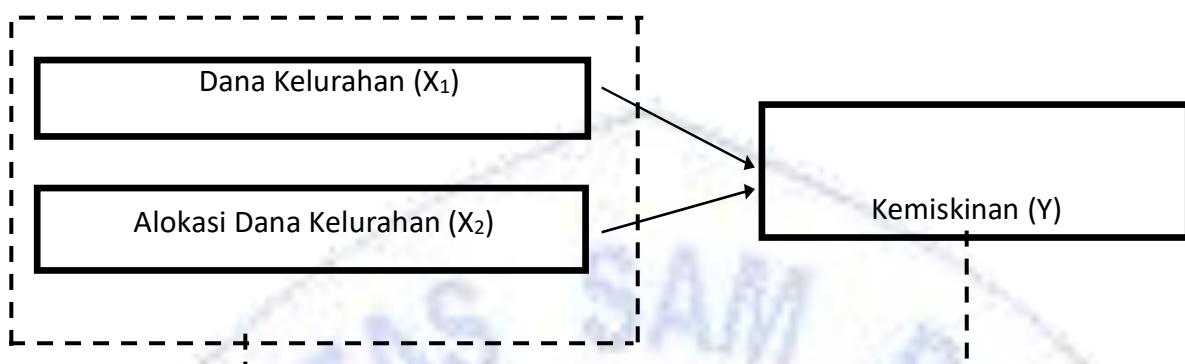
Data hasil dari Studi Pustaka, Observasi, dan Wawancara. Adapun Metode Analisi yang digunakan Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah proses implementasi alokasi dana Kelurahan di Kelurahan Malawele belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan social ekonomi masyarakat Kelurahan.

Penelitian Gita Farah Meidiana (2019). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Kelurahan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Bertujuan untuk melihat, menganalisa implementasi pemanfaatan kebijakan dana kelurahan dalam peningkatan pelayanan publik, menganalisis faktor penghambat dan pendukung, serta cara yang dilakukan dalam mengatasi kendala, dilihat dari hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan. Penelitian ini menggunakan Data Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Adapun Metode Analisi yang digunakan Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini Dana kelurahan sangat membantu dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal di Kelurahan Pagentan sehingga masyarakat merasa puas atas kinerja dari pemerintah dan dapat disimpulkan bahwa ukuran dan tujuan implementasi dana kelurahan dalam peningkatan pelayanan publik di Kelurahan Pagentan berjalan dengan baik yang diimbangi dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Penelitian Jordan Saputra Sempo dkk (2018). Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado. Bertujuan untuk melihat, Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado. Penelitian ini menggunakan Data Wawancara, Studi empirik, dan Observasi. Adapun Metode Analisi yang digunakan Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Malalayang Kecamatan Malalayang Kota Manado dinilai Belum Maksimal, hal ini dikarenakan masih ditemukannya masalah-masalah dalam proses Perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan.

## Kerangka Pikir

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



*Sumber : Kajian teori (diolah penulis)*

## Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (Sujarwani,2019:68).

Hipotesa dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga bahwa dana kelurahan berpengaruh terhadap kemiskinan di kota kotamobagu.
2. Diduga bahwa alokasi dana kelurahan terhadap kemiskinan di kota kotamobagu.
3. Diduga bahwa dana kelurahan dan alokasi dana kelurahan berpengaruh terhadap kemiskinan di kota kotamobagu

## 2. METODE PENELITIAN

### Data Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti dapat mencari melalui sumbernya. dengan kata lain, data sekunder di dapat dari dokumen-dokumen atau penelitian penelitian terdahulu yang datanya sudah tersusun. Data sekunder yang digunakan bersumber dari BPS Kota Kotamobagu untuk data kemiskinan dan Kantor Kecamatan Kotamobahu Barat untuk data dana kelurahan dan alokasi dana kelurahan. Pengambilan dari sumber BPS karena merupakan lembaga survei yang independen dan obyektif. Jenis data yang digunakan adalah berbentuk *panel* tahun 2017-2021.

### Metode Pengumpulan Data

#### Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar

yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini data dokumen yang di dapat penulis yaitu data-data yang berhubungan dengan dana kelurahan, alokasi dana kelurahan dan kemiskinan di Kecamatan Kotamobagu Barat.

## Studi Pustaka

Teknik kepustakaan menurut Kartini Hartono (1998:141) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Penelitian kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini yaitu tentang penggunaan teori-teori yang ada untuk menganalisis data.

## Populasi dan Sampel

### Populasi

Menurut Kuncoro (2013:188) Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian. Yang akan diambil dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dan diambil melalui data Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kotamobagu, Kelurahan di Kota Kotamobagu, BPS Kota Kotamobagu dan Kantor Kecamatan kotamobagu Barat berdasarkan jangka waktu tentang dana kelurahan, alokasi dana kelurahan dan kemiskinan.

### Sample

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian Wiratna Sujarweni (2015:81). Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik yang menentukan sampel dalam pertimbangan atau kriteria tertentu, Suharmis. A (2013:183). Dalam hal ini penulis menggunakan sampel data Dana Kelurahan, Alokasi Dana Kelurahan dan Kemiskinan pada 6 Kelurahan di Kecamatan Kotamobagu Barat pada tahun 2017-2021. Berikut data jumlah 6 Kelurahan di Kecamatan Kotamobagu Barat :

**Tabel 3.1 Jumlah Kelurahan  
Kecamatan Kotamobagu Barat 2021**

No.	Kelurahan
1.	Gogagoman
2.	Kotamobagu
3.	Mogolaing
4.	Molinow
5.	Mongkonai
6.	Mongkonai Barat

*Sumber : BPS Kota Kotamobagu 2021 (data diolah)*

### Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Untuk menghindari perbedaan penafsiran maka akan dijelaskan definisi masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemiskinan sedangkan dana kelurahan dan alokasi dana kelurahan merupakan variabel- variabel bebas. Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Dana Kelurahan (X1)

Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD yang diperuntukkan untuk kelurahan yang ditransfer untuk kesejahteraan masyarakat kelurahan di kecamatan kotamobagu barat.

#### 2. Alokasi Dana Kelurahan (X2)

Dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk kelurahan yang bersumber dari bagian dana keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kota/kabupaten.

#### 3. Kemiskinan (dependent variabel) (Y)

Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi standar minimum kebutuhan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Dalam penelitian ini yaitu menggunakan data BPS kemiskinan di Kecamatan Kotamobagu Barat tahun 2017-2021.

### Metode Analisis Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklarifikasi. Menimbang dan menyaring data adalah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan, yaitu menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah;
2. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah;

3. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur berulang, sehingga mudah dipahami;
4. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka di perlukan pengujian yaitu :

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak.<sup>84</sup> Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov satu arah. Dalam buku ghozali untuk mendeteksi normalitas data juga diuji dengan uji Kolmogorov Smirnov dilihat dari nilai residual yang dihasilkan diatas nilai signifikan yang ditetapkan. Dengan pengambilan keputusan:

- a) Jika  $Sign > 0,05$  maka data berdistribusi normal
- b) Jika  $Sign < 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

#### **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memilik kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Dan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen), apabila terjadi korelasi antara variabel bebas maka terdapat problem multikolinieritas (multiko).

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka di sebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.<sup>87</sup> Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi adanya atau tidaknya heteroskedastisitas dapat di ketahui dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dimana sumbu Y adalah Y yang telah di prediksi, dan sumbu X adalah Residual (Y prediksi -Y sesungguhnya).

#### **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat korelasi antara sesama variabel bebas yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode sebelumnya (t-1).

### Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda pada umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear. Pengaruh variabel independen (karena umumnya ada korelasi antara variabel independen), dalam analisis regresi berganda dapat diukur secara terpisah dan secara bersama-sama terhadap konstruk variable.

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk melihat prediksi nilai dari Dana Kelurahan (X1) dan Alokasi Dana Kelurahan (X2) terhadap tingkat Kemiskinan (Y) di Kecamatan Kotamobagu Barat, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen (X1 dan X2) dengan variabel dependen (Y). Jika tidak terdapat pola yang jelas, sebaran data di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas yaitu model regresi yang homokedastisitas.

Model persamaannya adalah sebagai berikut :

Analisis regresi berganda  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$  Dimana :

Y = Kemiskinan

a = Konstanta

X1 = Dana Kelurahan

X2 = Alokasi Dana Kelurahan

b1 = Koefisien regresi Dana Kelurahan

b2 = Koefisien regresi Alokasi Dana Kelurahan

e = Error term Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik. Oleh karena itu, setiap data konstruk variabel harus terlebih dahulu diuji normalitasnya. Statistik parametrik menurut (Ghozali & Ikhsan 1990 : 257) merupakan uji yang modelnya yang menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang merupakan sumber sampel penelitiannya. Syarat-syarat itu biasanya tidak diuji dan dianggap sudah dipenuhi. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) 0,05 atau 5% untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak dengan cara menguji nilai F. Untuk menguji masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap tingkat kemiskinan dilakukan dengan menguji nilai t dengan uji dua sisi pada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 atau 5%. Kriteria pengujian yang digunakan adalah menerima hipotesis jika nilai t hasil perhitungan adalah positif signifikan

## Uji Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara dari suatu masalah dan merupakan penuntun untuk melakukan penelitian. Apabila uji statistik berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  di tolak), pengujian tersebut bermakna signifikan. Sedangkan disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima.

## Uji F Statistik

Uji F-statistik ini dilakukan untuk melihat pengaruh variable independen terhadap variabel dependen secara serentak. Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak artinya variabel dependen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dan jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima artinya variabel Independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen. Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus :

$$F - Hitung = \frac{R^2 / k - 1}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Di mana :

$R^2$  = Koefisien determinasi

$k$  = Jumlah variabel independen

$n$  = Jumlah sampel

## Uji t Statistik

Uji t-statistik merupakan suatu pengujian yang betujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi berganda signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variable independen lainnya konstan. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengujian adalah menyusun hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) dengan taraf nyata ( $\alpha$ ) yang biasadigunakan adalah 5% atau 0,05. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai  $sig \alpha$  (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika  $sig > 0,05$  maka  $H_0$  diterima
- Jika  $sig < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak

## Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi (*goodness of fit*), yang dinotasikan dengan  $R^2$  merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinan ( $R^2$ ) Mencerminkan kemampuan variabel *dependen*. Nilai  $R^2$  menunjukkan seberapa besar pengaruh proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai  $R^2$  menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel *dependen*.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

##### Uji Asumsi Klasik

###### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi data dengan normal. Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana apabila Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi dengan normal dan sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi dengan normal. Hasil analisis terhadap asumsi normalitas dengan *one sample kolmogorov smirnov* dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean Std.	.0000000 .34972148
	Deviation	.160
	Absolute	.117
Most Extreme Differences	Positive	-.160
	Negative	.962
Kolmogorov-Smirnov Z		.313
Asymp. Sig. (2-tailed)		

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

*Sumber: Output SPSS (data diolah)*

Dari output diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikan (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,313. Karena signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi dengan normal.

#### Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat terdapat gangguan atau tidak terhadap data di mana multikolinearitas terjadi apabila ada korelasi antar variabel independen. Dengan demikian

uji ini dilakukan agar data yang ada harus terbebas dari gangguan multikolinearitas dapat dilihat pada tabel kolom variance inflation factor (VIF) dan tolerance. Adapun hasil dari pengolahan data adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	1 1.031	5.27 2		2. 092	.044		
Dana Kelurahan	.4 .99	.179	.705	2. 781	.009	.381 .628	2. 628
Alokasi Dana Kelurahan	- .726	.371	-.496	- 1.956	.059	.381 .628	2. 628

Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Output SPSS (data diolah)

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel coefisien (nilai tollerance dan VIF). Dari output diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF berkisaran dari 10 dan nilai tollerance berkisaran 0,1 untuk kedua variabel / nilai tolerance kurang dari 1 dan nilai VIF lebih dari 1.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa nilai VIF variabel X1 sebesar 2,628. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat korelasi antara sesama variabel bebas yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Untuk mengetahui terdapat atau tidaknya masalah autokerelasi dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelas**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1 9 <sup>a</sup>	.43	.193	.144	.36016	2.193

a. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Kelurahan, Dana Kelurahan

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Output SPSS (data diolah)

Nilai durbin waston dapat dilihat pada tabel diatas (kolom durbin waston). Nilai durbin waston sebesar 2.193, sedangkan dari tabel dw dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data n=36 serta k=2. Diperoleh nilai dl sebesar 1.3537 dan du sebesar 1.5872. Karena nilai dw 2,193 berada pada daerah lebih dari (>) dl, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser yaitu dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikan antara variabel independen dengan absolut residual  $> 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.603	2.183		1.650	.108
Dana Kelurahan	.056	.074	.206	.755	.456
Alokasi Dana Kelurahan	-.215	.154	-.382	-1.400	.171

a. Dependent Variable: ABS\_RES

*Sumber: Output SPSS (data diolah)*

Dari output diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk dana kelurahan sebesar 0,456 dan alokasi dana kelurahan sebesar 0.171 karena signifikansi lebih dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa modelregresi tidak ada masalah heteroskedastisitas.

### Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Regresi berganda berguna untuk du variabel predictor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan yang fungsional antara dua variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). analisis regresi berganda pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dana kelurahan dan alokasi dana kelurahan tahun 2017-2021 di Kecamatan Kotamobagu Barat. Adapun formulasi persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Hasil regresi berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil regresi linier berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.03	5.272		2.092	.044
Dana Kelurahan	.499	.179	.705	2.781	.009
Alokasi Dana Kelurahan	-.726	.371	-.496	-1.956	.059

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Output SPSS (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas formula yang didapat dari hasil uji regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 11,031 + 0,499 - 0,726 + e$$

Dimana

$$a = \text{Konstanta} = 11,031$$

$$X_1 = \text{Dana Kelurahan} \quad b_1 = 0,499$$

$$X_2 = \text{Alokasi Dana Kelurahan} \quad b_2 = -0,726$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linier berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut:

- Berdasarkan persamaan regresi linier berganda. Nilai konstanta mempunyai yaitu sebesar 11,031 pada persamaan regresi menunjukkan apabila variable independen nilainya 0, maka variabel kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 11,031%.
- Koefisien regresi  $X_1$  (dana kelurahan) sebesar 0,499 artinya jika dana kelurahan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan ( $Y$ ) akan mengalami penurunan sebesar 0,499. Koefisien bernilai positif antara dana kelurahan dengan tingkat kemiskinan. Jika dana kelurahan meningkat maka tingkat kemiskinan akan semakin tinggi pula.
- Koefisien regresi  $X_2$  (alokasi dana kelurahan) sebesar -0,726 artinya jika alokasi dana kelurahan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan ( $Y$ ) akan meningkat sebesar -0,726. Koefisien bernilai negatif berarti terjadi hubungan yang tidak positif antara alokasi dana kelurahan dengan tingkat kemiskinan yang menyatakan bahwa

apabila variabel alokasi dana kelurahan semakin tinggi maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan.

## Hasil Uji Hipotesis

### Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing- masing variabel independen (dana kelurahan dan alokasi dana kelurahan) secara individual dalam menerangkan variabel dependen (kemiskinan). Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi adalah sebesar 0,05.<sup>95</sup> Keputusan penerimaan hipotesis atau penolakannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1, H_2$  ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini membuktikan bahwa secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1, H_2$  diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji T**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	11.031	5.272		2.092	.044
Dana Kelurahan	.499	.179	.705	2.781	.009
Alokasi Dana Kelurahan	-.726	.371	-.496	-1.956	.059

a. Dependent Variable: Kemiskinan

*Sumber: Output SPSS (data diolah)*

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada tabel diperoleh:

- a) Variabel dana kelurahan ( $X_1$ )

Variabel dana kelurahan ( $X_1$ ) mempunyai t hitung yakni 2.781 dan nilai signifikansi sebesar 0,009. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansinya. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,009 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan taraf kepercayaan variabel dana kelurahan ( $X_1$ ) 95% memiliki pengaruh terhadap variabel kemiskinan ( $Y$ ). Hal ini berarti semakin tinggi atau

rendahnya jumlah dana kelurahan maka akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan.

b) Variabel alokasi dana kelurahan (X2)

Variabel alokasi dana kelurahan (X1) mempunyai t hitung yakni -1.956 dan nilai signifikansi sebesar 0,059. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansinya. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,059 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Secara parsial memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan taraf kepercayaan variabel alokasi dana kelurahan (X1) 95% tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kemiskinan (Y). Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya jumlah alokasi dana kelurahan maka tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan.

### Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F merupakan suatu pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.<sup>96</sup> Kriterianya adalah:

- 1) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima.
- 2) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak.

Apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima yang artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.11**

**Hasil uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1.022	2	.511	3.938	.029 <sup>b</sup>
Residual	4.281	33	.130		
Total	5.302	35			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Kelurahan, Dana Kelurahan

*Sumber: Output SPSS (data diolah)*

Adapun hasil dalam pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.13 diatas. Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau ditolak, terlebih dahulu menentukan F tabel dengan signifikan 5% = 0,05 (uji 2 sisi) dan derajat kebebasan  $df_1 (N_1) =$  jumlah variabel (variabel bebas + terikat)-1 atau  $3-1 = 2$  sedangkan  $df_2 (N_2) = n-k$  (variabel bebas)-1 atau  $36-2-1=33$ . Hasil diperoleh F tabel sebesar 3,28.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada tabel 4.14 diperoleh F hitung yakni 3.938 dan nilai signifikan sebesar 0,029. Hasil penelitian diperoleh nilai F hitung  $3.938 > 3,28$  dan nilai signifikan sebesar  $0,029 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima yang artinya variabel independen (dana kelurahan dana alokasi dana kelurahan) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (kemiskinan). Maka dengan kata lain variabel-variabel independen memiliki taraf kepercayaan 95% mampu menjelaskan besarnya variabel dependen yaitu variabel kemiskinan.

### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel- variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen (dana kelurahan dan alokasi dana kelurahan) terhadap variabel dependen (kemiskinan). Adapun hasil perhitungannya adalah :

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

Mo del	R	R Square	Adjusted RSquare	Std. Error of the Estimate
1	.439 <sup>a</sup>	.193	.144	.36016

a. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Kelurahan, Dana Kelurahan

*Sumber: Output SPSS (data diolah)*

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui hasil uji koefisien determinasi pada output model summary dari analisis regresi berganda tepatnya kolom R Square sebesar 0,193. Jadi pengaruh dana kelurahan dana alokasi dana kelurahan terhadap tingkat kemiskinan yaitu sebesar 19,3% sedangkan sisanya 80,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian.

### Pembahasan

#### **Pengaruh Secara Parsial Jumlah Dana Kelurahan dan Jumlah Alokasi Dana Kelurahan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Kotamobagu Barat Tahun 2017-2021**

Pengaruh secara parsial merupakan pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen, yaitu untuk melihat pengaruh variabel jumlah dana kelurahan dan

jumlah alokasi dana kelurahan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan kotamobagu barat tahun 2017-2021, akan diuraikan sebagai berikut:

**a. Pengaruh Jumlah Dana Kelurahan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Kotamobagu Barat Tahun 2017-2021**

Pembahasan pengaruh jumlah dana kelurahan terhadap tingkat kemiskinan di kecamatan kotamobagu barat dari tahun 2017 hingga 2021 yang diolah menggunakan program SPSS 21 menunjukkan bahwa angka koefisien regresi X1 (dana Kelurahan) sebesar 0,499 artinya jika jumlah dana kelurahan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,499. Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan antara dana kelurahan dengan tingkat kemiskinan. Jika jumlah dana kelurahan meningkat maka tingkat kemiskinan akan semakin tinggi pula.

Adapun secara parsial diketahui untuk variabel dana kelurahan (X1) mempunyai t hitung yakni 2.781 dan nilai signifikan sebesar 0,009. Keputusan pengambilan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansinya. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,009 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan taraf kepercayaan variabel dana kelurahan (X1) 95% memiliki pengaruh terhadap variabel kemiskinan (Y). Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya jumlah dana kelurahan maka akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan. Hasil penelitian diatas mengindikasikan bahwa dana kelurahan telah berjalan sesuai dengan tujuan.

**b. Pengaruh Jumlah Alokasi Dana Kelurahan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Kotamobagu Barat Tahun 2017-2021**

Pembahasan pengaruh jumlah alokasi dana kelurahan terhadap tingkat kemiskinan di kecamatan Kotamobagu Barat dari tahun 2017 hingga 2021 yang diolah menggunakan program SPSS 21 menunjukkan bahwa angka koefisien regresi X2 (alokasi dana kelurahan) sebesar -0,726 artinya jika alokasi dana kelurahan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan (Y) akan meningkat sebesar -0,726. Koefisien bernilai negatif berarti terjadi hubungan yang tidak positif antara jumlah alokasi dana kelurahan dengan tingkat kemiskinan. Jika jumlah alokasi dana kelurahan meningkat maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan.

Adapun secara parsial diketahui untuk variabel alokasi dana kelurahan (X2) mempunyai t hitung yakni -1,956 dan nilai signifikan sebesar 0,059. Keputusan pengambilan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansinya. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,059 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak. Secara parsial memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan

taraf kepercayaan variabel alokasi dana kelurahan (X2) 95% tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kemiskinan (Y). Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya jumlah alokasi dana kelurahan maka tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan.

## **2 Pengaruh Secara Simultan Jumlah Dana Kelurahan dan Jumlah Alokasi Dana Kelurahan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Kotamobagu Barat Tahun 2017-2021**

Hasil penelitian diperoleh nilai F hitung yakni 3.938 dan nilai signifikan sebesar 0,029. Hasil penelitian diperoleh nilai F hitung  $3.938 > 3,28$  dan nilai signifikan sebesar  $0,029 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima yang artinya variabel independen (dana kelurahan dan alokasi dana kelurahan) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (kemiskinan). Maka dengan kata lain variabel-variabel independen memiliki taraf kepercayaan 95% mampu menjelaskan besarnya variabel dependen yaitu variabel kemiskinan.

Sedangkan, dari hasil analisis menunjukkan bahwa hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada output model summary dari analisis regresi berganda tepatnya kolom R Square sebesar 0,193. Jadi pengaruh dana kelurahan dana alokasi dana kelurahan terhadap tingkat kemiskinan yaitu sebesar 19,3% sedangkan sisanya 80,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian.

Dari data yang telah dikumpulkan oleh penulis diketahui bahwa besaran jumlah dana kelurahan di Kecamatan kecamatan kotamobagu barat selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pada tahun 2017 jumlah dana kelurahan adalah sebesar Rp 700.000.000, tahun 2018 sebesar Rp 500.000.000, tahun 2019 sebesar Rp 54.000.000, tahun 2020 sebesar Rp 400.000.000 dan kemudian pada tahun 2021 sebesar Rp 300.000.000., dana kelurahan tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan kelurahan.

Seiring dengan besarnya jumlah dana kelurahan dan alokasi dana kelurahan juga telah berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan di Kecamatan Kotamobagu Barat meskipun angkanya masih fluktuatif turun. Berdasarkan data yang telah diambil dari BPS Kota Kotamobagu pada tahun 2017 jumlah keluarga miskin mencapai 3.282 jiwa, selanjutnya pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3.225 jiwa, pada tahun 2019 naik menjadi 3.307, pada tahun 2020 menurun menjadi 3.291 dan kemudian pada tahun 2021 mencapai angka terendah selama kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu sebesar 3.270 jiwa. Jumlah anggaran dana kelurahan dan alokasi dana kelurahan sangatlah besar, maka keduanya mempunyai potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan tujuannya yaitu menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

1. Hasil penelitian secara parsial variabel jumlah dana kelurahan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Kotamobagu Barat tahun 2017-2021. Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya jumlah dana kelurahan maka akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan Kecamatan Kotamobagu Barat, sehingga terdapat kesesuaian dengan tujuan Perwako nomor 75 Tahun 2017. Namun masyarakat mengatakan bahwa jumlah dana kelurahan tidak ada pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan, hal ini disebabkan oleh penggunaan dana kelurahan hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas.
2. Hasil penelitian secara parsial variabel alokasi dana kelurahan berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan kotamobagu barat tahun 2017-2021. Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya jumlah alokasi dana kelurahan maka tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan Kecamatan kotamobagu barat. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggaran alokasi dana kelurahan masih kecil dan penggunaan alokasi dana kelurahan tersebut hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas. Maka terdapat ketidaksesuaian dengan tujuan dari Permendagri Nomor 73 Tahun 2005.
3. Hasil penelitian secara simultan variabel jumlah dana kelurahan dan jumlah alokasi dana kelurahan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan kotamobagu barat tahun 2017-2021. Secara bersama-sama pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 19,3%, sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain. Maka terdapat kesesuaian dengan Perwako Nomor 75 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2005 bahwa secara garis besar tujuan dari kebijakan dana kelurahan dan alokasi dana kelurahan adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar kelurahan.

##### Saran

1. Untuk pemerintah ataupun instansi terkait kedepan diperlukan kesiapan kelurahan melalui penguatan kapasitas SDM, selain itu pemerintah juga perlu melakukan pembinaan, pendampingan, dan pemantauan yang lebih terarah dan berkesinambungan kepada kelurahan. Di sisi lain, diperlukan penguatan kordinasi, konsolidasi dan sinergi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan kelurahan dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota, Kecamatan hingga tingkat kelurahan.
2. Untuk akademisi ataupun bagi instansi terkait perlu diadakan penelitian selanjutnya untuk penyempurnaan penelitian ini dengan menambah jumlah sampel data yang akan diteliti dan memperpanjang waktu periode penelitian agar hasil yang didapatkan akurat dan bervariasi. Selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian mengenai seberapa besar dampak dari

aspek kebijakan dana kelurahan dan alokasi dana kelurahan untuk mengentaskan kemiskinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- 2014. Undang- Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Annisa Tri Hastuti,2016, Analisis Kemiskinan dan Ketersediaan Infrastruktur di Pedesaan Kawasan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas. BPS Kota Kotamobagu Tahun 2021
- LPPKec Tahun 2021
- LPPKel. Tahun 2021
- Kartini Hartono, *Pengantar Metodologi Research* Bandung: Kencana, 1998.
- Mudjarat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi Keempat* Jakarta: Erlangga, 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
- Peraturan Walikota kota kotamobagu No 75 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pengelolaan dana alokasi kelurahan kota kotamobagu
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharmis Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Todaro, M. P. (2008). Pembangunan Ekonomi (Jilid 1) (Edisi 9). Edisi Kesembilan Terjemahan Oleh Haris Munandar Dan Puji AL. Jakarta: Erlangga
- Todaro, Michael. P, 1986, Perencanaan Pembangunan: Model dan Metode, Jakarta: Intermedia.
- Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

## ANALISIS KREDIT PERBANKAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI UTARA

**Ivone Deasy Anneke Goni, Tri Oldy Rotinsulu, Mauna Th. B. Maramis**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis,*

*Program Studi Magister Ilmu Ekonomi*

*Universitas Sam Ratulangi*

*Email: [Ivonegoni061@student.unsrat.ac.id](mailto:Ivonegoni061@student.unsrat.ac.id)*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kredit perbankan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Masalah pokok yang terjadi dalam perekonomian pada saat ini adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih berfluktuasi.

Salah satu gambaran perkembangan perekonomian daerah biasanya diukur dari perkembangan pertumbuhan ekonomi, yang dipicu oleh beberapa faktor termasuk kreditperbankan.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh berdasarkan data yang tersedia dan bersumber dari laporan Badan Pusat Statistik. Data yang terakup dalam penelitian ini adalah data Pertumbuhan Ekonomi, Kredit Konsumsi, Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi dari Tahun 1992-2021, dengan metode analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama kredit konsumsi, kredit modal kerja, kredit investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Secara parsial kredit modal kerja dan kredit investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara, sedangkan untuk kredit konsumsi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.

**Kata kunci :** Pertumbuhan ekonomi, Kredit Konsumsi, Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi

### ABSTRACT

*This study attempts to Bank credit analysis on the economic development in North Sulawesi. Basic economic problems there is growing still fluctuating.*

*One of the local economy in terms of economic growth. And it is in the trigger by a factor of bank credit. As for the data used in this research was secondary data obtained based on the data available and comes in a report to the central of statistics. The data included in this research was Economic Growth, Consumtif Credit, Working Capital Credit, Invesment Credit .Its object was north sulawesi (1992-2001). By using the method Multiple Regression.*

*The research findings that consumptive credit, working capital credit, and investment credit simultaneously influences economic growth in North Sulawesi. Partially, working capital credit and investment credit has significant influences, while consumptive credit not significant influences on economic growth in North Sulawesi.*

**Keywords :** *Economy Growth, Consumtif Credit, Working Capital Credit, InvestmentCredit*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat mengindikasikan prestasi dan perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah itu dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif, menandakan kegiatan ekonomi di daerah tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang

negatif, menandakan bahwa kegiatan ekonomi di daerah tersebut mengalami penurunan (Sukirno, 2015).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu sistem dari aktivitas perekonomian yang memiliki kondisi perubahan-perubahan dari waktu ke waktu sehingga produksi barang dan jasa akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya meliputi beberapa interaksi dari komponen sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi, dan lain-lain yang bersangkutan. Suatu Pertumbuhan harus mencerminkan perubahan secara total masyarakat atau kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik secara sosial, maupun material (Todaro, 2011).

Perkembangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar minus (-2,07 %). Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Dengan kondisi yang kurang stabil ini, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai macam kebijakan guna mengurangi mata rantai penyebaran covid-19, tetapi dalam jalannya kebijakan terjadi hambatan-hambatan sistem termasuk berkurangnya jumlah konsumsi rumah tangga dan konsumsi non Lembaga profit yang melayani rumah tangga padahal kedua konsumsi tersebut memberi pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pratiwi, 2022).

Setelah merosot di kuartal ketiga, perekonomian Indonesia membaik dengan cepat dan menutup tahun 2021 dengan keluaran yang lebih tinggi daripada masa pra-pandemi tahun 2019. Pertumbuhan terjadi di berbagai bidang dan akan menguat pada tahun 2022 seiring normalisasi kegiatan ekonomi. Kondisi pertumbuhan ekonomi pada masa ini menurut Badan Pusat Statistik diperkirakan akan tumbuh 5,0 % pada tahun 2022 dan 5,2 % pada tahun 2023 seiring makin pulihnya permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga, serta tetap tingginya kinerja ekspor. Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada peningkatan pertumbuhan mayoritas lapangan usaha, terutama Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, serta Perdagangan Besar dan Eceran. Secara spasial, perbaikan ekonomi ditopang oleh seluruh wilayah, termasuk wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Provinsi Sulawesi Utara berada pada posisi strategis karena terletak di Pasifik Rim yang secara langsung berhadapan dengan negara-negara Asia Timur dan negara-negara di Benua Pasifik. Posisi strategis ini menjadikan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia ke Pasifik dan memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur. Provinsi ini juga turut mendukung peran Pulau Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan serta pertambangan di tingkat nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada gambar grafik 1.

Gambar grafik 1 menunjukan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara tahun 1992 sampai dengan tahun 2021. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Tahun 1992 persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 7,2 % terus meningkat sampai pada tahun 1997. Pada tahun 1998 angka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sampai tahun 2000 dengan angka persentase sebesar 1,25 % dikarenakan dampak krisis moneter. Pada tahun 2001 pemulihan kondisi ekonomi semakin membaik sehingga pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara terus meningkat sampai pada tahun 2008 menyentuh angka 10,86 %. Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Sulut sebesar 5,6 % diatas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,05 %. Tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis sehingga pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara mencapai angka minus (-0,99 %), masalah ini dikarenakan mewabahnya virus covid-19 yang menghambat pergerakan sistem perekonomian dunia dan juga sangat berdampak terhadap perekonomian yang ada di daerah Sulawesi Utara. Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Sulut mencapai 4.16% diatas pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,69 %. Tahun 2021 dengan diberlakukannya *new normal* maka aktivitas perekonomian kembali dijalankan dengan syarat pembatasan-pembatasan dan peraturan yang dilakukan pemerintah (PPKM) guna memutus mata rantai virus covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan secara resmi di kalangan masyarakat. Dengan adanya upaya ini maka kondisi pertumbuhan ekonomi kembali meningkat dan berjalan dengan normal. Secara keseluruhan tahun 2021, perekonomian Sulawesi Utara menunjukkan indikasi pemulihan dengan tumbuh positif 4,16 % (yoY) setelah terkontraksi sebesar 0,99 % (yoY) pada tahun 2020. Angka pertumbuhan tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan perekonomian nasional yang tumbuh 3,69 % (yoY). Jika diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, ekonomi Sulawesi Utara tumbuh 4,16 % menjadi Rp. 91,79 triliun pada 2021 dari tahun sebelumnya. Tumbuhnya PDRB tersebut mengindikasikan mulai terjadi geliat lini usaha di Provinsi Sulawesi Utara.

Ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan I-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 3,86 % (yoY). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 8,99 %. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,31 %. Ekonomi Sulawesi Utara triwulan I-2022 terkontraksi sebesar minus (-8,32 %) (qtq). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman perekonomian Sulawesi Utara, yaitu berakhirnya perayaan Natal dan Tahun Baru serta baru dimulainya aktivitas konstruksi. Sementara dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen mengalami kontraksi dibanding triwulan sebelumnya kecuali komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 9,17 %.

Dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting. Sistem keuangan berperan penting dalam meningkatkan akumulasi modal dan inovasi teknologi, sehingga pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang

*steady-state*, yaitu pertumbuhan konstan karena disebabkan oleh adanya depresiasi. Dengan demikian, pengembangan sistem keuangan merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Pada saat ini sudah banyak lembaga-lembaga keuangan yang dapat memberikan jasa dalam penyimpanan uang bagi masyarakat dengan aman dalam bentuk tabungan. Demikian juga untuk dunia usaha yang dapat meminjam atau kredit dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga keuangan yaitu Bank. Bank sebagai badan usaha yang dapat menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan juga dapat menyalirkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Untuk pemberian kredit dimana bank hanya memperhatikan dua prinsip yaitu kepercayaan dan kehati – hatian, masyarakat dan bank mempunyai hubungan yang sangat erat dimana masyarakat memerlukan dana dari bank, begitu juga bank yang memerlukan dana dari masyarakat. Pinjaman atau kredit bank dapat disalurkan kepada siapa saja yang memerlukan baik untuk individu maupun bagi dunia usaha.

Kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. (Thomas dalam Ismail, 2010:93). Menurut jenis penggunaan kredit perbankan dikelompokkan atas kredit konsumsi dan kredit produktif yang terdiri atas kredit modal kerja dan kredit investasi.

Kredit Konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya. Jenis kredit konsumsi misalnya : Kredit pemilikan rumah, Kredit pemilikan kendaraan, Kartu kredit (*credit card*), Kredit konsumtif lainnya. Dalam hal ini kegiatan untuk pemberian kredit konsumsi harus selalu ditinjau dengan baik karena pemberian kredit ini juga berpengaruh terhadap pendapatan bank jika permintaan kredit terus meningkat itu kabar baik bagi bank tersebut, tetapi jika permintaan kredit menurun harus ditinjau kembali masalah apa yang timbul sehingga menyebabkan permintaan kredit itu sendiri menjadi menurun. Adapun grafik perkembangan kredit konsumsi di Provinsi Sulawesi Utara dalam grafik.2 :

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik terlihat bahwa kredit konsumsi terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Tahun 1992 total kredit konsumsi yang disalurkan sebesar Rp.92.051 juta terus meningkat sampai dengan penyaluran tahun 2021 yaitu sebesar Rp.24.786.867 juta. Pencairan kredit konsumsi terus meningkat setiap tahun. Hal ini dikarenakan kredit konsumsi merupakan fasilitas yang memberikan nasabah kemudahan untuk memperoleh sesuatu, seperti mobil, motor, rumah dan berbagai barang konsumsi. Fasilitas pembiayaan ini juga murni atas dasar tingkat penghasilan debitur dan analisisnya sangat sederhana karena hanya berdasarkan *repayment capacity* yang bersumber dari penghasilan debitur. Semakin besar *repayment capacity* seorang debitur maka semakin besar pula fasilitas kredit konsumsi yang dapat diterimanya. Perbankan cenderung lebih tertarik menyalurkan kredit konsumsi karena cenderung lebih aman.

Kredit Modal Kerja merupakan kredit untuk perorangan atau sebuah badan usaha lainnya yang ingin mengembangkan lebih lebar usahanya dengan syarat sudah memiliki perizinan usaha dan usaha sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun. Karena memang banyak para wirausahawan yang masih memiliki modal minim untuk mengembangkan usahanya, maka kredit modal kerja pun bisa dijadikan pilihan agar bisnis yang dijalankan semakin besar. Sampai dengan September 2021 penyaluran kredit yang berlokasi proyek di Sulut tercatat tumbuh 9,86 % (yoY) dengan kualitas penyaluran kredit yang terjaga dengan rasio NPL sebesar 2,93 %. Menurut data Bank Indonesia, kredit modal kerja tercatat tumbuh paling tinggi yang mengindikasikan tanda-tanda pulihnya dunia usaha. Menurut (Arthesha & Handiman,2007) Kredit modal kerja adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar dan mengantikan hutang dagang, serta membiayai sementara kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Para wirausahawan yang masih memiliki modal minim untuk mengembangkan usahanya, maka kredit modal kerja pun bisa dijadikan pilihan agar bisnis yang dijalankan semakin besar.

Perkembangan kredit modal kerja di Sulawesi Utara berfluktuasi dari tahun ke tahun. Walaupun tahun-tahun tertentu mengalami penurunan angka, namun jika dikaji secara agregat kondisi kredit modal kerja terus meningkat dari tahun 2001-2021.

Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru. Salah satu kredit yang disalurkan oleh bank yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di Sulawesi Utara secara keseluruhan yaitu kredit investasi. Kredit investasi dipergunakan untuk tujuan membiayai pembelian barang-barang modal tetap seperti pembelian mesin, pembangunan pabrik, tanah, kendaraan dan sebagainya. Kredit ini sangat diperlukan bagi para pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Fasilitas kredit investasi merupakan kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal tetap beserta jasa yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi proyek yang sudah ada. Kredit Investasi dipergunakan untuk proyek-proyek yang dapat mendorong peningkatan ekspor, menyerap banyak tenaga kerja, mempunyai dampak ganda pada sektor-sektor lain (*Multiplier Effect*), meningkatkan kegiatan produktif dan memberikan *Social Benefit* (Kasmir, 2014).

Penyaluran kredit investasi merupakan tulang punggung dalam kegiatan usaha bank karena dari aktivitas perkreditan, bank akan memperoleh pendapatan berupa pendapatan bunga, provisi dan komisi. Firdaus dan Ariyanti (2009:6) Pendapatan yang berasal dari penerimaan bunga kredit merupakan sumber pendapatan terbesar bagi bank. Apabila pemberian kredit berjalan baik (lancar) maka bunga kredit dapat mencapai 70 % sampai 90 % dari pendapatan bank. Sehingga dapat disimpulkan jika jumlah kredit yang disalurkan semakin besar maka semakin besar pendapatan bunga yang akan diterima oleh bank, sehingga diprediksikan tingkat profitabilitas bank akan meningkat. Begitupun sebaliknya jika jumlah kredit yang disalurkan

semakin kecil maka semakin kecil pendapatan bunga yang akan diterima oleh bank, sehingga diprediksi tingkat profitabilitas bank akan menurun. Adapun perkembangan penyaluran kredit investasi di Sulawesi Utara pada tampilan grafik 4 :

Perkembangan kredit investasi di provinsi Sulawesi Utara dari tahun ke tahun mengalami proses naik turun. Realisasi kredit investasi pada tahun 1992 sebesar Rp.22.762 juta. Realisasi terbesar pada tahun 2019 mencapai angka Rp.7.367.933 juta.

Berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi regional dan alokasi kredit, terdapat indikasi bahwa kredit berperan sebagai stimulator pertumbuhan ekonomi. Peran kredit sangat penting untuk mendorong peran sektor riil sebagai turunan dari kebijakan fiskal dan moneter yang mampu mendorong akselerasi perekonomian wilayah di sektor riil.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara tercermin dengan adanya hubungan antara lembaga keuangan Bank dalam hal penyaluran kredit, baik konsumsi maupun produktif. Dari latar belakang permasalahan yang dijelaskan bahwa apabila kondisi penyaluran kredit konsumsi dan produktif berjalan dengan baik atau tidak adanya kemacetan pembayaran maka berdampak dalam pergerakan roda perekonomian. Masyarakat menjadi salah satu sasaran dari kebijakan pemerintah yang secara langsung dapat membantu membuka lapangan kerja baik melalui perluasan bagi produksi dan mendorong usaha – usaha yang baru. Maka dari itu penulis tertarik untuk jauh lebih dalam meneliti tentang hubungan antara kredit terhadap pertumbuhan ekonomi sesuai dengan teori yang ada, dengan judul penelitian yang diangkat adalah “Analisis Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara”.

### **Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh kredit konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara?
2. Bagaimana pengaruh kredit modal kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara?
3. Bagaimana pengaruh kredit investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara?
4. Bagaimana pengaruh kredit konsumsi, kredit modal kerja dan kredit investasi secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara?

### **Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaruh kredit konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara
2. Mengetahui pengaruh kredit modal kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara

3. Mengetahui pengaruh kredit investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara
4. Mengetahui pengaruh kredit konsumsi, kredit modal kerja dan kredit investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara

### **Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perbankan dan pemerintah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit
2. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi masyarakat dan peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.
3. Untuk menambah dan memperkaya wawasan ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Rahardjo, 2013).

### **Kredit**

Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/ pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/ *borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak (Veithzal dan Andria, 2007: 4).

### **Jenis Kredit**

Menurut Triandaru (2006:117), jenis kredit yang disalurkan dapat dilihat dari berbagai segi yang salah satunya adalah jenis kredit menurut tujuan penggunaannya terlihat sebagai berikut:

#### a. Kredit Modal Kerja/Kredit Eksplorasi

Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksplorasi barang modal, piutang dan lain-lain.

#### b. Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah kredit (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik.

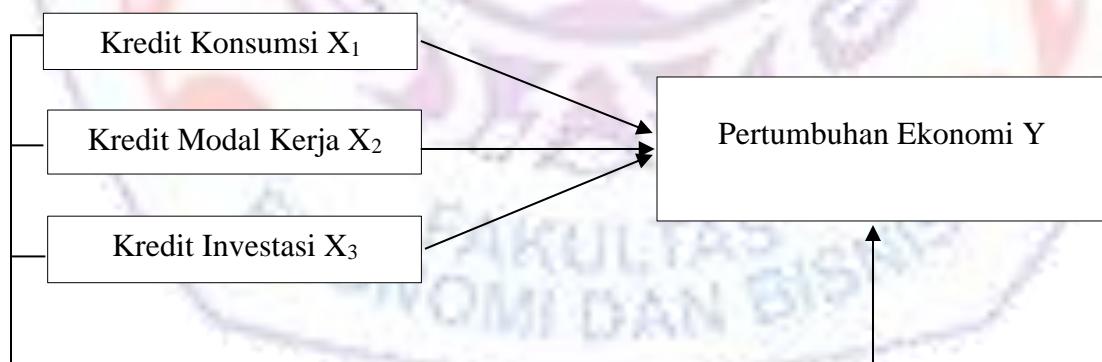
### c. Kredit Konsumsi

Kredit Konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan berupa barang modal dalam kegiatan usaha. kredit ini dapat digunakan oleh nasabah untuk berbagai tujuan pribadi

### Penelitian Terdahulu

Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, penulis Ninuk Dwiaستuti, 2020, dengan tujuan penelitian untuk menguji dan menganalisis pengaruh kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit modal kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sedangkan kredit investasi dan kredit konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

### Kerangka Pemikiran



### Hipotesis

1. Diduga kredit konsumsi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Diduga kredit modal kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Diduga kredit investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

4. Diduga kredit konsumsi, kredit modal kerja dan kredit investasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

## 2. METODE PENELITIAN

### Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan data yang tersedia dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara. Jenis data yang digunakan adalah *Time Series* dari tahun 1992 sampai tahun 2021. Objeknya adalah Provinsi Sulawesi Utara

### Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian penjelasan (*Explanatory Research*), yaitu menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis. Menurut Singarimbun dan Effendi (2006;134) menjelaskan bahwa *explanatory research* adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang akan diteliti serta untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan data yang tersedia dan yang telah disusun dan dipublikasikan oleh lembaga atau instansi tertentu yang bersumber dari laporan Badan Pusat Statistik dan lain-lain khususnya tahun 1992 sampai dengan tahun 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1992-2021
2. Data Kredit Konsumsi Tahun 1992-2021
3. Data Kredit Modal Kerja Tahun 1992-2021
4. Data Kredit Investasi Tahun 1992-2021

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Kredit Konsumsi ( $X_1$ ) yaitu total kredit konsumsi yang disalurkan di Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 1992-2021 diukur dalam satuan rupiah
2. Kredit Modal Kerja ( $X_2$ ) yaitu total kredit modal kerja yang disalurkan di Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 1992-2021 diukur dalam satuan rupiah
3. Kredit Investasi ( $X_3$ ) : yaitu total kredit investasi yang disalurkan di Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 1992-2021 diukur dalam satuan rupiah
4. Pertumbuhan Ekonomi (Y) yaitu persentase angka pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari PDRB ADHK (atas dasar harga konstan)

## Metode Analisis

### Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2016:192) analisis regresi linier berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Adapun persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y=f(X_1, X_2, X_3)$$

Kemudian dibentuk dalam model ekonometrika dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y_t = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 \dots + e$$

Dimana  $Y_t$  adalah variabel dependen,  $a$  adalah harga konstan,  $\beta_1$  adalah koefisien regresi pertama,  $\beta_2$  koefisien regresi kedua,  $\beta_3$  koefisien regresi ketiga,  $X_1$  variabel independen pertama,  $X_2$  variabel independen kedua,  $X_3$  variabel independen ketiga dan  $e$  sebagai *error term*.

Berdasarkan uraian diatas maka model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi}_t = a + \beta_1 \text{ Kredit Konsumsi} + \beta_2 \text{ Kredit Modal Kerja} + \beta_3 \text{ Kredit Investasi} + e$$

### Uji t-test statistik

Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individual dan untuk mengetahui dari masing-masing variabel dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan menganggap variabel lain konstan atau tetap. Langkah-langkah persamaan regresi sebagai berikut :

Hipotesis :

1.  $H_0 : \beta_i = 0$ , artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2.  $H_a : \beta_i \neq 0$ , artinya variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
3. Nilai t tabel dapat dicari dengan rumus :  $t_{tabel} : t_{alpha} : n-k$ . Dimana :  $\alpha$  = derajat signifikan,  $n$  = jumlah sampel (observasi)  $k$  = banyaknya parameter/koefisien regresi plus konstanta
4.  $t$  hitung dapat dicari dengan rumus : Dimana :  $t = \frac{\beta_i}{\text{Se}(\beta_i)}$ ,  $\beta_i$  = koefisien regresi,  $\text{Se}(\beta_i)$  = standar error Koefisien Regresi.

Kriteria pengujian :

- a. Jika  $t$  hitung  $< t$  tabel, maka  $H_0$  diterima. Berarti variabel independen tersebut secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika  $t$  hitung  $\geq t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak. Berarti variabel independen tersebut secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

### **Uji F- test statistik**

Uji F dilakukan untuk mengetahui proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama, dilakukan pengujian hipotesis secara serentak dengan menggunakan uji F. Hipotesis :

1.  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ , artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2.  $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ , artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
3. Nilai F tabel dapat dicari dengan rumus :  $F$  tabel :  $F_\alpha : n-k : k-1$ , dimana :  
 $\alpha$  = derajat signifikan,  
 $n$  = jumlah sampel (observasi),  
 $k$  = banyaknya parameter/koefisien regresi plus konstanta.

$F$  hitung diperoleh dengan rumus :  $F = R^2 / (k-1) / (1-R^2) / (n-k)$ .

Dimana :  $R^2$  = koefisien determinasi,  $n$  = jumlah sampel (observasi),  $k$  = banyaknya parameter/koefisien regresi plus konstanta.

Kriteria pengujian :

- a. Jika  $F$  hitung  $< F$  tabel, maka  $H_0$  diterima. Berarti variabel independen tersebut secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika  $F$  hitung  $\geq F$  tabel, maka  $H_0$  ditolak. Berarti variabel independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Agus Widarjono : 2013).

### **Uji Asumsi Klasik**

Beberapa penelitian, banyak yang memilih dan memilih beberapa prasyarat yang harus dilakukan dalam penelitian yang menggunakan uji regresi berganda, beberapa pakar statistik mengumpulkan uji prasyarat tersebut dalam apa yang disebut uji asumsi klasik regresi. Uji ini merupakan kombinasi beberapa syarat uji dalam uji asumsi dasar dan uji asumsi klasik itu sendiri. Uji ini harus dilakukan mengingat sifat dan syarat tertentu yang harus ada dalam penggunaan analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik regresi tersebut adalah: uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

### **Koefisien Determinasi $R^2$**

$R^2$  adalah suatu besaran yang lazim dipakai untuk mengukur kebaikan kesesuaian (*goodness of fit*), yaitu bagaimana garis regresi mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. Didalam regresi sederhana kita juga akan menggunakan koefisien determinasi untuk mengukur seberapa baik garis regresi yang kita punya. Dalam hal ini kita mengukur seberapa besar

proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel independen. Formula untuk menghitung koefisien determinasi ( $R^2$ ) regresi sederhana :

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{TSS - SSR}{TSS}, R^2 = 1 - \frac{\sum \hat{e}^2}{\sum (F_i - Y)^2}$$

(Agus Widarjono hal : 179, 2013).

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Regresi Pengaruh Kredit Konsumsi ( $X_1$ ), Kredit Modal Kerja ( $X_2$ ) dan Kredit Investasi ( $X_3$ ) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara (Y)

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan program *Eviews 08*. Untuk mengetahui pengaruh antara Kredit Konsumsi ( $X_1$ ), Kredit Modal Kerja ( $X_2$ ), dan Kredit Investasi ( $X_3$ ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara (Y).

**Tabel 1**  
**Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda**

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI				
Method: Least Squares				
Date: 10/31/22 Time: 11:53				
Sample: 1 30				
Included observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	43.56818	18.43808	2.362946	0.0259
KREDIT_KONSUMSI	1.581227	4.299831	0.367742	0.7160
KREDIT_MODALKERJA	-15.59553	7.606681	-2.050242	0.0505
KREDIT_INVESTASI	8.905991	2.444331	3.643530	0.0012
R-squared	0.397009	Mean dependent var	6.485333	
Adjusted R-squared	0.327433	S.D. dependent var	3.545826	
S.E. of regression	2.907937	Akaike info criterion	5.096331	
Sum squared resid	219.8586	Schwarz criterion	5.283157	
Log likelihood	-72.44496	Hannan-Quinn criter.	5.156098	
F-statistic	5.706135	Durbin-Watson stat	1.265973	
Prob(F-statistic)	0.003864			

*Sumber : Olahan Eviews 0.8*

Dari tabel diatas dapat dituliskan model persamaan regresi untuk data *Time Series* sebagai berikut :

$$Y_t = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \dots + e$$

Dimana :

$$Y_t = 43.56818 + 1.581227 X_1 - 15.59553 X_2 + 8.905991 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 43.56818 menyatakan bahwa jika nilai  $X_1$  kredit konsumsi,  $X_2$  kredit modal kerja dan  $X_3$  kredit investasi adalah (0) pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara (Y) adalah sebesar 43.56818
2. Nilai koefisien regresi kredit konsumsi  $X_1$  memiliki hubungan positif 1.581227, artinya setiap kenaikan 1 juta kredit konsumsi, maka pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara akan mengalami kenaikan 1.581227%, dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.
3. Nilai koefisien regresi kredit modal kerja  $X_2$  memiliki hubungan negatif 15.59553, artinya setiap kenaikan 1 juta kredit modal kerja, maka pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara akan mengalami penurunan sebesar 15.59553 %. Sebaliknya setiap penurunan 1 juta kredit modal kerja maka pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara akan mengalami kenaikan sebesar 15.59553 %, dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.
4. Nilai koefisien regresi kredit investasi  $X_3$  memiliki hubungan positif 8.905991, artinya setiap kenaikan 1 juta kredit investasi, maka pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara akan mengalami kenaikan 8.905991 %, dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.

### Hasil Uji Parsial t

#### Kredit Konsumsi ( $X_1$ ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Nilai t tabel dapat diperoleh dengan rumus :  $t_{tabel} : ta : n - k, \alpha = 10\%, = 0,10, n = 30 =$  Jumlah observasi,  $k = 4$  jumlah variabel termasuk intersep/konstanta *degree of freedom* (df) adalah  $N - k = 30 - 4 = 26$ , lihat tabel t *distribution* (df,F)  $\sim (26 ; 0,10) = 1.315$

Hasil estimasi kredit konsumsi ( $X_1$ ) pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa variabel kredit konsumsi ( $X_1$ ) berhubungan positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

Hal ini dapat dilihat juga dari nilai probabilitas sebesar  $0.7160 > 0.10$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Variabel kredit konsumsi ( $X_1$ ) mempunyai  $t_{hitung} 0.367742$  dengan  $t_{tabel} 1.706$  jadi  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dapat disimpulkan variabel kredit konsumsi ( $X_1$ ) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Y). Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel kredit konsumsi ( $X_1$ ) mempunyai hubungan yang searah dengan pertumbuhan ekonomi (Y). Jadi disimpulkan bahwa kredit konsumsi berhubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### Kredit Modal Kerja ( $X_2$ ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Nilai t tabel dapat diperoleh dengan rumus :  $t_{tabel} : ta : n - k, \alpha = 10\%, = 0.10 n = 30 =$  Jumlah observasi,  $k = 4$  jumlah variabel termasuk intersep/konstanta *degree of freedom* (df) adalah  $N - k = 30 - 4 = 26$ , lihat tabel t *distribution* (df,F)  $\sim (26 ; 0,10) = 1.315$

Hasil estimasi kredit modal kerja ( $X_2$ ) pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa variabel kredit modal kerja ( $X_2$ ) berhubungan negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

Hal ini dapat dilihat juga dari nilai probabilitas sebesar  $0.0505 < 0.10$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Variabel kredit modal kerja ( $X_2$ ) mempunyai  $t_{hitung} 2.050242$  dengan  $t_{tabel} 1.315$  jadi

$t_{hitung} > t_{tabel}$  dapat disimpulkan variabel kredit modal kerja ( $X_2$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Y).

Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel kredit modal kerja ( $X_2$ ) mempunyai hubungan yang tidak searah dengan pertumbuhan ekonomi (Y). Jadi disimpulkan bahwa kredit modal kerja berhubungan negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **Kredit Investasi ( $X_3$ ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)**

Nilai t tabel dapat diperoleh dengan rumus :  
 $t_{tabel} : ta : n - k, \alpha = 10\%, = 0.10$   
 $n = 30 =$  Jumlah observasi,  $k = 4$  jumlah variabel termasuk intersep/konstanta *degree of freedom* (df) adalah  $N - k = 30 - 4 = 26$ , lihat tabel t *distribution* (df,F)  $\sim (26 ; 0.10) = 1.315$

Hasil estimasi kredit investasi ( $X_3$ ) pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa variabel kredit investasi ( $X_3$ ) berhubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Hal ini dapat dilihat juga dari nilai signifikan sebesar 0,0012 lebih kecil dari nilai  $\alpha=10\%$ , atau  $0,0012 < 0.10$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Variabel kredit investasi ( $X_3$ ) mempunyai  $t_{hitung} 3.643530$  dengan  $t_{tabel} 1.315$  jadi  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dapat disimpulkan variabel kredit investasi ( $X_3$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Y). Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel Kredit Investasi ( $X_3$ ) mempunyai hubungan yang searah dengan pertumbuhan ekonomi (Y). Jadi disimpulkan bahwa kredit investasi berhubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **Hasil Uji Simultan F Statistik**

$\alpha = 10\%$ ,  $N =$  jumlah observasi,  $K = 4$  Jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka *degree of freedom* (df) adalah  $N - k = 30 - 4 = 26$  lalu melihat  $F_{tabel}$  distribusi values  $= (\alpha = 0.10 : k - 1, n - k) = F_{tabel} = 2,69$   $F_{hitung} = 5.706135$

Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berarti secara bersama-sama variabel independen Kredit Konsumsi  $X_1$ , Kredit Modal Kerja  $X_2$ , dan Kredit Investasi  $X_3$  berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara (Y).

### **Hasil Uji Normalitas**

Hasil uji normalitas dalam gambar 5 dapat dilihat bahwa nilai *Probability Jarque-Bera* sebesar  $0,562229 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah dipenuhi.

### **Hasil Uji Multikolinearitas**

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antara variabel bebas.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	339.9627	1206.098	NA
KREDIT_KONSUMSI	18.48855	2761.046	<b>37.29183</b>
KREDIT_MODALKERJA	57.86160	8493.060	<b>44.87756</b>
KREDIT_INVESTASI	5.974753	752.2773	<b>7.914660</b>

*Sumber : Olahan Eviews 0.8*

Hasil uji multikolinearitas, dapat dilihat pada nilai *Centered VIF*. Nilai VIF kredit konsumsi dan kredit modal kerja lebih dari 10. Hal ini menunjukkan Probabilitas  $> 10$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala multikolinearitas pada variabel kredit konsumsi dan kredit modal kerja, sedangkan nilai VIF kredit investasi kurang dari 10. Hal ini menunjukkan Probabilitas  $< 10$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada variabel kredit investasi.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Syarat dari uji *regresi linear* harus tidak boleh terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Pengujian ini menggunakan uji *white*.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	1.184216	Prob. F(9,20)	0.3565
Obs*R-squared	10.42922	<b>Prob. Chi-Square(9)</b>	<b>0.3169</b>
Scaled explained SS	8.246653	Prob. Chi-Square(9)	0.5095

*Sumber : Olahan Eviews 0.8*

Hasil uji *white* menunjukkan bahwa nilai probability *Obs\*R squared Prob. Chi-Square*  $0.3169 > 0.05$  berarti model persamaan regresi dalam penelitian ini tidak mengandung heteroskedastisitas.

### Hasil Uji Autokorelasi

Pengujian ini menggunakan *Breusch-Godfrey*. Hasil uji autokorelasi untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:		
F-statistic	1.996849	Prob. F(2,24) 0.1577
Obs*R-squared	4.279925	<b>Prob. Chi-Square(2) 0.1177</b>

*Sumber : Data Olahan Eviews 0.8*

Hasil uji diatas dapat dilihat bahwa nilai *probability Obs\*R-squared Prob. Chi-Square* sebesar  $0.1177 > 0.05$ . Berdasarkan hasil tersebut maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

### Hasil Koefisien Determinasi

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan yang baik dalam analisis, yang ditujukan oleh besarnya koefisien determinasi  $R^2$ . Berdasarkan hasil estimasi didapat nilai koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,397 yang menunjukkan bahwa variabel independen Kredit Konsumsi, Kredit Modal Kerja, dan Kredit Investasi mampu menjelaskan atau mempengaruhi 39,7 % dan sisanya 60,3 % dipengaruhi oleh variabel diluar variabel independen Kredit Konsumsi, Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi.

### Pembahasan

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang perkembangan pertumbuhan ekonominya berjalan stabil meskipun karena beberapa alasan mengalami beberapa kali penurunan angka. Pemerintah daerah Sulawesi Utara selalu mengupayakan untuk menstabilkan kondisi pertumbuhan ekonomi dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga termasuk perbankan. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, peran perbankan memang tidak pernah bisa luput. Bagaimana tidak, perbankan sebagai lembaga intermediasi tentu menjadi salah satu faktor pemicu pergerakan ekonomi di seluruh sektor. Singkatnya, kenaikan permintaan kredit perbankan baik kredit konsumsi, modal kerja, ataupun investasi tentu akan mendorong daya beli, pertumbuhan usaha, sampai dengan peningkatan investasi. Di Indonesia sendiri, rasio aset perbankan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) masih baru sebesar 55,01 % per akhir 2019 lalu menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peran perbankan dalam menggerakkan perekonomian daerah sangat besar. Pasalnya, perbankan berperan di semua aktivitas ekonomi, termasuk sektor penggerak utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Utara. Bank sebagai Lembaga penggerak utama ekonomi nasional adalah konsumsi, investasi, serta kegiatan ekspor impor. Perbankan memiliki peran besar dalam ketiga kegiatan tersebut. Kontribusi konsumsi dan investasi menyumbang 80 % terhadap ekonomi. Perbankan berperan di semua aktivitas ekonomi. Sehingga secara logika sederhana bisa dipahami peran besar perbankan dalam perekonomian.

Salah satu program dari Lembaga perbankan dengan mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi yaitu dengan penyaluran dana kredit. Pertumbuhan kredit perbankan pun sejatinya memang sudah menjadi fokus Pemerintah saat ini. Sebabnya, secara umum dalam mencapai visi pembangunan ekonomi pada tahun 2045, pemerintah perlu mendorong percepatan reformasi struktural mengingat beberapa isu yang masih dihadapi antara lain rendahnya produktivitas nasional yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), gap infrastruktur, serta rendahnya tingkat adopsi teknologi.

Salah satu peran kredit dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengalokasikan pemberian kredit menurut prioritas pembangunan ekonomi sehingga dapat memperluas pemerataan hasil pembangunan. Implikasi kredit perbankan berdasarkan data yang ada terhadap pembangunan ekonomi setidaknya berpengaruh pada dua hal. Pertama, kredit perbankan mampu meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat melalui kredit konsumsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Kedua, kredit perbankan berperan dalam mendorong peningkatan pembiayaan investasi dan modal unit usaha sehingga kapasitas dan produktivitas perekonomian menjadi lebih besar. Dari kedua hal tersebut efek selanjutnya dari kredit perbankan adalah adanya peningkatan pendapatan nasional akibat dari meningkatnya konsumsi dan investasi masyarakat secara keseluruhan sehingga tercapainya pertumbuhan ekonomi.

Pada penelitian Beck (2004), menunjukkan bahwa tidak hanya kredit perbankan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tetapi juga dipengaruhi oleh pasar modal secara positif. Penelitian Fabya (2011), menunjukkan bahwa nilai kredit swasta memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tabungan dianggap lebih berpengaruh ketimbang kredit secara statistik pada hasil penelitian ini. Penelitian Onder (2013), menunjukkan bahwa penyaluran dana pinjaman di pasar kredit signifikan positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal pada semua provinsi di Turki.

### **Pengaruh Kredit Konsumsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit konsumsi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulawesi Utara. Hal ini dikarenakan penyaluran kredit ini bertujuan untuk konsumtif, yang ditujukan untuk individu atau perorangan bukan untuk kegiatan usaha tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang konsumsi. Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Kredit konsumsi memang seolah jalan pintas. Semuanya bisa di solusikan dengan kredit konsumsi. Bank Indonesia memberikan lampu merah kepada sistem perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia tentang sistem penyaluran kredit konsumsi ke masyarakat. Untunglah bank sentral Indonesia, Bank Indonesia, tanggap dalam menyikapi gejala budaya konsumsi ini dengan mulai mengatur kebijakan terkait kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan aturan baru kartu kredit. Aturan penyaluran kredit konsumsi tersebut sebenarnya bukanlah merugikan masyarakat melainkan lebih bersifat melindungi. Jika masyarakat tidak diperingatkan secara keras untuk mengatur pola konsumsinya maka kebiasaan besar pasak daripada tiang dan gali lubang tutup lubang akan terus berulang dan tidak pernah berakhir. Tidak hanya merugikan diri sendiri, jika kredit macet dan terjadi pada banyak rumah tangga akan berdampak serius ke perekonomian negara. Budaya konsumsi akan lebih baik jika diiringi dengan gerakan menabung.

Sesuatu yang diperoleh dengan menabung dan sikap sabar biasanya akan lebih baik dibandingkan sesuatu yang diperoleh hanya berdasarkan nafsu dan tergesa-gesa.

Mengenai kebijakan penyaluran kredit, sebagian besar bank akan memperketat penyaluran kredit ke sektor modal kerja dan kredit investasi. Sedangkan untuk kredit konsumsi, sebagian besar bank akan melakukan pelonggaran kebijakan untuk penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) atau kredit pemilikan apartemen (KPA). Dengan berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, prospek ekonomi nasional bakal membaik. Dengan membaiknya prospek tersebut, industri perbankan akan semakin yakin dalam menyalurkan kredit. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa membantu industri perbankan untuk mengakselerasi kreditnya. Merevisi aturan penyaluran kredit untuk properti dan kredit otomotif dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Taufiq (2022) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Penyaluran Kredit Produktif Dan Kredit Non Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” dengan hasil analisis yang diperoleh dimana kredit konsumtif tidak memberikan pengaruh yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sementara dari hasil penelitian yang di lakukan oleh Ninuk Dwiaستuti (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya

Dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat” justru memiliki hasil penelitian yang menjelaskan bahwa kredit konsumsi memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.

### **Pengaruh Kredit Modal Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit modal kerja berpengaruh negatif tetapi signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulawesi Utara. Hal ini terjadi karena *side streaming* atau kreditur tidak melakukan objek yang diwakilkan yaitu membeli barang sesuai dengan kontrak atau perjanjian. Dengan demikian, tujuan dari diadakannya kontrak tidak tercapai. Berdasarkan pengertiannya kredit modal kerja merupakan salah satu fasilitas kredit yang diberikan dengan jangka pendek serta dicairkan dalam mata uang rupiah dan valuta asing. Kredit ini adalah kredit untuk perorangan, maupun badan usaha yang lainnya untuk menambah modal bagi pengembangan usaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun serta memiliki perizinan usaha. Kredit modal kerja digunakan untuk meningkatkan keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya (seperti membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya– biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi).

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kredit perbankan dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Arcand et al. (2012) dan Samargandi et al. (2015) menunjukkan bahwa sampai tingkatan tertentu, peningkatan kredit perbankan dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi. Apabila secara agregat alokasi kredit terlalu besar, maka peningkatan kredit dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi karena terdapat *productivity shift effects* dari sektor riil ke sektor finansial. Dengan demikian, dimungkinkan bahwa hubungan antara perkembangan sektor finansial dan pertumbuhan ekonomi bersifat non- linear, atau kurva-U terbalik.

Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maherika (2019) dengan judul penelitian “Analisis pengaruh kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jambi” yang mengatakan bahwa kredit modal kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Salah satu kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kredit modal kerja melalui Bank Sentral adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable*.

### **Pengaruh Kredit Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulawesi Utara dan signifikan secara statistik. Hal ini sejalan dengan penelitian Anwar Ramli (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Permintaan Kredit Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Interaksi Kebijakan Moneter di Provinsi Sulawesi Selatan” dimana penyaluran kredit investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Hal ini didukung dengan Teori Keynes tentang Pendapatan Nasional dan output yang dihasilkan bahwa investasi bruto merupakan komponen dari produk domestic bruto (PDB) dalam rumus  $PDB = C + I + G + N_x$  dimana C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran Pemerintah  $N_x$  adalah Net eksport. Dari rumus tersebut dapat dikaitkan dengan PDRB suatu wilayah yang mana investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan yaitu pengeluaran untuk membeli mesin pabrik yang baru dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Jika semua

komponen itu berjalan dengan baik maka akan meningkatkan PDRB suatu daerah dan akan berdampak pada naiknya tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Teori Schumpeter juga menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam pertumbuhan ekonomi bahwa pengusaha akan terus melakukan pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Pembaharuan tersebut dapat berupa menciptakan barang – barang baru, meningkatkan efisiensi dalam memproduksi/inovasi tersebut, pengusaha akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Investasi yang terbaru akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi Negara. Maka pendapatan masyarakat akan menjadi bertambah dan seterusnya konsumsi masyarakat akan menjadi bertambah tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan – perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dan melakukan penanaman modal baru (Sukirno Makro Ekonomi Pengantar, 2015).

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian maka di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan kredit konsumsi, kredit modal kerja dan kredit investasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.
2. Secara parsial kredit modal kerja dan kredit investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara, sedangkan kredit konsumsi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.

##### **Saran**

1. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan untuk mengembangkan industri perbankan di masa datang guna menciptakan stabilitas sistem keuangan yang pada gilirannya akan mendorong perekonomian daerah secara berkesinambungan.
2. Perbankan dalam pemberian kredit harus berpedoman pada prinsip kehati- hatian, sesuai dengan ketentuan dan teknis perbankan.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi peneliti selanjutnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Widarjono. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya*, Ekonisia, Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Beck, Thorsten. Levine, Ross. 2004. *Stock Markets, banks, and growth: Panel evidence*. *Journal of Banking & Finance* 28 (2004) 423-442.
- Firdaus, R. & Ariyanti, M (2009), *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Kasmir, 2014. *Analisis Laporan Keuangan*, cetakan ke-7. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- M. Taufiq (2022) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Penyaluran Kredit Produktif Dan Kredit Non Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Maherika (2019) Analisis pengaruh kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jambi. Al Tijarah: Vol. 4 No. 2, Desember 2018 (36-48) p-ISSN: 2460-4089 e-ISSN: 2528-2948 Available at: <http://ejurnal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah>. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

Ninuk Dwiaستuti (2020) Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020 ISBN: 978-602-53460-5-7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Pratiwi Sulistyowati, Renea Shinta Aminda 2022. Determinasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Indonesia

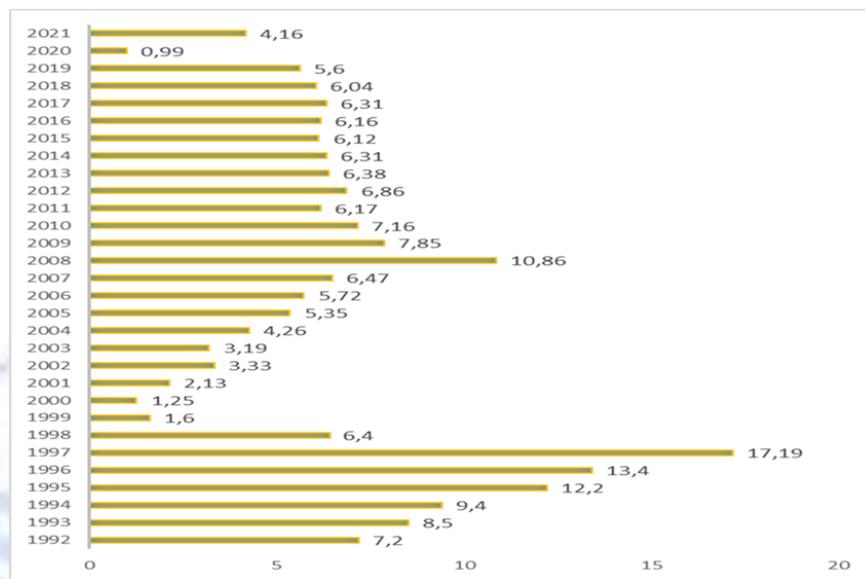
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat

Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal dan Ferry N Idroes. 2007. Bank and Financial Institution Management. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

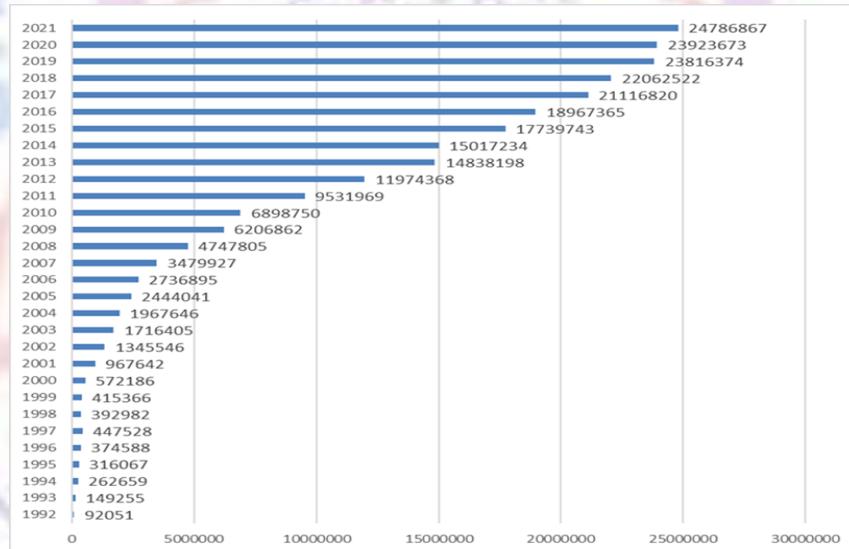
Sukirno, Sadono. 2015. Makro ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2011. “Pembangunan Ekonomi”. Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.

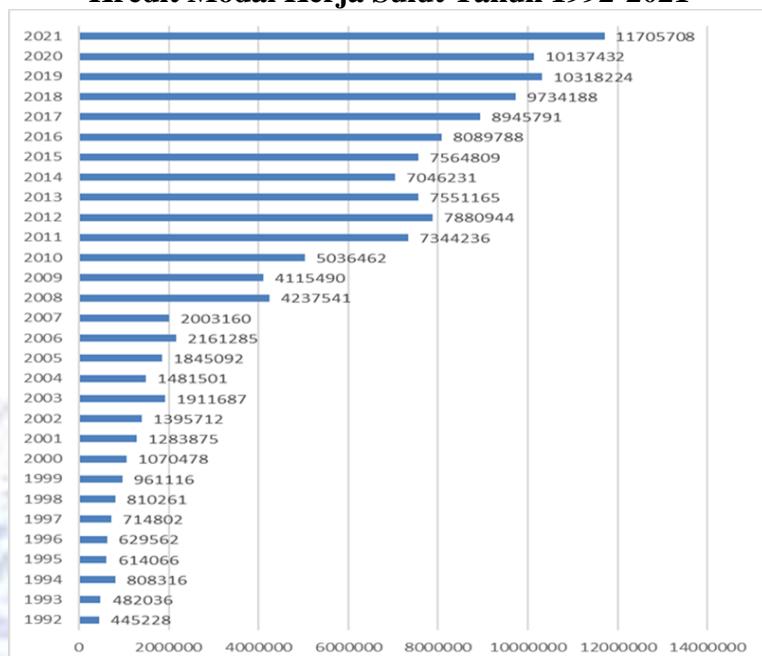
**LAMPIRAN**  
**Gambar. 1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Sulut Tahun 1992-2021**



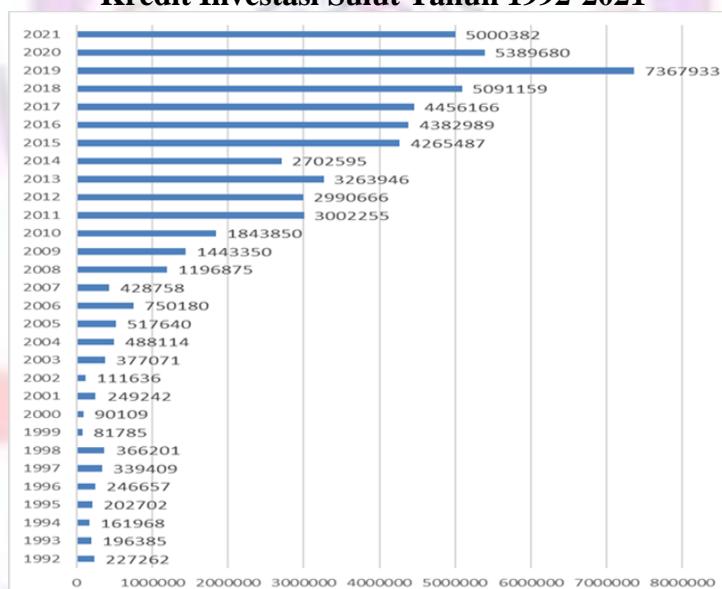
**Gambar 2**  
**Kredit Konsumsi Sulut Tahun 1992-2021**



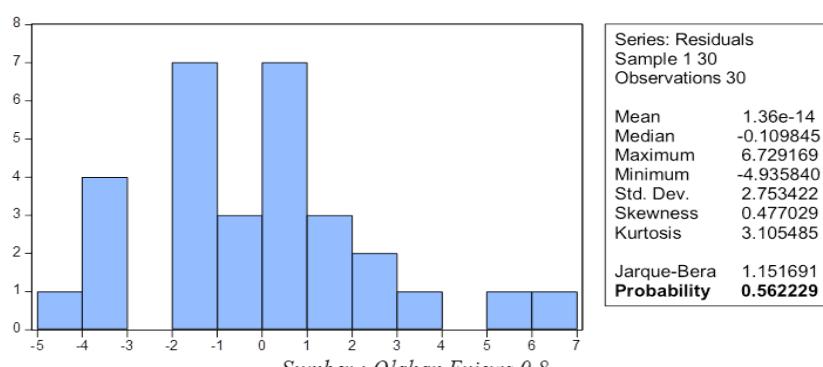
**Gambar 3**  
**Kredit Modal Kerja Sulut Tahun 1992-2021**



**Gambar 4**  
**Kredit Investasi Sulut Tahun 1992-2021**



**Gambar 5**  
**Hasil Uji Normalitas**



Sumber : Olahan Eviews 0.8

**ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN  
DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

***Ita Pingkan Fasnie Rorong***

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Sam Ratulangi, Manado  
E-mail: [itapingkan@unsrat.ac.id](mailto:itapingkan@unsrat.ac.id)*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi dengan bantuan alat analisis *Eviews 8*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. artinya apabila indeks pembangunan manusia meningkat maka pertumbuhan ekonomi turun. *ceteris paribus*. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa ketika indeks pembangunan manusia meningkat maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya disaat indeks pembangunan meningkat maka kemiskinan akan menurun. *Ceteris paribus*. Meningkatnya Indeks pembangunan manusia mampu meningkatkan produktifitas kerja manusia, yang akan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

**Kata Kunci :** Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to analyze the effect of the human development index on economic growth and poverty in North Sulawesi Province. The analytical method used was regression analysis with the help of the Eviews 8 analysis tool. The results showed that the human development index had a negative and significant effect on economic growth, meaning that if the human development index increases then economic growth decreases. *ceteris paribus*. This result is not in accordance with the theory which states that when the human development index increases it will increase economic growth. The results of the study show that the human development index has a negative and significant effect on poverty. This means that when the development index increases, poverty will decrease. *Ceteris paribus*. Increasing the human development index is able to increase the productivity of human work, which will increase income to meet the needs of a decent life.*

**Keywords:** *human development index, Economic Growth and Poverty*

**1. PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Kemiskinan tidak hanya terkait dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material dasar, tetapi kemiskinan juga terkait erat dengan berbagai kehidupan manusia lainnya, misalnya kesehatan, pendidikan, jaminan masa depan dan peranan sosial. Tingkat kesehatan masyarakat merupakan indikator yang penting, karena semakin sehat kondisi masyarakat, maka akan membantu dalam meningkatkan produktivitas masyarakat tersebut.

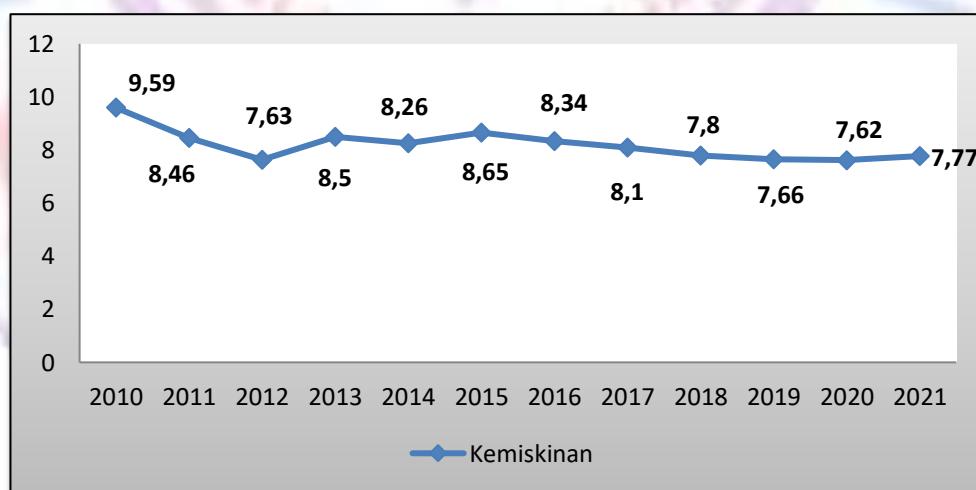
Menurut Nurwati (2008) Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa

kemiskinan ini merupakan masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangatlah berbeda-beda.

Menurut Haughton dan Shahidur (2012) kemiskinan selalu berhubungan dengan ketimpangan, dan kerentanan karena orang yang tidak di anggap miskin bisa saja sewaktu-waktu menjadi miskin jika mengalami permasalahan misalkan krisis finansial, dan penurunan harga usaha pertanian. Kerentanan merupakan sebuah dimensi pokok kesejahteraan karena hal tersebut mempengaruhi tingkah laku setiap individu dalam hal investasi, pola produksi dan strategi yang sesuai serta persepsi tentang situasi masing-masing.

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Negara Indonesia khususnya juga Provinsi Sulawesi Utara. Berbagai kebijakan dan program dibuat untuk mencegah angka kemiskinan semakin naik. Salah satu program pemerintah sekarang adalah Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan yang disingkat (ODSK). Program ini salah satu keseriusan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Berikut ini adalah perkembangan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi utara.

**Grafik 1.1**  
**Presentasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2010-2020**



*Sumber ; BPS Provinsi Sulawesi Utara*

Berdasarkan grafis terlihat perkembangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi setiap tahunnya fluktuasi atau terjadi kenaikan dan penurunan angka kemiskinan. Tahun 2010 kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara sebesar 9.59% turun pada tahun 2011 menjadi 8,46 dan terus turun sampai tahun 2012 menjadi 7.63 %. Akan tetapi, tahun 2013 mengalami peningkatan kemiskinan menjadi 8,50% dan tahun 2014 turun kembali menjadi 8,26%. Tahun 2015 kemiskinan kembali naik menjadi 8.65%, kemudian kembali turun pada tahun 2016 sebesar 8.34% dan tahun 2017 turun menjadi 8.10%. kemiskinan terus turun sampai tahun 2020 menjadi

7,62%. Akan tetapi, tahun 2021 pengangguran meningkat menjadi 7,77%. Kenaikan pengangguran tahun 2021 disebabkan karena adanya pandemi covid 19 dimana banyak pekerja-pekerja yang di PHK. Penurunan angka kemiskinan pada empat tahun terakhir menunjukkan bahwa setiap program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan. Adapun faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu indeks pembangunan manusia. Rendahnya indeks pembangunan manusia akan berakibat pada rendahnya produktifitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan, sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan. Oleh karena itu akan menjadi ancaman bagi pembangunan manusia diantara keduanya menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasikan dengan baik (Mirza, 2012)

Faktor kemiskinan juga menjadi penghambat bagi masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak bahkan juga kesehatan yang layak. Tingginya biaya pendidikan dan rendahnya pendapatan yang didapatkan membuat masyarakat tidak bisa memperoleh pendidikan bahkan yang sudah bersekolah harus putus sekolah. Rendahnya perekonomian masyarakat membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pengobatan yang baik.

Karena rendahnya pendidikan masyarakat terutama anak-anak membuat orang tua harus relah anak-anaknya bekerja walaupun mereka belum tergolong tenaga kerja. Masalah kemiskinan ini dihadapi oleh setiap pemerintah disetiap Negara terutama Indonesia. Untuk itu pemerintah berupaya mengambil kebijakan dalam mengatasi kemiskinan. Salah satu kebijakan pemerintah adalah sekolah gratis minimal 12 tahun untuk membantu dunia pendidikan. Juga masih banyak kebijakan-kebijakan pemerintah didunia pendidikan yaitu KIP,PIP dan lain sebagainya. Kebijakan pemerintah ini dapat membantu anak-anak untuk mendapat pendidikan yang baik sehingga mereka bisa terus bersekolah. Pada kebijakan ini pemerintah bisa membantu masyarakat mendapatkan hidup yang layak, pekerjaan yang layak dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Dengan demikian akan membantu negara untuk meningkatkan pembangunan manusia menjadi lebih baik.

Indeks pembangunan manusia juga berperan penting dalam pembangunan ekonomi karena pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan. Mutu penduduk yang baik akan mampu untuk berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Selain daripada itu pembangunan manusia yang tinggi mengakibatkan jumlah penduduk akan tinggi pula sehingga akan menaikkan tingkat konsumsi.

Hal ini akan mempermudah untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi (sukirno, 2006) Sudah saatnya pembangunan tidak lagi diletakkan pada kekuatan sumber daya alam (*natural resources based*), tetapi pada kekuatan sumber daya manusia (*human resources based*). Caranya adalah dengan meletakkan prioritas pembangunan manusia yang berhasil akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Ginting dalam Setyowati dan Suparwati, 2012).

## **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara.
2. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Kemiskinan**

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2004). Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*) (Harahap, 2006). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang

menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengidentifikasi segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

Secara Umum Definisi mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat/golongan yang selanjutnya disebut miskin (Nugroho, 1995). Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004). Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak –hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga.

### **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Pembangunan Manusia merupakan komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitikberatkan

pada peningkatan dasar manusia. Pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan dan daya beli. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik (Nur Baeti, 2013). Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang dapat diatasi terlebih lagi permasalahan yang paling mendasar. Permasalahan yang ada diantaranya berupa masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan yang tidak menyeluruh dan masalah keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi lainnya. Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang ( Marisca dan Haryadi, 2016).

Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang ( Marisca dan Haryadi, 2016). Dalam proses mencapai tujuan pembangunan, ada empat komponen yang harus diperhatikan dalam pembangunan manusia (UNDP, 1995). Empat komponen tersebut dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Produktivitas

Manusia harus berupaya meningkatkan produktivitas serta berpartisipasi secara penuh dalam menghasilkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai bagian dari pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya ekonomi dan sosial politik. Segala hambatan yang dapat mencegah untuk memperoleh akses tersebut harus dihilangkan, karena semua orang harus dapat peluang berpartisipasi dalam mengambil manfaat yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

3. Kesinambungan

Akses terhadap kesempatan atau peluang yang tersedia harus dipastikan tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang tetapi juga disiapkan untuk generasi mendatang. Segala sumber daya harus senantiasa dapat diperbarui.

4. Pemberdayaan

Semua orang diharapkan dapat berpartisipasi secara penuh dalam menentukan arah kehidupan mereka. Sama halnya dalam memanfaatkan proses pembangunan maka harus berpartisipasi dalam mengambil keputusan.

Konsep pembangunan manusia sebenarnya tidak berhenti pada keempat komponen diatas. Terdapat beberapa konsep pembangunan sumber daya yang dalam konteks makro merupakan keseluruhan dari proses aktivitas peningkatan kemampuan manusia yang didalamnya mencakup berbagai aktivitas, yaitu: pengembangan pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan gizi,

kesempatan kerja, lingkungan hidup yang sehat, pengembangan ditempat kerja, serta kehidupan politik yang bebas (UNDP, 2001 dalam Sulaiman, 2012).

Pertumbuhan dan pembangunan sumber daya manusia harus selalu diupayakan oleh pemerintah guna mempersiapkan generasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana permasalahan yang paling mendasar dalam pembangunan ini berada dalam peningkatan kemampuan dasar masyarakat baik secara fisik maupun non fisik ( mental dan spiritual). Dalam hal ini pembangunan manusia menitikberatkan peningkatan kualitas hidup yang dilihat dari tiga aspek, yaitu: aspek kesehatan, yang diukur berdasarkan besar-kecilnya angka harapan hidup saat lahir, aspek pendidikan yang diukur berdasarkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan aspek daya beli yang diukur berdasarkan nilai pengeluaran per kapita.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara (Daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tembus sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Jhingan, 2007) Bahwa Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai Kenikan GDP/GNP tanpa memandang, apakah kenaikan itu lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan dalam jangka panjang naik.

Menurut Sukirno (2002) Pertumbuhan Ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

*Simon Kuznet* mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, kenaikan pada kemampuan ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya (Todaro & Smith, 2012). Ketiga komponen pokok dari definisi ini sangatlah penting maknanya bagi suatu perekonomian (Arsyad, 2010) yaitu.

- 1) Kenaikan output nasional secara terus menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kemampuan suatu perekonomian dalam menyediakan berbagai berbagai macam barang ekonomi, dan juga tanda kematangan ekonomi.

- 2) Kemajuan teknologi merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, namun bukan syarat cukup (*sufficient condition*) dalam merealisasikan potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru
- 3) Penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi harus segera dilakukan. Adanya inovasi teknologi tanpa adanya inovasi sosial ibarat sebuah bola lampu tanpa aliran listrik. Potensi ada namun tanpa input yang melengkapi, tidak akan berarti apa-apa.

Di negara-negara maju, ada beberapa tekanan untuk menggeser orientasi pada pertumbuhan ekonomi menuju ke upaya-upaya yang lebih memperhatikan kualitas hidup (*quality of life*). Sementara itu, Negara sedang berkembang (NSB) yang menjadi perhatian utama adalah masalah pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Banyak orang merasakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah gagal untuk menghilangkan atau bahkan mengurangi luasnya kemiskinan *absolute* di NSB karena tingkat pengangguran dan pengangguran semu meningkat di daerah pedesaan dan perkotaan. Proses penetesan ke bawah (*trickle down effect*) dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi orang miskin tidak terjadi (Arsyad, 2010).

### **Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi**

Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada "proses", karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

#### **1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik**

Menurut ekonom Klasik, Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad,1999). Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ada tiga :

- [1] Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian
- [2] Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja
- [3] Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik. Menurut Teori

Pertumbuhan Ekonomi Klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi (*Sukirno*, 1994).

Persamaannya adalah :

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

$\Delta Y$  = tingkat pertumbuhan ekonomi

$\Delta K$  = tingkat pertambahan barang modal

$\Delta L$  = tingkat pertambahan tenaga kerja

$\Delta T$  = tingkat pertambahan teknologi

## 2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Dalam model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Solow Neo Classical Growth Model*) maka fungsi produksi agregat standar adalah sama seperti yang digunakan dalam persamaan sektor modern Lewis yakni:

## Y = Produk Domestik Bruto

K = stok modal fisik dan modal manusia

L = tenaga kerja non terampil

A = konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar

eut = melambangkan tingkat kemajuan teknologi

$\alpha$  = melambangkan elastisitas output terhadap model, yakni persentase kenaikan PDB yang bersumber dari 1 persen penambahan modal fisik dan modal manusia.

Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik Tradisional, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yakni kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi (*Todaro, 2000*).

### 3. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Menurut teori ini, setiap upaya untuk tinggal landas mengharuskan adanya mobilisasi tabungan dan luar negeri dengan maksud untuk menciptakan investasi yang cukup, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Teori *Harrod-Domar* mengingatkan bahwa sebagai akibat investasi yang dilakukan tersebut pada masa berikutnya kapasitas barang-barang modal dalam perekonomian akan bertambah (*Sadono Sukirno*, 2000). Menurut *Harrod-Domar* (*Sadono Sukirno*, 2000) pada hakekatnya investasi berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan agar terjadi pertumbuhan yang mantap atau *Steady Growth* yang dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan yang akan selalu menciptakan penggunaan sepenuhnya alat-alat modal yang akan selalu berlaku dalam perekonomian. Inti dari pertumbuhan Harrod-Domar adalah suatu realisasi jangka pendek antara peningkatan investasi (pembentukan kapital) dan pertumbuhan ekonomi.

Dua variabel fundamental dari model ini adalah pembentukan kapital (investasi) dan ICOR (*incremental capital output ratio*). Jika  $Y$ =output,  $K$ =stok kapital, dan  $I$ =investasi, maka ICOR adalah  $(\Delta K / \Delta Y)$ , penambahan kapital dibagi pertumbuhan output, sama seperti  $(I / \Delta Y)$ , sejak  $\Delta K = I$  dalam definisi.

Model *Harrod-Domar* ini adalah suatu modifikasi yang didasari pada model masing-masing dari Domar dan Harrod. Model Domar lebih memfokuskan pada laju pertumbuhan investasi  $(\Delta I / I)$ . Di dalam modelnya, investasi ( $I$ ) ditetapkan harus tumbuh atas suatu persentase yang konstan, sejak marginal *propensity to save*, yakni rasio dari pertumbuhan tabungan ( $S$ ) terhadap peningkatan pendapatan ( $Y$ ), dan ICOR keduanya konstan.

#### 4. Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*)

Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat terikat, Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan teknologi merupakan hal yang terikat, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia (Romer, 1994).

Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Definisi modal/kapital diperluas dengan memasukkan model ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar model atau bebas tapi teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan terikat, peran investasi dalam modal fisik dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Mankiw, 2000).

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah atau prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Data dan Sumber Data

Penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data sekunder deskriptif kuantitatif. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro, 1999). Penelitian

deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan data yang sebenarnya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Sumber data berasal dari berbagai sumber antara lain, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik Nasional, jurnal-jurnal ilmiah dan literature-literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selain itu, penulis juga melakukan studi literature untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian. Referensi studi kepustakaan diperoleh melalui jurnal-jurnal penelitian terdahulu.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Sulawesi Utara dengan pengambilan data melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Waktu penelitian adalah Tahun 2010-2021.

### Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### 1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian melalui beberapa buku bacaan, literatur atau keterangan-keterangan ilmiah untuk memperoleh teori yang melandasi dalam menganalisa data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

#### 2. *Internet Research*

Penelitian melalui website untuk memperoleh teori dan data dalam penelitian ini.

### Metode Analisis

#### Analisis Regresi Sederhana

Untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan independen, maka pengolahan data dilakukan dengan metode analisis regresi sederhana. Dalam analisis ini dilakukan dengan bantuan program *SPSS 26*. adapun rumusnya sebagai berikut:

$$Y = f(X_1)$$

Kemudian dibentuk dalam model ekonometrika dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e$$

Dimana:

$Y_1$  = Pertumbuhan Ekonomi

$Y_2$  = Kemiskinan

$X_1$  = Indeks Pembangunan Manusia

$\alpha$  = Konstanta/ Intercept

$\beta$  = Koefisien Regresi

$e$  = Standar Eror

Untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat) maka dilakukan uji statistik. Adapun rumusan hipotesis statistik dari persamaan adalah sebagai berikut:

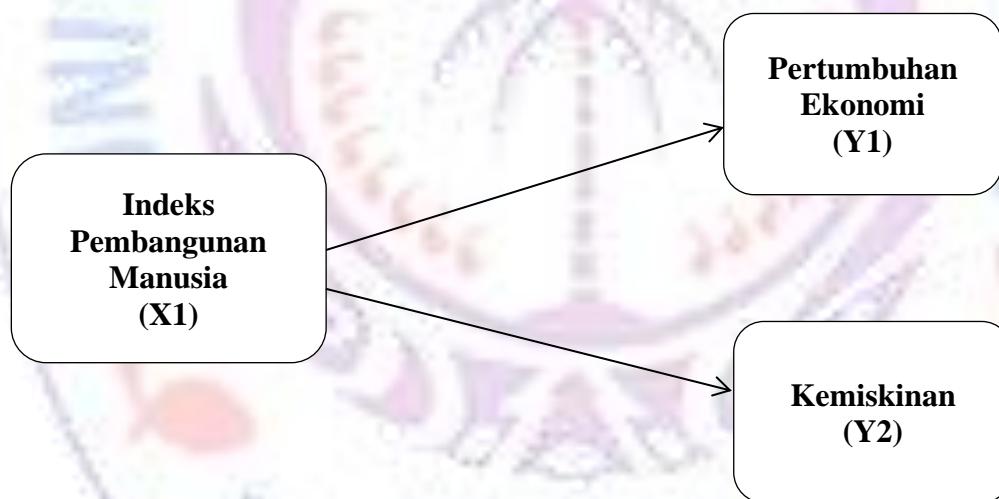
$$H_0 : \beta_1 < 0$$

$$H_1 : \beta_2 > 0$$

$$H_2 : \beta_3 \neq 0 \text{ atau } \beta_3 < 0 \text{ atau } \beta_3 > 0$$

Untuk menganalisis hubungan antar variabel dependen dan independen, maka pengelolaan data dilakukan dengan metode analisis dengan model *Ordinary Least Square* (OLS). Metode OLS digunakan untuk memperoleh estimasi parameter dalam menganalisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Metode OLS dipilih karena merupakan salah satu metode sederhana dengan analisis regresi yang kuat dan popular, dengan asumsi-asumsi tertentu (Gujarati, 2003). Dalam penelitian ini meliputi pengujian individu (uji-t) dan pengujian ketepatan perkiraan ( $R^2$ )

### Model Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

### Hipotesis

1. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

##### Regresi Berganda

Dalam hal untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan analisis linear berganda. Analisis regresi berganda merupakan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel tidak bebas (*dependent variable*), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut variabel bebas (*independent variable*). Berikut hasil regresi untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ ) menggunakan model OLS (*Ordinary Least Squares*). Hasil regresi bisa dilihat pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Regresi**  
**Variabel IPM dan Pertumbuhan Ekonomi**

Dependent Variable: Y1				
Method: Least Squares				
Sample: 2010 2021				
Included observations: 12				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.563883	0.212061	-2.659053	0.0239
C	45.59425	15.01087	3.037414	0.0125
R-squared	0.414196	Mean dependent var	5.692500	
Adjusted R-squared	0.355616	S.D. dependent var	1.650538	
S.E. of regression	1.324945	Akaike info criterion	3.551631	
Sum squared resid	17.55480	Schwarz criterion	3.632449	
Log likelihood	-19.30979	Hannan-Quinn criter.	3.521709	
F-statistic	7.070561	Durbin-Watson stat	2.039079	
Prob(F-statistic)	0.023938			

Eviews 8

#### Uji Parsial (Uji t)

Hasil persamaan regresi Indeks Pembangunan Manusia ( $X_1$ ) pada tabel 1 menunjukkan tanda negatif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas sebesar 0.00239 dimana nilai probabilitas ini lebih kecil dari  $\alpha$  5%, maka  $H_0$  diterima  $H_0$  ditolak. Variabel IPM mempunyai nilai  $t_{hitung}$  yakni 2.659053 dan  $t_{tabel}$  1.81246

dengan  $df = 10$  ( $n-k=12-2=10$ ). Jadi,  $t_{hitung} = 2.659053 > t_{table} = 1.81246$  Artinya ada hubungan linier antara IPM dengan Pertumbuhan Ekonomi. Jadi dapat disimpulkan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

### Uji Determinasi $R^2$

Nilai  $R^2$  yang diperoleh sebesar 0.414196. artinya, variasi perubahan IPM mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 41,41%, sedangkan sisanya (58,59%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukan dalam model.

Berikut hasil regresi untuk mengetahui pengaruh IPM ( $X_1$ ) terhadap Kemiskinan ( $Y_2$ ) menggunakan model OLS (*Ordinary Least Squares*). Hasil regresi bisa dilihat pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Regresi**  
**Variabel IPM dan Kemiskinan**

Dependent Variable: Y2				
Method: Least Squares				
Sample: 2010 2021				
Included observations: 12				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.217876	0.067338	-3.235544	0.0089
C	23.61580	4.766577	4.954456	0.0006
R-squared	0.511450	Mean dependent var	8.198333	
Adjusted R-squared	0.462595	S.D. dependent var	0.573915	
S.E. of regression	0.420725	Akaike info criterion	1.257338	
Sum squared resid	1.770097	Schwarz criterion	1.338156	
Log likelihood	-5.544029	Hannan-Quinn criter.	1.227417	
F-statistic	10.46874	Durbin-Watson stat	1.593714	
Prob(F-statistic)	0.008937			

Eviews 8

### Uji Parsial (Uji t)

Hasil persamaan regresi Indeks Pembangunan Manusia ( $X_1$ ) pada tabel 2 menunjukan tanda negatif dan signifikan secara statistik terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0089 dimana nilai probabilitas ini lebih kecil dari  $\alpha = 1\%$ , maka  $H_a$  diterima  $H_0$  ditolak. Variabel IPM mempunyai nilai  $t_{hitung}$  yakni 3.235544 dan  $t_{table}$  2.76377 dengan  $df = 10$  ( $n-k=12-2=10$ ). Jadi,  $t_{hitung} = 3.235544 > t_{table} = 2.76377$  Artinya ada hubungan linier antara IPM dengan

Kemiskinan. Jadi dapat disimpulkan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **Uji Determinasi $R^2$**

Nilai  $R^2$  yang diperoleh sebesar 0,511450. artinya, variasi perubahan IPM mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 51,14%, sedangkan sisanya (48,86%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukan dalam model.

## **Pembahasan**

### **1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hasil penelitian menunjukan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antara indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. artinya apabila indeks pembangunan manusia meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Akan tetapi hasil penelitian menunjukan tanda negatif artinya apabila IPM meningkat maka pertumbuhan ekonomi turun. Indeks pembangunan manusia juga berperan penting dalam pembangunan ekonomi karena pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan. Mutu penduduk yang baik akan mampu untuk berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Selain daripada itu pembangunan manusia yang tinggi mengakibatkan jumlah penduduk akan tinggi pula sehingga akan menaikkan tingkat konsumsi. Hal ini akan mempermudah untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi (sukirno, 2006) Sudah saatnya pembangunan tidak lagi diletakkan pada kekuatan sumber daya alam (*natural resources based*), tetapi pada kekuatan sumber daya manusia (*human resources based*). Caranya adalah dengan meletakkan prioritas pembangunan manusia yang berhasil akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Ginting dalam Setyowati dan Suparwati, 2012).

### **2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan**

Hasil penelitian menunjukan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif antara indeks pembangunan manusia dengan kemiskinan. Artinya, apabila indeks pembangunan manusia meningkat maka kemiskinan akan turun. *Ceteris paribus*. Tingkat kemiskinan yang menurun karena meningkatnya indeks pembangunan manusia mengindikasikan bahwa indeks pembangunan manusia mampu meningkatkan produktifitas kerja manusia, yang akan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Kondisi ini dapat dijelaskan dimana IPM merupakan indeks komposit yang terbentuk dari indeks pendidikan masyarakat, indeks kesehatan masyarakat dan indeks kemampuan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*). Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang

( Marisca dan Haryadi, 2016). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari Kristin Prasetyoningrum (2018) yang menunjukkan menurunnya angka kemiskinan, saat IPM naik akan meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM. Kualitas SDM yang baik tentu akan memiliki nilai untuk memperoleh gaji yang tinggi. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat itu sendiri akan meningkat, sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya kemiskinan.

#### 4. PENUTUP

##### Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. artinya apabila indeks pembangunan manusia meningkat maka pertumbuhan ekonomi turun. *ceteris paribus*. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa ketika indeks pembangunan manusia meningkat maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya saat indeks pembangunan meningkat maka kemiskinan akan menurun. *Ceteris paribus*. Meningkatnya Indeks pembangunan manusia mampu meningkatkan produktifitas kerja manusia, yang akan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

##### Saran

Bagi pemerintah pusat dan daerah agar dapat memberikan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat lebih meningkatkan indeks pembangunan manusia. Juga agar setiap kebijakan harus diawasi dan diperketat agar dapat tepat sasaran sehingga indeks pembangunan manusia bisa meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln (2010)**, “Ekonomi Pembangunan”, Edisi Kelima, Penerbit BP STIE YKPN, Yogyakarta
- Arsyad, Lincoln. 1999.** Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE. Yogyakarta
- Baeti, N. (2013).** Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 02(03), 85-98. Retrieved from <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjI9qeCh5PsAhU263MBHb7eB7AQFjAAegQIARAC&>

- url=https%3A%2F%2Fjournal.unnes.ac.id%2Fsju%2Findex.php%2Fedaj%2Farticle%2Fview%2F1984%2F1785&usg=AOvVaw2vU\_OmLVRQ\_GGP5\_I3xI28V
- Ginting dkk. 2008.** “Pembangunan Manusia di Imdonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya”. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Vol.4, No.1, Agustus 2008. Hal 17-24.
- Gujarati, Damodar, 2003**, Ekonometri Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.
- Haughton, Jonathan dan Shahidur R. Khandker. 2010.** *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Terjemahan oleh Tim Penerjemah World Bank. 2012. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Y. (2006)**. Analisis Sosial Ekonomi Rumah Tangga Kaitannya dengan Kemiskinan di Perkotaan. Laporan Penelitian Hukum Lingkungan Mahasiswa S-2 Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Harliyani, Eka Marisca., Haryadi. 2016.** Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. Jambi: Universitas Jambi.
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo, 1999**, Metodologi Penelitian dan Bisnis, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Jhingan, M.L. 2007.** Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mankiw, N. Gregory, 2000**, Teori Makroekonomi edisi keempat (terjemahan), Jakarta: Erlangga.
- Mirza, Denni Sulistio, 2012**, “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006- 2009”, Economics Development Analysis Journal, volume 1, no. 2.
- Nugroho, Heru. 1995.** Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan. Yogyakarta : Aditya Media.
- Nunung Nurwati. 2008.** “Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan”. Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, Januari 2008 : 1 – 11.
- Prasetyoningrum, A. Kristin. (2018).** “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengagguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia”. Semarang : UIN Walisanga Semarang.
- Riska Garnella, Nazaruddin A. Wahid, MA dan Yulindawati (2020)** PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN KEMISKINAN TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI ACEH. JIMEBIS-Volume 1 Nomor 1 Januari-Juni 2020|21file:///C:/Users/USER/Downloads/104-Article%20Text-228-2-10-20201115.pdf
- Sukirno, Sadono. (2006).** Pengantar Teori Makro Ekonomi . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012.** "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Pendidikan dan Kesehatan sebagai variabel intervening" . Jurnal. Vol. 9 No.1. Hal 113-133.
- Suryawati. 2004.** Teori Ekonomi Mikro. Yogyakarta: Jarnasy.
- Sukirno, Sadono, 2002.** Makro Ekonomi Modern, P.T.Rajawali Grafindo Persada : Jakarta.
- Sadono, Sukirno. (2000),** Makroekonomi Modern:Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru : Raja Grafindo Pustaka
- Sadono Sukirno. 1994.** Pengantar Teori Ekonomi Makro. Jakarta: Raja Grafindo
- Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2012).** Economic Development (11th ed). New York: Pearson.
- Todaro P. Michael. 2000.** Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I, Jakarta Penerbit : Erlangga
- UNDP. 1995.** "Human Development Report" United Nations Development Programme. New York
- UNDP 2001.** Human Development Report 2001. New York : Oxford Universitu Press.

